

ANALISA

1984—4

MASALAH KAMPUCHEA DAN INDONESIA- VIETNAM



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Pande Radja SILALAH

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEF
Rufinus LAHUR
J. PANGLAYKIM
A.M.W. PRANARKA
M. Hadi SOESASTRO
Harry TJAN SILALAH
Jusuf WANANDI
Kirdi DIPOYUDO
A. Sudiharto DJIWANDONO
Djisman S. SIMANDJUNTAK
J. Soedjati DJIWANDONO
Ronald NANGOI

Redaksi Pelaksana

Pande Radja SILALAH
Ronald NANGOI

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

Alamat

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160,
Telepon 356532 - 35

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,
Jakarta 10160, Telepon 349489

PENGANTAR REDAKSI	250
KEPENTINGAN NEGARA-NEGARA BESAR DI ASIA TENGGARA	
<i>Fuad HASSAN</i>	254
STRATEGI JANGKA PANJANG NEGARA- NEGARA ASIA TENGGARA.	
<i>J. Soedjati DJIWANDONO</i>	262
PROSPEK PERDAMAIAN DAN STABILITAS DI ASIA TENGGARA DAN PENYELESAIAN KONFLIK DI KAMPUCHEA	
<i>Jusuf WANANDI</i>	272
PROSPEK PENYELESAIAN MASALAH-MASALAH PERDAMAIAN DAN KESTABILAN DI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA	
<i>PHAM BINH</i>	278
MASALAH KAMPUCHEA: RETROSPEK DAN PROSPEK	
<i>Adam MALIK</i>	299
KERJASAMA EKONOMI DI ANTARA NEGARA-NEGARA DI KAWASAN ASIA TENGGARA	
<i>Hadi SOESASTRO</i>	309
KEMUNGKINAN KERJASAMA EKONOMI ANTARA VIETNAM DAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA	
<i>DOAN TRONG TRUYEN</i>	319

Pengantar Redaksi

Konflik Kampuchea yang berkepanjangan masih mewarnai situasi di Kawasan Asia Tenggara. Konflik ini malahan dikhawatirkan bisa meluas karena beberapa negara Asia Tenggara cenderung mencari dukungan negara-negara besar. Oleh sebab itu negara-negara ASEAN melihat konflik itu tidak menguntungkan kawasan dan merintangi usaha mereka untuk mewujudkan gagasan zona damai, bebas, dan netral di kawasan.

Kita mengetahui bahwa usaha-usaha penyelesaian konflik Kampuchea ini telah menemui jalan buntu. Vietnam misalnya, kurang menanggapi secara positif usul-usul ASEAN, seperti penyelesaian politik lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konperensi Internasional mengenai Kampuchea (ICK), dan juga pembentukan Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratik. Ia menilai usul-usul serta pembentukan Pemerintah Koalisi itu bersifat sepihak dan kurang memperhatikan kepentingannya karena menganggap bahwa negara-negara ASEAN memberi angin kepada kelompok Pol'Pot dan membiarkan Cina mempertahankan ancamannya.

Kesulitan penyelesaian konflik juga tidak lepas dari perbedaan pandangan Vietnam dengan negara-negara ASEAN. Di satu pihak, negara-negara ASEAN menilai intervensi Vietnam di Kampuchea sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh negara-negara Dunia Ketiga dan Non-Blok. Di lain pihak, Vietnam berpendapat bahwa masalah Kampuchea adalah masalah intern dan intervensi dilakukan atas permintaan rakyat dan Pemerintah Kampuchea untuk melawan rezim Pol Pot dukungan Cina. Oleh sebab itu intervensi dilihatnya sebagai pendukung stabilitas Asia Tenggara karena juga dimaksudkan untuk membatasi kemampuan Cina melakukan intervensi di kawasan.

Penyelesaian tampaknya semakin rumit karena Vietnam cenderung mencurigai bahwa Muangthai khususnya bersekongkol dengan Cina dan kelom-

pok Pol Pot untuk mengembalikan situasi Kampuchea seperti semula, yakni ke situasi sebelum intervensi Vietnam. Ia bahkan menganggap Muangthai sebagai eskpansionis dengan mengungkit-ungkit latar belakang sejarah hubungan Muangthai dengan negara-negara tetangganya. Oleh sebab itu ia telah menolak usul Muangthai mengenai penyelesaian konflik Kampuchea termasuk usul penarikan pasukan Vietnam dari Kampuchea.

Namun baik Vietnam maupun negara-negara ASEAN menginginkan tercapainya penyelesaian konflik di Asia Tenggara. ASEAN jelas mengkhawatirkan bahwa masalah yang berlarut-larut akan mengundang keterlibatan negara-negara besar lebih jauh sehingga memperbesar masalah dan memper-sulit perwujudan Kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas dan netral. Vietnam juga menyadari bahwa situasi seperti ini bisa memperburuk perbedaan antara negara-negara Indocina dan ASEAN dan mengganggu usaha-usaha mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan sosial masing-masing negara.

Sehubungan dengan itu Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya terus berusaha mencari penyelesaian politik masalah di kawasan. Sambil tetap mempertahankan solidaritas ASEAN, Indonesia cenderung melihat perlu ditingkatkannya hubungan bilateral dengan Vietnam, karena hubungan tersebut diharapkan akan membuka jalan bagi hubungan yang baik antara negara-negara ASEAN dan Indocina untuk menciptakan kawasan yang aman dan stabil. Lagipula mereka sedang menghadapi perkembangan global yang kurang menguntungkan, karena ketegangan hubungan Uni Soviet dengan Cina yang mengganggu kestabilan kawasan.

ANALISA April 1984 bertemakan "Masalah Kampuchea dan Indonesia-Vietnam" dengan menurunkan tujuh buah tulisan yang sebagian besar diambil dari makalah-makalah Seminar Indonesia-Vietnam yang diselenggarakan oleh CSIS bersama Institute of International Relations Kementerian Luar Negeri Vietnam di Hanoi pada 25-26 Pebruari 1984. Karangan pertama yang berjudul "Kepentingan Negara-negara Besar di Asia Tenggara" dan ditulis oleh Fuad HASSAN membahas beberapa kenyataan yang didasarkan pada persepsi tingkah-laku superpower di Asia Tenggara; perkembangan mandala Asia Tenggara dan kepentingan serta keterlibatan negara-negara superpower; dan pendekatan Indonesia terhadap masalah-masalah regional. Kehadiran kekuatan-kekuatan besar di Kawasan Asia Tenggara merupakan suatu kenyataan atau bahkan bagian dari kehidupan Asia Tenggara oleh karena kepentingan global mereka untuk mempertahankan status sebagai kekuatan-kekuatan besar. Oleh sebab itu negara-negara kawasan perlu memperkuat diri untuk memelihara stabilitas regional.

Hingga kini konflik yang berkepanjangan masih berlangsung di Kawasan Asia Tenggara. Konflik ini telah memberi kesempatan kepada negara-negara luar untuk campur tangan terutama karena beberapa negara Asia Tenggara telah melakukan persekutuan dengan negara-negara besar tertentu sebagai bentuk penyelesaian. Sehubungan dengan itu suatu penyelesaian politik dalam bentuk kompromi perlu diusahakan dan dicari dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat khususnya rakyat Kampuchea dan berusaha mengurangi kepentingan campur tangan dari luar. Karangan yang kedua berjudul "Strategi Jangka Panjang Negara-negara Asia Tenggara" dan ditulis oleh J. Soedjati DJIWANDONO. Karangan ini membahas hakikat konflik di Kawasan Asia Tenggara dan usaha-usaha serta sikap negara-negara Asia Tenggara dalam mengatasi konflik di kawasan.

Vietnam dan ASEAN memiliki pandangan yang berbeda dan malahan bertentangan mengenai konflik Kampuchea. Tidak seperti halnya ASEAN, Vietnam misalnya berpandangan bahwa konflik tersebut tidak merintangi terselenggaranya Asia Tenggara yang damai dan stabil. Perbedaan pandangan ini akan sulit dipertemukan jika tidak ada kemauan politik dari kedua belah pihak untuk mencapai kompromi yang sangat diperlukan demi pemecahan konflik dan stabilitas Kawasan Asia Tenggara. Dalam karangan berikutnya, Jusuf WANANDI membahas prospek perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara dan penyelesaian konflik di Kampuchea tersebut.

Pihak Vietnam menyadari bahwa Asia Tenggara merupakan satu-satunya kawasan yang belum menikmati perdamaian. Perbedaan pandangan mengenai penyelesaian krisis di Kampuchea tetap mewarnai usaha-usaha negara-negara Asia Tenggara. Dalam karangan keempat yang menyoroti prospek penyelesaian masalah-masalah perdamaian dan kestabilan di Asia Tenggara, PHAM BINH secara panjang lebar membahas perbedaan pandangan mengenai posisi dan langkah-langkah penyelesaian; sebab-sebab dan hakikat masalah; kemungkinan-kemungkinan dan persyaratan-persyaratan penyelesaian; dan prospek penyelesaian masalah Asia Tenggara pada tahun 2000-an.

Perkembangan di Kampuchea adalah akibat konflik antara Cina dan Vietnam -- bukan antara negara-negara ASEAN dan Vietnam -- sebagai perluasan persaingan Cina-Soviet. Namun masalah Kampuchea yang berlarut-larut ini jelas tidak menguntungkan negara-negara Asia Tenggara. Oleh sebab itu suatu penyelesaian harus terus diusahakan antara lain melalui sepakat kata antara pihak-pihak yang terlibat sambil mempertahankan akses ke sumber-sumber kekuatan tandingan tanpa maksud untuk memojokkan Vietnam mengenai Kampuchea. Dalam karangan yang kelima, Adam MALIK membahas retrospek dan prospek masalah Kampuchea ini. Karangan ini diambil dari

Keynote Address yang disampaikan pada pertemuan umum tahunan Press Foundation of Asia, mengenai "Masalah Kampuchea: Retrospek dan Prospek," di Hongkong pada 28 Pebruari 1984.

Dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi di Kawasan Asia Tenggara kiranya diperlukan penilaian mengenai hubungan perdagangan negara-negara di kawasan. Penilaian tersebut dapat memberi gambaran mengenai struktur ekonomi dari setiap negara Asia Tenggara dan dapat menunjukkan bidang-bidang yang cukup potensial untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Dalam karangan yang keenam, Hadi SOESASTRO membahas beberapa isyu umum mengenai kerjasama ekonomi regional di Kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan di antara negara-negara sedang berkembang pada umumnya.

Pihak Vietnam berpendirian bahwa hubungan ekonomi dengan Indonesia atau dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya kiranya memerlukan landasan kerjasama agar memberi ruang lingkup bagi arah dan kemungkinan kerjasama. Dalam karangan yang terakhir, DOAN TRONG TRUYEN menyoroti juga kemungkinan kerjasama ekonomi antar negara-negara Asia Tenggara. Secara berturut-turut ia membahas masalah-masalah mengenai dasar umum, arah serta kemungkinan kerjasama ekonomi tersebut di kawasan.

April 1984

REDAKSI

Kepentingan Negara-negara Besar di Asia Tenggara*

Fuad HASSAN**

PENDAHULUAN

Adalah perlu bagi kita untuk memahami beberapa kesulitan dalam mengatasi persoalan yang penuh dengan spekulasi seperti tercermin dalam topik di atas. Persoalan itu bisa dilihat dari berbagai sudut dan bisa dipaparkan lebih lanjut. Persoalan lain adalah kenyataan bahwa Asia Tenggara merupakan suatu ajang yang berhubungan erat dengan Asia secara keseluruhan, dan apa yang tercermin dari yang pertama tidak dapat dipikirkan sebagai sesuatu yang terpisah dari yang terakhir. Sebagai tambahan, untuk melihat kepentingan negara-negara besar, khususnya jika dilihat dari sudut superpower sebagai kekuatan-kekuatan global, seseorang tidak dapat mengesampingkan kepentingan kawasan sebagai bagian integral dari strategi global superpower.

Oleh sebab itu sangat penting untuk memfokuskan pada kawasan kepentingan tertentu tanpa melepaskannya dari pandangan yang lebih luas dan lebih holistik.

Tulisan di bawah ini akan mencoba menyelidiki beberapa kenyataan yang didasarkan pada persepsi-persepsi tingkah laku superpower sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai kekuatan global. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa persepsi-persepsi itu tidak dapat dipersengketakan; pertukaran

*Terjemahan makalah yang disampaikan pada Seminar Bilateral Indonesia-Vietnam, 25-26 Pebruari 1984 di Hanoi, Vietnam dan disponsori bersama oleh CSIS Jakarta dan Institute of International Relations, Ministry of Foreign Affairs Hanoi. Diterjemahkan oleh Bantarto BANDORO

**Fuad HASSAN adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri RI.

pandangan secara kritis sangat penting sekalipun kesimpulan yang padat tidak dapat dicapai.

Selanjutnya akan disusul dengan pemaparan secara singkat perkembangan mandala Asia Tenggara sejak berakhirnya Perang Pasifik sampai saat ini dan melihat kepentingan dan keterlibatan superpower.

Akhirnya beberapa catatan mengenai pendekatan Indonesia terhadap masalah-masalah regional, bertujuan untuk menciptakan iklim saling percaya di antara negara-negara di kawasan dan mempertahankan sikap superpower di kawasan ini sampai tingkat minimum.

SIFAT NEGARA-NEGARA BESAR

Untuk mencegah salah pengertian suatu definisi yang jelas sangat diperlukan, yaitu mengenai konsep "great powers;" konsep ini dapat digunakan sebagai sinonim "major powers;" yang kedua istilah ini dapat diindonesiakan sebagai negara-negara besar. Akan tetapi (setidaknya atas risalah ini) suatu perbedaan akan tetap dipertahankan antara "negara-negara besar" dan "superpower." Perbedaan ini penting, karena konsep ini cenderung dikaitkan dengan dua bidang yang berbeda.

Pemakaian istilah "negara-negara besar" cenderung dikaitkan dengan gagasan "pusat kekuatan yang beraneka ragam" yang tidak secara mutlak dipola dalam pengertian dikotomi antara blok-blok kekuatan. Maksud multipolaritas pusat-pusat kekuatan bisa dikaitkan dengan interaksi dan potensi negara-negara besar. Hal itu secara mudah diartikan blok-blok yang saling bertentangan.

Di lain pihak konsep "superpower" secara unik dibatasi pada dua kekuatan militer besar Amerika Serikat dan Uni Soviet, baik secara individu maupun aliansi dengan lainnya. "Superpower" tidak hanya diidentifikasi dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet, tetapi juga sebagai dua kekuatan yang saling curiga hampir selalu dalam pola persaingan atau bahkan konfrontasi. Oleh sebab itu kecenderungan untuk menyederhanakan pola interaksi mereka pada tingkat global, yaitu hubungan Timur-Barat, yang selama ini dikenal dengan "ketegangan Timur-Barat."

Hal itu tidak berarti menolak konsep multipolaritas dan menggantikannya dengan konsep bipolaritas semata-mata; kedua konsep itu tetap berlaku. Akan tetapi, bilamana seseorang berpikir tentang kekuatan militer sebagai dimensi penting dalam tingkah laku internasional, maka bipolaritas sangat mudah tercipta sebagai realitas dalam masalah-masalah global. Sikap dan

posisi sebagai kekuatan cenderung timbal balik dan membelah dunia ke dalam daerah pengaruh tetap merupakan permainan. Dan bahkan bila kedua superpower Amerika Serikat dan Uni Soviet, adalah anggota Dewan Keamanan PBB yang mempunyai hak veto, Dewan Keamanan PBB akan kelihatan lumpuh bilamana ia menghadapi sengketa superpower.

Sementara waktu berlalu, semakin menjadi jelas bahwa peranan utama Dewan Keamanan PBB dimainkan oleh kekuatan raksasa, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Polarisasi kedua kekuatan itu semakin menjadi tajam akibat perang dingin yang terjadi antara mereka. Dalam sejarah konflik setelah perang yang melibatkan dua superpower semakin nyata bahwa PBB dan Dewan Keamanannya semakin tidak mampu memainkan peranan efektif bilamana konflik kepentingan antara kedua superpower itu timbul. Kenyataannya timbul kesan bahwa superpower cenderung menyelesaikan sengketa mereka di luar PBB dan Dewan Keamanannya.

Namun demikian PBB dan peranan Dewan Keamanan seperti disebutkan di atas tetap dianggap oleh Dunia Ketiga sebagai badan yang mempunyai nilai yang bermanfaat, sebagai alat untuk mencegah keterlibatan kedua superpower dalam sengketa dan konflik. Pembentukan Gerakan Non-Blok (1961) yang didahului oleh Konperensi Asia-Afrika (1955), berhasil mencegah dunia dari perpecahan ke dalam dua blok yang saling bertentangan. Gerakan Non-Blok berhasil mencegah keterlibatan anggota-anggotanya dalam perang dingin. Perkembangan yang pesat dari gerakan itu mempunyai pengaruh besar terhadap perimbangan kekuatan di PBB. Penegakan posisinya sebagai Non-Blok baik dalam jiwa dan sikap mengesampingkan kemungkinan aliansi dengan salah satu superpower (konflik). Hal itu secara otomatis akan menciptakan halangan bagi superpower untuk menyebarluaskan benih-benih sengketa mereka ke kawasan-kawasan di luar zone perang dingin.

Dengan demikian, sekalipun kenyataan bahwa superpower memilih pola penyelesaian konflik mereka sendiri bilamana sengketa antar mereka timbul, maka tidak pada tempatnya untuk mengatakan bahwa PBB dan Dewan Keamanannya tidak berfungsi dalam mempertahankan tugasnya. Sejumlah persoalan-persoalan internasional yang melibatkan negara-negara Dunia Ketiga ditangani oleh PBB dan Dewan Keamanan dengan tingkat efektivitas yang tinggi. PBB efektif dalam aplikasi diplomasi preventif, yaitu dengan menggunakan inisiatif diplomatik yang tidak membuka pintu bagi semakin memburuknya situasi konflik dan keterlibatan serta intervensi oleh superpower.

Menyadari kenyataan tingkah laku superpower seperti disebutkan di atas, sifat-sifat tingkah laku superpower berikut ini tetap harus dilihat saat ini.

Pertama, kenyataan universal bahwa pola bipolar tetap berlaku dalam interaksi antara kedua superpower, khususnya sebagai blok militer. Kejadian yang paling mengancam perdamaian dunia dan mungkin penghancuran peradaban manusia, adalah konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan masing-masing sekutunya. Konfrontasi bipolar kedua superpower semakin ditekankan oleh proses spiralistis pengeluaran anggaran persenjataan di kedua pihak. SALT dan START tetap merupakan bentuk pertemuan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, unsur utama yang menimbulkan saling curiga. Konsekuensinya, persepsi untuk mencapai perimbangan dalam persenjataan dikacaukan oleh gagasan "keamanan anda adalah ketidakamanan kami." Kadang kala orang sampai pada kesimpulan bahwa pertemuan-pertemuan seperti SALT dan START terutama bertujuan untuk mempertahankan jalur-jalur komunikasi terbuka antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, tiadanya unsur-unsur yang memberikan pembenaran untuk harapan dan optimisme. Dikotomi Timur-Barat saat ini cenderung lebih dilihat sebagai "keretakan Timur-Barat" yang digambarkan oleh ketegangan yang abadi. Dan di dalam menganalisa konflik internasional dan jalan keluarnya, keretakan Timur-Barat cenderung meninggalkan jejaknya.

Persepsi kedua adalah kenyataan yang ada bahwa superpower, sebagai kekuatan-kekuatan global dalam "optima forma," menginginkan hadir secara global. Hal ini sulit dielakkan, karena alasan yang sederhana bahwa superpower akan kehilangan statusnya itu bilamana tidak lagi memiliki pengaruh untuk dipaksakan, mengendalikan dan bahkan menetapkan garis komando tindakan dalam kejadian-kejadian global. Dengan kehadirannya secara global, superpower menciptakan daerah pengaruhnya secara global. Merupakan suatu kebenaran bahwa semakin banyak negara yang mengambil sikap negatif terhadap gagasan penggelaran pangkalan-pangkalan militer asing di wilayahnya. Sekalipun demikian posisi dan sikap global melekat pada sifat superpower. Cara kehadiran itu bisa berubah, sebagian karena munculnya teknologi dan ilmu pengetahuan modern dan sebagian karena munculnya afinitas politik. Akan tetapi kehadiran global secara efektif akan tetap merupakan tujuan yang diinginkan. Suatu hal yang tidak dapat dipikirkan bahwa kekuatan global tanpa strategi global, dan hal ini setidaknya dalam konteks pemikiran kepentingan superpower di kawasan kita juga.

Berkaitan erat dengan persepsi di atas adalah persepsi yang ketiga, yaitu kecenderungan yang semakin meningkat dari superpower untuk menunjukkan perhatiannya dalam konflik-konflik regional dan akhirnya terlibat di dalamnya, termasuk intervensi militer. Dalam intervensi militer superpower selalu akan mencoba membenarkan tindakannya sesuai dengan kepentingan nasional atau globalnya. Dan untuk tindakan serupa itu masyarakat internasional tidak memiliki alat efektif untuk mencegah konsekuensi-konsekuensi-

nya. Demikianpun tiada "kode etik" pada superpower. Dalam banyak kejadian konflik-konflik regional kesimpulannya adalah jelas, bahwa khususnya dalam konflik regional yang berlarut-larut kesempatan keterlibatan superpower meningkat secara berarti. Dan sekali terlibat, peleraian superpower cenderung melampaui proses yang lamban.

Kalau persepsi-persepsi tersebut di atas itu benar, konsekuensi logisnya adalah kenyataan bahwa juga di kawasan kita, Asia Tenggara, kepentingan superpower ada. Persoalan utama adalah apakah kepentingan mereka masing-masing semata-mata merupakan kebetulan atau merupakan usaha untuk menyejajarkan satu sama lain, atau apakah merupakan konflik kepentingan akibat friksi. Mandala Asia dan Asia Tenggara di masa lalu memiliki pengalaman yang luas dalam hubungan ini. Dan atas dasar pengalaman-pengalaman itu pengulangan kembali kesalahan-kesalahan di masa lampau harus dan dapat dicegah. Satu pelajaran penting adalah bahwa keterlibatan superpower cenderung dilakukan atas dasar pertimbangan perlindungan kepentingan diri sendiri dalam bidang global.

MANDALA ASIA TENGGARA

Diapit oleh dua lautan besar dunia dan menghubungkan daratan Asia dengan Australia, Kawasan Asia Tenggara mempunyai arti penting dalam berbagai hal. Secara tradisional kawasan itu merupakan salah satu rute perdagangan yang padat di dunia; dalam era pra-Perang Pasifik, Asia Tenggara terutama terdiri dari koloni-koloni kekuatan-kekuatan Barat dan berubah menjadi daerah pertemuan internasional. Kehadiran kekuatan-kekuatan luar kemudian merupakan bagian dari kehidupan Asia Tenggara; situasi ini kemudian dikacaukan oleh pendudukan Jepang -- kekuatan asing lainnya -- sampai Jepang menyerah kepada kekuatan Sekutu bulan Agustus 1945, yang juga mengakhiri Perang Pasifik.

Sejak 1945 era baru dimulai di Asia Tenggara, yaitu gerakan nasional untuk kemerdekaan. Hal ini menimbulkan suatu proses kebangkitan nasional yang menginginkan untuk memperoleh kembali kemerdekaan dari kekuatan-kekuatan kolonial. Sampai tingkat tertentu kita dapat menggambarkan era itu sebagai periode di mana kehadiran kekuatan-kekuatan (kolonial) dianggap tidak bisa diterima dan oleh sebab itu harus disingkirkan untuk selamanya. Suatu petunjuk yang menunjuk kepada kemungkinan kembalinya kondisi kolonial akan menghadapi perlawanan yang kuat.

Sekalipun demikian, kekuatan-kekuatan luar, termasuk kekuatan-kekuatan besar yang muncul sebagai pemenang dalam perang, kelihatannya tetap melanjutkan usaha-usahanya untuk mempertahankan kehadiran mereka

di kawasan. Sementara di daratan Cina berlangsung perebutan kekuasaan antara kekuatan-kekuatan Mao Zedong dan Chiang Kaisek, Amerika Serikat dan Uni Soviet kelihatannya mulai berusaha mendekati kekuatan-kekuatan regional dalam usahanya mencari kecenderungan afiliasi. Amerika Serikat mempertahankan pangkalan-pangkalan militer di Jepang/Okinawa, Korea, Taiwan, Muangthai dan Pilipina jelas merupakan kekuatan dominan di Asia dan Pasifik dan konsekuensinya di Asia Tenggara. Ketika Doktrin Truman diumumkan (1947) strategi Amerika Serikat yang dipola untuk membendung pengaruh komunis Rusia dan Cina, persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di Asia Timur dan Asia Tenggara semakin berkembang baik secara militer maupun politik. Dalam tahun-tahun itu dua perang berlangsung cukup lama; Perang Korea dan Perang Vietnam, keduanya meninggalkan jejak pada geografi politik Asia Timur dan Asia Tenggara. Adalah Perang Vietnam yang menggambarkan keterlibatan superpower untuk jangka yang lama dan secara demikian meningkatkan kehadirannya di Kawasan Asia Tenggara.

Pada akhir Perang Vietnam dan konsekuensinya penarikan mundur kekuatan Amerika Serikat, geografi politik di kawasan berubah secara berarti. Hubungan antara Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina memburuk (sejak insiden Ussuri 1969), pendekatan-pendekatan antara Amerika Serikat dan RRC membuat kedua negara besar itu dekat satu dengan lainnya (sejak kunjungan Nixon 1972); pengalaman-pengalaman dalam kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara akhirnya direalisasi dengan dibentuknya ASEAN (Agustus 1967) dan Vietnam yang bersatu menjadi kenyataan setelah perang.

Bagi banyak pengamat, penarikan mundur kekuatan Amerika Serikat kelihatannya menciptakan kekosongan kekuatan untuk menjamin keamanan dan stabilitas di kawasan; bagi pengamat lainnya penarikan itu dilihat sebagai era baru di mana negara-negara Asia Tenggara harus memikul sendiri beban tanggung jawab dalam menjamin keamanan dan stabilitas regional. Untuk yang terakhir, tiadanya persaingan superpower di kawasan akan memberikan suatu yang terbaik untuk menetapkan dasar-dasar perdamaian dan stabilitas di kawasan. Hal ini setidaknya merupakan pandangan yang berlaku di kalangan negara-negara pendiri ASEAN, dan hal itu juga yang kemudian melahirkan konsep ZOPFAN di Asia Tenggara.

Sebagai pengganti ketergantungan pada pengaturan keamanan dengan kekuatan-kekuatan luar -- khususnya dengan superpower -- suatu pandangan bahwa negara-negara di kawasan dapat memikul beban dalam memelihara stabilitas regional berkembang semakin kuat setiap hari dan konsep ketahanan nasional termasuk ketahanan regional diperkenalkan. Dan ketahanan regional sebagai suatu pemikiran kolektif hanya akan ada bilamana tingkat maksimum

saling percaya itu ada, mengikat negara-negara di kawasan terhadap usaha-usaha kerjasama. Kenyataannya hal itu terlihat pada ASEAN seperti sekarang ini; ASEAN tidak hanya sebagai alat untuk kerjasama regional tetapi juga telah menjadi forum di mana pembentukan saling percaya diri terjadi. ASEAN telah berhasil membentuk kawasannya menjadi suatu kawasan yang beritikad baik dan bersahabat, digambarkan oleh saling penghargaan dan pengertian.

Walaupun kenyataan bahwa ASEAN dibentuk lama sebelum PBB mengeluarkan dokumennya mengenai langkah-langkah pembangunan kepercayaan (Dokumen PBB No. A/36/474 tanggal 6 Oktober 1981), ASEAN dapat dianggap berhasil dalam mengembangkan kepercayaan pada tingkat regional. Hal itu benar mengingat kondisi-kondisi yang mendahului pembentukannya termasuk tingkat perbedaan orientasi politik.

Kita tidak dapat menolak kenyataan bahwa persaingan superpower tetap dirasakan di Kawasan Asia Tenggara, hanya karena arti strategis kawasan itu sehubungan dengan mobilitas militer superpower. Berhubungan dengan Samudra Hindia dan Pasifik, Kawasan Asia Tenggara tetap merupakan kawasan kepentingan superpower untuk jangka waktu yang lama; setidaknya kehadiran lepas pantai diharapkan dikembangkan oleh superpower. Akan tetapi, negara-negara di kawasan harus menyadari bahwa keterlibatan superpower dalam masalah regional tidak akan mendapatkan keuntungan pada pemeliharaan stabilitas regional. Semakin berkurang keterlibatan superpower dalam konflik regional semakin berkurang kesempatan bagi superpower untuk mengambil posisi di kawasan. Pengalaman-pengalaman di masa lampau menunjukkan bahwa keterlibatan superpower dalam konflik regional cenderung memperpanjang situasi konflik dan tidak jarang dengan pengaruh "spill over;" ia bahkan cenderung untuk merumitkan usaha penyelesaian. Konflik regional yang berkepanjangan hanya akan meningkat dalam pengertian ketidakamanan, dan kondisi serupa itu tidak akan memberikan keuntungan bagi perkembangan regional dalam arti rekonstruktif.

Bila semua negara Asia Tenggara secara sungguh-sungguh membagi kepentingan memelihara perdamaian dan stabilitas regional, maka merupakan suatu keharusan bagi kita semua untuk bergantung pada kita sendiri daripada membiarkan lainnya mengawasi kawasan kita. Untuk mencapai kemandirian kolektif serupa itu dalam masalah-masalah regional, interaksi antara negara-negara kawasan harus selalu dalam suasana saling menghargai dan terikat pada sikap tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri lainnya. Negara-negara di kawasan harus mampu menunjukkan kepada dunia luar bahwa sekalipun ada perbedaan dalam pandangan ideologi, sistem sosial dan politik, sikap kooperatif dapat dikembangkan. Lebih lanjut, untuk mengganti pandangan keamanan seseorang sebagai ketidakamanan lainnya, kita harus

mampu meyakinkan diri kita bahwa keamanan satu negara meningkatkan keamanan lainnya. Sikap demikian ini juga harus dikembangkan agar konsep ketahanan regional bisa beroperasi. Dan sejauh yang menjadi perhatian ASEAN (dan Indonesia), hal itu dapat digunakan sebagai dasar realisasi gagasan ZOPFAN di kawasan.

Adalah tanggung jawab utama bagi negara-negara di kawasan untuk mencegah keterlibatan konflik pola Timur-Barat di mandala Asia Tenggara. Untuk itu kita membagi secara rata kewajiban untuk mengekang kesempatan superpower mengambil posisi di kawasan sampai tingkat minimum.

CATATAN PENUTUP

Makalah ini dimaksud sebagai titik permulaan bagi diskusi dan penjabaran lebih lanjut. Merupakan kesengajaan untuk mempertahankan jalan pemikiran umum sehubungan dengan tema makalah ini. Beberapa kasus untuk mengilustrasikan beberapa pernyataan bisa ditambahkan selama persentase.

Pandangan yang dikemukakan tidak merupakan pandangan resmi Indonesia mengenai masalah ini, tetapi lebih merupakan pandangan pribadi. Saya telah mencoba mengikuti jalan pemikiran Indonesia sesuai dengan tingkat pengetahuan saya.

Strategi Jangka Panjang Negara-negara Asia Tenggara*

J. Soedjati DJIWANDONO

I

Perlu saya tegaskan pada permulaan, *pertama*, bahwa dalam pembahasan di bawah ini saya tidak menggunakan istilah "strategi" dalam pengertian yang klasik, yang berarti "seni dari *strategon* atau panglima militer," yang dirumuskan oleh Clausewitz sebagai "penggunaan pertempuran-pertempuran bagi tujuan perang" atau sebagaimana diuraikan lebih jauh oleh Liddel Hart sebagai "seni penggelaran dan penggunaan sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan politik." Saya menggunakan istilah itu dalam pengertian umum sekedar untuk menggambarkan "penggunaan sumber-sumber yang ada untuk mencapai sesuatu tujuan." Oleh sebab itu sebutan itu tidak secara khusus menyangkut masalah penggelaran dan penggunaan pasukan-pasukan militer untuk mencapai suatu tujuan politik tertentu.

Kedua, saya membatasi lingkup pembahasan terutama pada negara-negara ASEAN, dengan demikian tidak termasuk Birma dan negara-negara Indocina serta negara-negara lain yang mungkin menganggap dirinya atau dianggap sebagai bagian Asia Tenggara. Negara-negara lain di luar ASEAN akan disinggung hanya sejauh hal itu berkaitan dengan tema umum pembahasan.

Akhirnya, perlu ditekankan bahwa uraian berikut ini hendaknya tidak di-tafsirkan sebagai mewakili pandangan resmi Indonesia atau ASEAN, melainkan semata-mata suatu pandangan pribadi. Meskipun demikian, pembahasan ini memang merupakan usaha untuk mengemukakan pengamatan dan pengertian pribadi atas apa yang saya lihat sebagai pemikiran resmi Indonesia dan ASEAN mengenai masalah yang ada.

*Terjemahan makalah yang disampaikan pada Seminar Indonesia-Vietnam di Hanoi, 25-26 Pebruari 1984. Diterjemahkan oleh A.R. SUTOPO.

Jika di Eropa berakhirnya Perang Dunia II segera diikuti oleh periode Perang Dingin yang berlangsung hingga dua dasawarsa berikutnya, di Asia Tenggara berakhirnya Perang Pasifik merupakan awal dari suatu era baru dari konflik-konflik yang tak berkeputusan yang berlangsung hingga kini. Hakikat dari konflik-konflik ini ada empat macam.

Pertama-tama, Asia Tenggara mengalami pergolakan dari lahirnya negara-negara baru yang berjuang untuk kemerdekaannya melawan penjajah-penjajah Barat. Dari pengalaman Indonesia, dan terlebih lagi Vietnam, perjuangan itu bersifat revolusioner, berdarah, mahal, dan berkepanjangan. Tetapi bahkan selagi perjuangan revolusioner untuk mencapai kemerdekaan penuh masih berlangsung, suatu dimensi konflik baru, yaitu perselisihan di dalam negeri, melanda negara-negara baru itu. Dalam hal beberapa negara seperti Indonesia, dimensi kedua dari konflik ini tidak saja bersamaan terjadinya dengan perjuangan untuk kemerdekaan nasionalnya tetapi bahkan terus terjadi setelah kemerdekaan penuh tercapai.

Konflik-konflik dalam negeri seperti itu, apakah disebabkan oleh gerakan-gerakan separatisme atau oleh jenis-jenis pemberontakan dan subversi lainnya, atau oleh pembagian yang dipaksakan atas suatu bangsa, merupakan ancaman serius terhadap proses pembangunan bangsa (*nation-building*), penggalangan persatuan nasional, dan pemantapan identitas nasional. Dalam beberapa hal, pergolakan-pergolakan di dalam negeri telah sering kali mengancam perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan penuh dan upaya-upaya konsolidasi bangsa ke arah kehidupan bernegara, dan karena itu terhadap eksistensi negara itu sendiri. Dengan demikian pergolakan di dalam negeri juga merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan nasional. Contoh nyata dari kasus ini adalah Vietnam, yang perjuangan ke arah persatuan nasionalnya merupakan bagian yang terpadu dari perjuangan revolusioner demi kemerdekaan nasional.

Dimensi konflik yang ketiga yang melanda Kawasan Asia Tenggara adalah persengketaan intra-regional, yaitu persengketaan yang terjadi antara satu negara dan negara lainnya. Orang akan segera teringat akan konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia sekitar dua dasawarsa yang lalu yang menyangkut pembentukan Federasi Malaysia. Berkaitan dengan itu, meskipun kurang intensitasnya, walaupun berlangsung lebih lama, adalah persengketaan teritorial antara Malaysia dan Pilipina atas Sabah, yang juga dipertajam oleh pembentukan Malaysia. Sengketa regional lainnya adalah yang terjadi antara Vietnam dan Kampuchea. Di samping itu, masih dapat disebut sejumlah potensi konflik intra-regional lainnya baik di kalangan ASEAN sendiri maupun dalam Kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

Dimensi konflik yang terakhir yang dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara adalah keterlibatan kekuatan-kekuatan luar, khususnya negara-negara besar. Negara-negara besar itu mempunyai kepentingan-kepentingan yang sudah sejak lama ada dan masih terus memainkan suatu peranan di kawasan ini, apakah peranan itu diminta atau tidak. Beberapa di antara negara-negara besar itu merupakan lawan langsung terhadap perjuangan revolusioner untuk kemerdekaan nasional, seperti Perancis dan kemudian Amerika Serikat, dalam usaha mereka yang tidak berhasil untuk menggagalkan perjuangan berat dan panjang Vietnam untuk mencapai kemerdekaan dan persatuan nasional.

Namun berakhirnya konflik-konflik kolonial bukan berarti berakhirnya keterlibatan mereka di kawasan ini. Tidak pula itu berarti berakhirnya kepentingan-kepentingan mereka, beberapa di antaranya memang sah sedangkan lainnya dapat diragukan keabsahannya. Dapat dipastikan bahwa Asia Tenggara terlalu penting, menurut pertimbangan-pertimbangan strategis, politik, dan ekonomi, untuk ditinggalkan sama sekali oleh negara-negara besar. Di mana kepentingan-kepentingan negara-negara besar, pada suatu titik, bertemu dengan kepentingan-kepentingan negara-negara dalam kawasan, kehadiran dan keterlibatan mereka di dalam kawasan seperti yang tercermin dalam hubungan-hubungan mereka dengan yang disebutkan kemudian dalam bidang-bidang seperti perdagangan, pendidikan, dan alih teknologi, bisa jadi bersifat saling menguntungkan.

Namun sayangnya tidak semua kepentingan-kepentingan negara-negara besar itu selalu sejajar dengan kepentingan-kepentingan negara-negara dalam kawasan. Beberapa di antara kepentingan mereka berbeda atau bahkan bertentangan sama sekali dengan kepentingan-kepentingan nasional negara-negara Asia Tenggara. Secara khusus, mereka mempunyai kepentingan-kepentingan strategis global mereka sendiri, dalam konteks antagonisme Timur-Barat atau hubungan-hubungan permusuhan Perang Dingin yang telah berkembang, kendati masa-masa *detente* yang pendek, sejak Perang Dunia II yang lalu. Dan dalam upaya-upaya mereka untuk memenuhi kepentingan-kepentingan strategisnya, mereka cenderung untuk memasukkan Kawasan Asia Tenggara ke dalam kalkulasi strategi globalnya. Dengan demikian mereka telah menjadikan kawasan ini sebagai suatu arena persaingan negara-negara besar untuk mendapatkan sekutu, pangkalan militer, dan daerah pengaruh.

Lebih buruk lagi, beberapa negara di dalam kawasan ini pada masa lalu telah secara keliru percaya bahwa kepentingan nasional mereka yang vital dalam memelihara perdamaian dan stabilitas demi kedaulatan, kemerdekaan dan integritasnya, adalah identik dengan kepentingan-kepentingan strategis

global dari negara-negara besar tertentu. Ini mengakibatkan adanya persekutuan-persekutuan pertahanan dan pangkalan-pangkalan militer di kawasan yang berlangsung hingga kini. Apakah pemanfaatan Kawasan Asia Tenggara oleh negara-negara besar itu untuk memenuhi kepentingan strategis global mereka sebagian telah dipakai sebagai dalih bagi maksud-maksud imperialistis mereka atau tidak, kenyataannya adalah bahwa hal itu telah memperbesar kemungkinan Asia Tenggara terlibat ke dalam kemungkinan persaingan atau konfrontasi antar negara-negara besar.

Sebenarnya, bahkan apabila persekutuan dengan suatu negara besar atau kesediaan menerima adanya pangkalan militer asing oleh beberapa negara di Asia Tenggara tidak dilandasi oleh apa yang dilihat sebagai persamaan kepentingan dengan negara besar yang terlibat, adanya konflik-konflik di dalam negeri dan intra-regional sebenarnya mendorong negara-negara tersebut, karena menyadari kelemahan-kelemahan dan kerawanannya sendiri, untuk bersekutu dengan suatu negara yang kuat dalam upaya mereka untuk memperoleh keamanan. Dengan demikian baik konflik-konflik di dalam negeri maupun intra-regional pada dasarnya berfungsi sebagai wahana bagi keterlibatan negara besar. Dengan perkataan lain, konflik-konflik itu telah memberikan kesempatan bagi negara-negara besar untuk melakukan campur tangan. Demikianlah halnya dengan intervensi Amerika Serikat di Vietnam, sekedar mengambil contoh yang paling menonjol dari campur tangan luar pada tingkat yang tak tertandingi dalam sejarah manusia, dan campur tangan Cina (RRC) dalam masalah-masalah dalam negeri Indonesia pada pertengahan dasawarsa 1960-an.

II

Jelaslah, bahwa sekalipun kemerdekaan sepenuhnya telah dicapai oleh negara-negara Asia Tenggara, pengalaman konflik-konflik yang berkesinambungan dari berbagai dimensi yang berbeda itu telah mengakibatkan sesedikitnya kesempatan untuk mencurahkan sumber daya mereka sepenuhnya demi pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan, yaitu hal-hal yang sebenarnya menduduki prioritas utama dalam mengejar aspirasi nasional mereka, setelah kemerdekaan tercapai. Demi terwujudnya aspirasi-aspirasi tersebut mereka membutuhkan perdamaian dan stabilitas. Inilah persyaratan-persyaratan pokok yang diperlukan untuk itu.

Usaha-usaha telah dilakukan oleh berbagai negara Asia Tenggara dalam upaya mereka untuk memperoleh keamanan, perdamaian, dan stabilitas. Sebagaimana disebutkan di atas, ada negara-negara yang memilih bersekutu dengan suatu negara besar, bahkan dengan memberikan pangkalan militer ke

pada negara besar di wilayahnya. Persekutuan dengan negara besar dapat berupa perjanjian bilateral atau multilateral. Kendati demikian, pengalaman menunjukkan bahwa sementara di satu pihak bentuk perdamaian, keamanan, dan stabilitas yang dikejanya tidak tercapai, di lain pihak, harga yang harus dibayar untuk persekutuan semacam itu adalah tinggi dan akibat-akibatnya sebagian besar adalah negatif.

Karena itu aliansi dengan suatu negara besar tidak selalu berakibat menurunnya ancaman subversi dan infiltrasi. Sebaliknya, persekutuan sering kali justru meningkatkan subversi dan infiltrasi, dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan timbulnya keresahan dan ketidakstabilan. Dan apabila gejala semacam itu mendorong terciptanya suatu keadaan konflik di dalam negeri, persekutuan dengan suatu negara besar akan mengundang intervensi dari luar.

Lagi pula, persekutuan dengan suatu negara besar mengandung arti adanya ketergantungan yang berlebihan kepada negara besar tersebut, yang kredibilitasnya mungkin ternyata sukar diandalkan dalam hal terjadinya suatu krisis. Terlebih-lebih, persekutuan mengandung makna berpihak kepada suatu negara besar yang karena pengaruhnya yang besar yang diakibatkannya cenderung mengundang reaksi dari negara besar lainnya, yang bisa jadi beranggapan bahwa hal itu merupakan suatu ancaman bagi keamanannya. Kemudian negara itu cenderung untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memulihkan ketidakseimbangan yang terjadi. Sebagai akibatnya lebih lanjut, hal ini akan menjadi ancaman terhadap negara yang lebih lemah dan tergantung, yang upayanya untuk mencapai keamanan terbentur pada suatu lingkaran setan dan karena itu persepsinya mengenai ancaman justru menjadi nyata.

Persekutuan dengan dan ketergantungan pada kekuatan suatu negara besar bukannya berarti menyingkirkan ancaman subversi dan infiltrasi, dan karena itu pula bukan berarti mengurangi keresahan, ketidakstabilan, dan konflik-konflik di dalam negeri, tetapi justru karena keterlibatan dari suatu negara besar dalam membantu penduduknya, cenderung meningkatkan ancaman-ancaman seperti itu. Dan bukannya mengatasi konflik-konflik intra-regional, suatu sistem persekutuan justru telah melibatkan negara yang tergantung ke dalam konflik-konflik semacam itu, seperti terbukti oleh terlibatnya beberapa negara Asia Tenggara dalam intervensi Amerika Serikat di Vietnam. Singkat kata, sistem persekutuan ternyata tidak menguntungkan negara yang tergantung sejauh hal itu menyangkut upaya-upayanya untuk menjamin keamanannya. Sistem demikian justru menghasilkan yang sebaliknya.

Hal yang sama tampaknya juga akan berlaku pada sistem persekutuan lainnya, yaitu yang disebut Sistem Keamanan Kolektif Asia, jika terwujudkan, sebab seperti halnya sistem-sistem persekutuan yang disebutkan terdahulu, ia kelihatan pada dasarnya ditujukan untuk membendung kepentingan-kepentingan yang sah dari negara besar lainnya. Betapapun, gagasan tersebut masih samar-samar sejauh yang mengenai bagaimana sistem itu akan diwujudkan, strukturnya, bentuknya, dan yang terpenting tujuan-tujuannya.

Negara-negara lainnya di Asia Tenggara telah memilih suatu sikap non-blok untuk menghindarkan diri dari keterlibatan dalam kemungkinan konflik negara-negara besar. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa non-blok adalah penting dan bermanfaat serta mampu mengurangi kemungkinan para pengikutnya terlibat secara langsung dalam suatu konflik seperti itu, non-blok tidak terlalu dapat diandalkan untuk menghindari konflik-konflik di dalam negeri dan intra-regional. Dan bahkan tanpa adanya suatu sistem persekutuan sekalipun, konflik seperti itu akan tetap memungkinkan campur tangan negara luar dan negara besar untuk membantu pihak tertentu yang terlibat karena alasan-alasan kalkulasi strategi globalnya. Halnya akan demikian terutama jika non-blok formal dalam prakteknya disertai oleh persekutuan yang kurang eksplisit sifatnya dalam bidang perangkat militer dan latihan-latihan yang diberikan oleh suatu negara besar.

III

Demikianlah, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara tidak banyak menunjukkan hasilnya dalam usaha mereka menjamin perdamaian, keamanan, dan stabilitas, bila upaya-upaya tersebut berbentuk upaya-upaya yang sedikit kaitannya dengan sumber-sumber ancaman terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas mereka. Sumber-sumber ancaman itu, seperti yang telah diuraikan di atas, merupakan perpaduan antara konflik-konflik di dalam negeri, intra-regional, dan campur tangan dari luar. Baik aliansi dengan suatu negara besar maupun sikap non-blok itu sendiri tidak memungkinkan negara-negara Asia Tenggara menghadapi secara efektif macam-macam jenis ancaman terhadap stabilitas mereka tersebut. Kebijakan-kebijaksanaan tersebut tidak dapat mencegah konflik-konflik di dalam negeri atau intra-regional, dan juga terhadap campur tangan dari luar yang disebabkan oleh konflik-konflik tersebut.

Dengan latar belakang demikian itulah maka orang dapat melihat pentingnya kemunculan ASEAN. Pertimbangan-pertimbangan mengenai keamanan bagi para anggotanya demikian menonjol sebagai motivasi dari pembentukan perserikatan ini. Dalam Deklarasi Bangkok secara jelas dinyatakan bahwa

kelima negara pendirinya "bertekad untuk meneguhkan stabilitas dan keamanan mereka dari campur tangan luar dalam segala bentuk atau manifestasinya demi memelihara identitas nasional mereka masing-masing selaras dengan cita-cita dan aspirasinya." Dengan bersatu ke dalam kerjasama regional ASEAN dan dengan berusaha untuk mencegah, membendung, dan dengan cara-cara damai menyelesaikan konflik-konflik di antara mereka sendiri, yaitu konflik-konflik intra-regional, enam negara anggota ASEAN berusaha untuk menghindari kemungkinan campur tangan dari luar yang mungkin mengancam keamanan mereka.

Sudah tentu, seperti telah dikemukakan sebelumnya, campur tangan dari luar tidak hanya didorong oleh konflik-konflik intra-regional tetapi juga oleh konflik-konflik di dalam negeri. Tetapi per definisi, konflik-konflik dan ketidakstabilan di dalam negeri berada dalam wewenang dan merupakan masalah-masalah nasional dan karena itu merupakan tanggung jawab masing-masing negara anggota. Jadi, dengan menyatakan bahwa "stabilitas dari masing-masing negara anggota dan stabilitas kawasan ASEAN merupakan sumbangan yang penting bagi perdamaian dan keamanan internasional," Deklarasi Kerukunan ASEAN yang ditandatangani di Bali pada bulan Pebruari 1976 lebih lanjut menyatakan bahwa "Setiap negara anggota bertekad untuk melenyapkan ancaman-ancaman yang disebabkan oleh subversi terhadap stabilitasnya, dan dengan itu akan memperkuat ketahanan nasional dan ASEAN."

Bagaimanapun, penolakan terhadap campur tangan luar menjadi pokok perhatian negara-negara anggota ASEAN. Gagasan demikian itu diberikan perwujudan yang lebih nyata dalam Deklarasi Kuala Lumpur 1971, yang ditandatangani oleh para menteri luar negeri ASEAN. Dengan mengulangi komitmen mereka pada prinsip yang sama seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Bangkok dan "menyadari hak dari setiap negara, besar atau kecil, untuk menjalani eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan luar dalam masalah-masalah di dalam negerinya karena campur tangan itu akan merugikan kebebasannya, kemerdekaannya, dan integritasnya," Deklarasi Kuala Lumpur menyatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN "bertekad untuk melakukan upaya-upaya permulaan yang diperlukan untuk diperolehnya suatu pengakuan bagi, dan rasa hormat terhadap Asia Tenggara sebagai suatu zona damai, bebas, dan netral, bebas dari setiap bentuk atau jenis campur tangan dari negara-negara luar." Prinsip penolakan terhadap campur tangan luar dan gagasan Asia Tenggara sebagai kawasan damai, bebas dan netral (ZOPFAN) diteguhkan kembali dalam Deklarasi Kerukunan ASEAN dan dalam Persetujuan Persahabatan dan Kerjasama, yang dua-duanya ditandatangani dalam Pertemuan Puncak Bali tahun 1976.

Keprihatinan ASEAN terhadap campur tangan luar mudah dipahami mengingat latar belakang pengalaman kawasan pada waktu sebelum dan pada saat ASEAN dibentuk pada tahun 1967. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang disebutkan di atas baru saja berakhir yang telah mengundang meningkatnya kehadiran dan peranan negara-negara besar di kawasan, karena itu memberikan kesempatan-kesempatan bagi intervensi negara besar baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat yang sama Perang Vietnam masih sedang berkecamuk. Kendati berada di luar wilayah ASEAN, ia merupakan suatu konflik lain di Asia Tenggara yang telah mengundang intervensi luar, secara langsung bagi Amerika Serikat, dan secara tidak langsung bagi Uni Soviet dan Cina.

Mengingat antagonisme yang masih terus berlangsung di antara negara-negara besar dan dekatnya letak negara anggota ASEAN dengan Vietnam, tidaklah sulit untuk memahami keprihatinan ASEAN terhadap terus berlangsungnya keterlibatan dan intervensi negara-negara besar di dalam konflik tersebut. Sementara itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang mungkin dilihat sebagai kekosongan yang diakibatkan oleh keinginan Inggris untuk menarik kekuatannya dari sebelah timur Suez dan akan ditariknya pasukan Amerika Serikat dari Asia Tenggara yang didahului oleh apa yang disebut sebagai Doktrin Nixon. Suatu kekosongan yang dibayangkan demikian itu bisa menggoda negara besar lainnya untuk mengisinya.

Bagaimanapun juga, gagasan mengenai ZOPFAN dimaksudkan untuk menjadi suatu kerangka bagi perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Ia akan merupakan suatu pengaturan yang, sementara tetap mengakui kepentingan-kepentingan sah negara-negara besar dan tetap memungkinkan keterlibatan mereka secara wajar di kawasan, bertujuan untuk mengurangi atau membatasi tingkat keterlibatan mereka.

Memang, bagaimana gagasan tersebut akan direalisasikan masih harus dipelajari lebih lanjut. Saya tidak berminat melibatkan diri dalam perdebatan semantik mengenai istilah-istilah seperti netralitas (jika disetujui), netralisme (jika tidak disetujui), netral atau netralis (dalam konteks suatu peperangan), non-blok (pada masa perang dingin), dan netralisasi (dipaksakan oleh pihak lain?). Cukuplah kiranya dikatakan untuk maksud diskusi ini bahwa ZOPFAN dimaksudkan untuk mencegah Asia Tenggara menjadi suatu arena konflik internasional.

Untuk maksud tersebut, menurut pendapat saya, ZOPFAN harus memiliki dua segi pokok. Satu adalah netralitas atau netralisasi intern, yaitu bahwa negara-negara anggotanya harus menetralkan satu sama lain, yang berarti bahwa mereka mampu menghindari konflik-konflik di dalam negeri dan intra-

regional dan menyelesaikan konflik-konflik itu melalui cara-cara damai. Kedua adalah netralisasi dari negara-negara luar. Mereka itu harus mampu menetralsir diri mereka sendiri. Tidak satu pun di antara mereka, demi kepentingan mereka sendiri, hendaknya mencoba untuk menduduki posisi dominan atau berpengaruh yang terlalu besar. Dua aspek ZOPFAN ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti netralitas dalam hubungan dengan siapa. Dengan demikian jelaslah bahwa perwujudan dari ZOPFAN menghendaki diterimanya gagasan dan prinsip-prinsip itu tidak saja oleh semua negara di dalam kawasan, tetapi juga oleh negara-negara luar, khususnya negara-negara besar.

Tentu saja orang kemudian akan mempersiapkan bahwa pangkalan militer asing dan persekutuan dengan negara besar di Asia Tenggara, termasuk beberapa negara anggota ASEAN, adalah bertentangan dengan gagasan ZOPFAN. Tetapi negara-negara yang terlibat dalam hal itu perlu diberi waktu untuk melakukan reorientasi kebijaksanaan politik luar negerinya, seperti halnya negara-negara luar perlu melakukan reorientasi kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka untuk menerima gagasan ZOPFAN. Lagi pula, semua negara yang terlibat, di dalam maupun di luar kawasan, perlu meyakini keuntungan-keuntungan dan kebaikan ZOPFAN sebagai suatu alternatif yang dapat ditempuh bagi konflik-konflik. Apa yang dibutuhkan adalah perubahan yang berjalan secara perlahan-lahan, bukannya suatu perubahan yang drastis.

Sebagai penutup, kiranya perlu saya singgung situasi konflik yang kini berlangsung di bagian Asia Tenggara ini, yaitu di Indocina, khususnya dalam kaitan dengan masalah Kampuchea. Tidak perlu disangsikan bahwa apa yang telah terjadi sejak akhir tahun 1978 di salah satu bagian Asia Tenggara ini telah mengancam gagasan ZOPFAN. Apa pun kepentingan absah Vietnam, dan saya yakin bahwa ia mempunyai kepentingan-kepentingan keamanan yang sah, apa yang telah diperbuatnya itu telah mengundang meningkatnya kehadiran dan karena itu campur tangan oleh negara-negara luar, khususnya negara-negara besar. Tindakannya itu juga mengandung bahaya mengundang masuknya suatu konflik antara negara-negara besar ke dalam Kawasan Asia Tenggara.

Karena itu, apa pun penyelesaian politik yang hendak diusahakan harus menjamin tidak saja bahwa penyelesaian itu memperhatikan kepentingan dari semua pihak yang terlibat, khususnya rakyat Kampuchea, tetapi juga bahwa kemungkinan bagi adanya campur tangan dari luar lagi di kawasan ini dikurangi, bila tidak dapat dihilangkan sama sekali. Apabila tidak, masalah Kampuchea akan mengingkari sejumlah besar negara tidak saja di Asia Tenggara, tetapi juga di bagian-bagian lain di dunia ini, khususnya negara-negara kecil dan lemah, jaminan bahwa mereka tidak akan menjadi korban dari suatu

campur tangan, dengan alasan apa pun, oleh tetangga-tetangganya yang lebih besar dan lebih kuat. Masalahnya sekarang adalah kompromi seperti apa yang dapat dicapai, yang merupakan hakikat dari setiap penyelesaian politik, yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dalam masalah Kam-puchea itu, dengan harga yang mereka bersedia memikul.

Bilamana itu dapat dicapai, gagasan tentang ZOPFAN mungkin masih mempunyai masa depan. Ia akan merupakan kerangka bagi perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Itulah strategi jangka panjang negara-negara anggota ASEAN. Ia merupakan suatu strategi bagi keamanan dan stabilitas yang sangat mereka butuhkan demi perkembangan ke arah kemajuan dan kemakmuran. Ia merupakan suatu strategi untuk perdamaian, bukannya untuk peperangan, dan bukan pula melalui peperangan.

Prospek Perdamaian dan Stabilitas di Asia Tenggara dan Penyelesaian Konflik di Kampuchea*

Jusuf WANANDI

PANDANGAN-PANDANGAN YANG BERBEDA MENGENAI KONFLIK DI KAMPUCHEA

Ada dua pandangan mengenai saling hubungan (kaitan) antara perdamaian di -- dan stabilitas -- Kawasan Asia Tenggara dan penyelesaian konflik di Kampuchea.

Pandangan pertama, seperti yang dianut oleh negara-negara ASEAN, menganggap konflik di Kampuchea sebagai rintangan bagi terselenggaranya suatu Asia Tenggara yang damai. Dengan perkataan lain, perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara hanya akan dapat diwujudkan apabila rintangan utamanya yang ada dewasa ini -- yaitu konflik Kampuchea -- dapat diatasi dan diselesaikan secara politik.

Pandangan demikian ini telah dianut oleh ASEAN berhubung sebab-musabab konflik tersebut telah diperbesar oleh pelanggaran terhadap dua prinsip, yaitu:

- a. Intervensi dan pendudukan militer telah dipergunakan sebagai alat untuk menyelesaikan suatu konflik di antara negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, dan menciptakan suatu preseden berbahaya untuk masa depan;
- b. Hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri sebagai cerminan dari kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara telah diabaikan dan oleh karena itu merupakan suatu sumber permanen ketidakstabilan di Kawasan Asia Tenggara.

*Makalah yang disampaikan pada Seminar Indonesia-Vietnam di Hanoi, 25-26 Pebruari 1984. Diterjemahkan oleh A.R. SUTOPO dan Endi RUKMO.

Selain pelanggaran terhadap dua prinsip tersebut, konflik di Kampuchea merintangi upaya-upaya dari negara-negara ASEAN untuk mengembangkan suatu tertib (orde) regional bagi Asia Tenggara berdasarkan pada gagasan ZOPFAN, yaitu Kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan damai, bebas dan netral. Sebabnya adalah karena ada sementara negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang cenderung mencari alternatif-alternatif lain dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara, yaitu dengan mengundang kekuatan-kekuatan luar ke dalam kawasan sendiri.

Hal ini bukan berarti bahwa gagasan mengenai ZOPFAN telah kehilangan maknanya. Asumsi-asumsi untuk terselenggaranya gagasan itu masih tetap sama dan berlaku seperti pada saat gagasan itu dicetuskan, yaitu bahwa ancaman utama terhadap stabilitas di negara-negara ASEAN datang dari dalam sendiri. Oleh karena itu pembangunan nasional merupakan tuntutan yang urgen dan harus senantiasa dilaksanakan. Suatu kehidupan lingkungan kawasan yang didasarkan pada ZOPFAN dipandang akan turut membantu upaya-upaya negara-negara ASEAN -- dan juga negara-negara lainnya di kawasan -- untuk secara lebih baik menangani dan mengatasi tantangan-tantangan untuk memperkuat keamanan dan kesejahteraan mereka. Pada gilirannya, stabilitas nasional yang lebih besar juga akan meningkatkan ketahanan dan stabilitas regional.

Gagasan mengenai ZOPFAN telah terbukti merupakan sesuatu yang berharga dalam membantu negara-negara ASEAN mengelola hubungan-hubungan yang stabil di antara mereka dengan cara mengatasi dan mencegah konflik-konflik di antara negara-negara ASEAN yang dapat mengganggu stabilitas Kawasan Asia Tenggara. Gagasan itu juga dimaksudkan sebagai suatu wahana untuk mengatur hubungan-hubungan yang positif di antara negara-negara ASEAN dan negara-negara Indocina. Meskipun demikian, konflik di Kampuchea telah merintangi usaha-usaha pencapaiannya oleh karena terjadi perbedaan mengenai penilaian atas konflik tersebut maupun cara-cara dan sarana-sarana untuk mengatasinya.

Masih ada hal lainnya yang merintangi terwujudnya gagasan ZOPFAN yang disebabkan oleh konflik di Indocina, yaitu yang berkenaan dengan kemampuan negara-negara di Asia Tenggara untuk membangun suatu hubungan-hubungan yang "berimbang" dengan negara-negara besar. Gagasan ASEAN ini didasarkan pada kemampuan negara-negara di kawasan dalam mengelola persoalan-persoalan mereka sendiri dan hubungan-hubungan di antara mereka, sedemikian sehingga tercipta suatu lingkungan yang stabil, di mana tekanan-tekanan dari negara-negara luar dapat dinetralisir. Ini bukan berarti bahwa negara-negara besar tidak dapat hadir di kawasan ini, harapan-harapan demikian itu tidak realistis dan tidak diinginkan menurut pandangan-

pandangan kawasan sendiri. Akan tetapi, negara-negara dalam kawasan sendiri dapat secara bersama-sama mencegah dominasi dari salah satu negara besar. Jadi, dalam gagasan ZOPFAN termaktub pikiran bahwa aturan-aturan permainan ditentukan oleh negara-negara Asia Tenggara sendiri dan di dalamnya hubungan-hubungan dengan negara-negara besar terkelola secara berimbang.

Konflik Kampuchea, seperti telah dinyatakan di atas, telah meningkatkan kecenderungan-kecenderungan di antara beberapa negara Asia Tenggara untuk mencari dukungan salah satu negara-negara besar. Bahaya demikian inilah yang telah memperteguh tekad ASEAN untuk menyelesaikan konflik tersebut secepatnya, sebelum momentum bagi terselenggaranya ZOPFAN hilang. Adalah juga dalam semangat ini bahwa negara-negara ASEAN mengharapkan kompromi-kompromi dari pihak Vietnam, termasuk yang mengenai pilihan-pilihan untuk memulihkan dua prinsip yang telah dilanggar.

Pandangan kedua, seperti yang dinyatakan oleh Vietnam, tidak menganggap konflik di Kampuchea sebagai suatu rintangan terhadap perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Masalah Kampuchea dilihat sebagai suatu masalah intern sementara intervensi Vietnam dimaksudkan untuk membantu rakyat Kampuchea dalam perjuangan mereka melawan rezim Pol Pot atas permintaan rakyat dan Pemerintah Kampuchea. Dan lagi, suatu Kampuchea yang mengizinkan Cina mengancam keamanan Vietnam dari wilayah-wilayah Kampuchea tidak dapat diterima.

Intervensi Vietnam di Kampuchea, seperti dinyatakan lebih lanjut, harus dilihat sebagai suatu tindakan yang positif untuk mendukung stabilitas Asia Tenggara, karena hal ini juga dimaksudkan untuk membatasi kemampuan Cina untuk melakukan intervensi di Kawasan Asia Tenggara. Di samping itu, Kampuchea di bawah Pol Pot merupakan suatu sumber ketidakstabilan kawasan oleh karena ia secara langsung menimbulkan masalah terhadap negara tetangganya, yaitu Vietnam dan Muangthai.

Kedua pandangan tersebut di atas bertentangan satu dengan lainnya secara diametris dan tidak mudah untuk dipertemukan kecuali kalau ada kemauan politik dari dua belah pihak untuk mencapai kompromi-kompromi. Pihak yang satu beranggapan bahwa intervensi Vietnam adalah suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh negara-negara Dunia Ketiga dan Non-Blok dan oleh karena itu tidak dapat ditolerir. Pihak lainnya berpendapat bahwa intervensi itu dapat dibenarkan oleh karena dilakukan atas permintaan rakyat dan Pemerintah Kampuchea dan demi melindungi keamanan Vietnam sendiri.

Negara-negara ASEAN -- sejak permulaan -- berpendapat bahwa suatu kompromi perlu dicapai demi stabilitas kawasan dan demi Vietnam sendiri. Sebab, suatu konflik yang berlarut-larut hanya akan membebani Vietnam dengan keharusan untuk mempertahankan kekuatan militer yang besar, baik untuk menghadapi ancaman Cina maupun untuk mendukung kehadirannya di Kampuchea dengan mengorbankan sumber-sumber dananya untuk pembangunan nasional. Isolasi politik dari dan hubungan-hubungan ekonomi yang minimal dengan masyarakat internasional juga merugikan masa depan Vietnam.

Thesis Cina, yang mendasari kepentingannya untuk terus melaksanakan tekanan-tekanannya terhadap Vietnam, adalah bahwa pendudukan Vietnam atas Kampuchea akan terus melemahkan ekonomi Vietnam dan akan mengakibatkan Vietnam semata-mata tergantung kepada Uni Soviet. Pada gilirannya, cepat atau lambat, rakyat Vietnam sendiri akan bangkit melawan para pemimpin mereka. Bila demikian halnya, intervensi oleh negara-negara besar di Asia Tenggara tidak mudah dihindarkan, dan karena itu akan mengakibatkan gagasan ZOPFAN mustahil untuk diwujudkan.

Adalah bukan menjadi kepentingan dari satu negara pun di Kawasan Asia Tenggara agar Vietnam ditekan dan dipojokkan oleh suatu negara besar. Perjuangan Vietnam yang heroik bagi kemerdekaannya mempunyai nilai tersendiri di Asia Tenggara. .. Sementara aspirasi-aspirasi nasionalisme Vietnam tidak kecil artinya, sebagai tetangga di Asia Tenggara negara-negara ASEAN semuanya merasa prihatin terhadap terlalu tergantungnya Vietnam pada Uni Soviet dan karena itu berminat untuk bekerjasama dengan Vietnam, dengan syarat adanya kesediaan di pihak Vietnam untuk secara bersama-sama mencapai suatu kompromi dalam menyelesaikan konflik di Kampuchea selaras dengan semangat Non-Blok seperti yang tercantum dalam Dasasila Bandung.

PROSPEK SUATU PEMECAHAN KONFLIK KAMPUCHEA

Himbauan ASEAN bulan September 1983 pada dasarnya mengusulkan penarikan mundur secara bertahap pasukan Vietnam dari Kampuchea di bawah pengawasan para peninjau internasional yang pada waktu yang sama akan menjamin suatu gencatan senjata. Kemudian, suatu pemilihan umum dapat dilakukan untuk memungkinkan rakyat Kampuchea menentukan sistem politik mereka di masa mendatang. Akhirnya, hal itu akan meminta usaha-usaha internasional dalam membantu pembangunan ekonomi Kampuchea secara besar-besaran.

Usul ini mungkin belum menyentuh masalah keamanan vital Vietnam secara eksplisit, yaitu ancaman Cina dari sayap Barat -- dengan bantuan Pol

Pot, dan karena itu mungkin tidak ditanggapi oleh Vietnam. Tetapi, dasar untuk mengadakan perundingan yang lebih konstruktif antara ASEAN dan Vietnam dalam kenyataannya telah ada. Sebagai contoh, perundingan-perundingan yang konkrit dapat dilakukan mengenai langkah-langkah berikut ini guna mencari suatu penyelesaian konflik Kampuchea:

- a. Penarikan mundur secara bertahap pasukan Vietnam dari Kampuchea, yang pada pokoknya telah diputuskan oleh pihak Vietnam sendiri. Sehubungan dengan itu, cara-cara untuk menghindarkan kembalinya Khmer Merah karena adanya kekosongan yang diakibatkannya, dapat dicari; hal yang sama, cara-cara juga dapat diusahakan untuk mengamankan suatu gencatan senjata di wilayah-wilayah yang telah ditinggalkan oleh pasukan Vietnam itu; pengawasan dan pembangunan di wilayah-wilayah itu dapat pula dilaksanakan, demikian pula suatu pemilihan umum;
- b. Pelaksanaan penentuan nasib sendiri rakyat Kampuchea sudah pasti dapat diterima Vietnam sudah barang tentu, harus ada cara-cara dengan melibatkan semua kekuatan di Kampuchea -- kecuali Khmer Merah -- yang dapat dipercaya secara internasional;
- c. Suatu rekonsiliasi nasional di Kampuchea adalah satu hal yang paling penting, dan suatu lingkungan yang sesuai perlu diciptakan agar semua fraksi, kecuali Khmer Merah, dapat dilibatkan dan dapat menjadi suatu struktur yang menjamin pembangunan negara itu, bila perlu dengan bantuan internasional.

Tidak ada alasan mengapa Vietnam harus menolak berdialog mengenai masalah-masalah ini dengan negara-negara ASEAN. Juga tidak ada alasan bagi Vietnam untuk berpendapat bahwa tidak perlu berunding mengenai Kampuchea karena tidak lagi ada masalah. Jika memang langkah-langkah di atas itu dapat merupakan suatu mata acara yang bermanfaat bagi perundingan-perundingan antara ASEAN dan Vietnam, dapat dicari forum dan pendekatan-pendekatan yang sesuai. Misalnya, suatu pembicaraan antara Vietnam-Laos dan negara-negara ASEAN sebagai tahap permulaan untuk menuju kepada suatu penyelesaian secara internasional. Pada akhirnya, keterlibatan Cina, Uni Soviet, dan Amerika Serikat, dan bahkan Jepang tidak dapat dihindarkan dalam usaha mencari suatu penyelesaian yang realistis dengan dukungan negara-negara itu, yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam konflik tersebut.

Pandangan Vietnam yang mengatakan bahwa pada dasarnya ada lima pendekatan mengenai masalah Kampuchea tidak harus mengesampingkan satu pendekatan dari lainnya, karena beberapa pendekatan tersebut mungkin berkaitan. Suatu perundingan Vietnam-Laos-ASEAN adalah tahap awal yang sangat mungkin dapat dilaksanakan, dan bahkan fraksi-fraksi Kampuchea tertentu dapat dilibatkan pada tahap berikutnya.

Indonesia secara konsisten telah menerima dan berpartisipasi dalam formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan ASEAN mengenai konflik Kampuchea demi alasan-alasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sikap ASEAN juga memperhatikan kekhawatiran Thailand mengenai keamanannya yang disebabkan oleh adanya intervensi pasukan Vietnam ke Kampuchea. Seharusnya menjadi kepentingan Vietnam untuk mengoreksi kesenjangan kredibilitas terhadap Thailand. Perlu dicatat bahwa dua bulan sebelum intervensi, Perdana Menteri Vietnam, Pham Van Dong telah berkunjung ke negara-negara ASEAN untuk menjelaskan mengenai maksud-maksud damai Vietnam di kawasan ini. Demikian pula, serbuan-serbuan pasukan Vietnam melewati perbatasan Thailand terjadi bertepatan dengan pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Kuala Lumpur, yang sedang membahas pernyataan Menteri Luar Negeri Nguyen Co Thach mengenai maksud-maksud damai Vietnam.

Solidaritas ASEAN merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia dan tidak akan dikorbankan. ASEAN merupakan inisiatif Indonesia dan bertahun-tahun ASEAN telah memberi sumbangan besar bagi kestabilan di kawasan melalui kerjasama yang bermanfaat dan hubungan yang baik di antara anggota-anggotanya. Di dalam kerangka ASEAN, Indonesia ingin mencapai suatu penyelesaian konflik Kampuchea, baik penyelesaian yang memuaskan maupun untuk membuka jalan bagi hubungan yang baik antara negara-negara ASEAN dan Indocina di masa mendatang, berdasarkan cita-cita ZOPFAN. Indonesia yakin bahwa setiap kompromi dari pihak Vietnam akan diimbangi dengan usul-usul baru dari ASEAN.

Hubungan bilateral di antara negara-negara Asia Tenggara, seperti misalnya hubungan antara Indonesia dan Vietnam, sama pentingnya bagi Indonesia. Jadi, hubungan antara kedua negara harus ditingkatkan, misalnya hubungan dagang, kerjasama teknologi, penyelesaian klaim landasan kontinen yang tumpang-tindih dan lain-lain. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam dapat mempunyai implikasi yang lebih luas di Kawasan Asia Tenggara di masa mendatang, mengingat alasan-alasan sejarah dan lainnya. Tetapi hal itu meminta tanggung jawab kedua negara dalam memelihara dan meningkatkan stabilitas kawasan. Hal ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya melalui kerangka tertib regional di Kawasan Asia Tenggara dengan keterlibatan aktif dari semua negara di kawasan. Urgensinya ada dan dengan mudah dapat dilihat jika dilihat perkembangan global yang tidak menguntungkan yang disebabkan oleh ketegangan antara kedua superpower, hubungan yang tegang antara Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina dan sebagainya yang semuanya mengakibatkan ketidakstabilan kawasan. Tantangan ini seharusnya memberi kita suatu motivasi yang kuat untuk meningkatkan ketahanan kita, baik secara nasional maupun regional, karena hanya dengan demikian kita dapat menjadi tuan rumah di kawasan kita sendiri.

Prospek Penyelesaian Masalah-masalah Perdamaian dan Kestabilan di Negara-negara Asia Tenggara*

PHAM BINH

Lebih dari 40 tahun yang lalu, sejak akhir Perang Dunia Kedua, Asia Tenggara merupakan satu-satunya kawasan di dunia yang belum menikmati perdamaian. Peperangan dan krisis telah berlangsung secara bergantian di kawasan ini, termasuk suatu perang di mana jumlah bom dan amunisi yang digunakan adalah bahkan lebih besar daripada jumlah yang digunakan selama Perang Dunia Kedua.

Bagaimana mengakhiri keadaan ini dan bagaimana mengubah Asia Tenggara menjadi zona perdamaian, kestabilan, dan kerjasama telah merupakan perhatian utama negara-negara di kawasan ini dan juga negara-negara yang lain. Tetapi terdapat perbedaan mengenai cara untuk mencapai suatu penyelesaian yang mendatangkan perdamaian dan kestabilan di kawasan ini.

LIMA PEMIKIRAN TENTANG POSISI DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN

Cina ingin meningkatkan konfrontasi antara kedua kelompok negara-negara ASEAN dan Indocina untuk memperlemah kedua-duanya, pertama-tama untuk memperlemah negara-negara Indocina karena mereka merupakan penghalang ekspansi Cina ke Asia Tenggara, sehingga Cina dengan mudah bisa melaksanakan politik hegemonis dan ekspansionisnya di Indocina dan Asia Tenggara dan melanjutkan strategi persekongkolannya dengan Amerika Serikat.

*Terjemahan makalah yang disampaikan pada Seminar Indonesia-Vietnam di Hanoi, 25-26 Pebruari 1984. PHAM BINH adalah Direktur, Vietnam Institute of International Relations. Diterjemahkan oleh Redaksi *Analisa*.

Cina memanfaatkan masalah Kampuchea untuk mengadu-domba negara-negara ASEAN dengan negara-negara Indocina dan menginginkan suatu penyelesaian militer. Cina adalah pendukung utama klik Pol Pot, yang digunakan sebagai alat utamanya. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali kekuasaan Pol Pot di Kampuchea, menjadikan Kampuchea "batu loncatan" bagi ekspansi dan hegemoni Cina di Asia Tenggara. Cina mengumpulkan seluruh kekuatan yang memusuhi negara-negara Indocina untuk menentang pihak terakhir dan mengumpulkan semua yang memusuhi bangkitnya kembali bangsa Kampuchea, di sekitar Pol Pot yang berkedok sebagai pemerintah koalisi tiga pihak yang membantu menutupi belang kekejamannya.

Negara-negara ASEAN menginginkan perdamaian dan kestabilan dan tidak adanya campur tangan asing terhadap masalah-masalah dalam negeri mereka, tetapi beberapa di antara mereka, khususnya Muangthai, mencampuri masalah-masalah dalam negeri negara-negara Indocina, yang ingin membalikkan situasi di Kampuchea untuk menggiringnya ke dalam zona pengaruh mereka, untuk merusak solidaritas ketiga negara Indocina dan untuk melemahkan mereka.

Negara-negara ASEAN menginginkan suatu penyelesaian politik atas Kampuchea, menuntut Vietnam agar menarik pasukannya secara unilateral dari Kampuchea tanpa menuntut Cina untuk mengakhiri ancamannya; walaupun mereka jelas tidak mengakui Pol Pot, mereka memperbolehkan kekuatan-kekuatannya untuk menggunakan wilayah Muangthai sebagai tempat perlindungan dan membantu mendirikan pemerintah koalisi yang pada dasarnya merupakan penyamaran klik Pol Pot.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusinya menuntut Vietnam agar menarik pasukan-pasukannya secara unilateral dari Kampuchea, mendukung klik Pol Pot dan bentuk penyamarannya, tidak menuntut berakhirnya ancaman Cina dan penggunaan wilayah Muangthai menentang ketiga negara Indocina.

Gerakan Non-Blok dalam Resolusi Tingkat Tinggi Ketujuh (New Delhi, Maret 1983) tidak mengakui baik Pol Pot ataupun Republik Rakyat Kampuchea, sementara mencetuskan suatu penyelesaian politik secara menyeluruh bagi Asia Tenggara, menetapkan bahwa semua pasukan asing ditarik dari negara-negara Asia Tenggara, yang menjamin penghormatan penuh terhadap kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah semua negara di kawasan termasuk Kampuchea, mengusulkan negara-negara di kawasan agar melanjutkan dialog dengan maksud untuk memecahkan perbedaan-perbedaan di antara mereka sendiri dan membentuk suatu perdamaian dan kestabilan yang tahan lama di kawasan ini dan juga menghapuskan setiap keterlibatan atau ancaman intervensi negara-negara di luar kawasan.

Negara-negara Indocina memandang masalah perdamaian dan kestabilan penting sekali dan berusaha untuk membangun Asia Tenggara menjadi suatu zona perdamaian, kestabilan dan kerjasama. Pertama-tama, ancaman dan intervensi dari luar harus diakhiri dan kedua kelompok negara-negara Indocina dan ASEAN seharusnya hidup berdampingan secara damai atas dasar hormat-menghormati kemerdekaan dan kedaulatan satu sama lain. Kedua belah pihak sebaiknya merundingkan suatu pemecahan masalah-masalah Asia Tenggara secara menyeluruh, termasuk masalah Kampuchea, dengan semangat persamaan dan saling menghormati, tanpa salah satu pihak memaksakan pandangan-pandangannya kepada yang lain.

Vietnam akan menarik semua tenaga-tenaga sukarelanya dari Kampuchea jika Cina mengakhiri ancamannya, atas penggunaan wilayah Muangthai menentang ketiga negara-negara Indocina dan atas pemanfaatan Pol Pot dan kelompok-kelompok reaksioner Khmer lainnya menentang Republik Rakyat Kampuchea. Pemerintah Republik Rakyat Kampuchea adalah wakil sah dan sejati rakyat Kampuchea yang kebangkitannya kembali tidak dapat diubah-ubah lagi. Klik Pol Pot dan mereka yang bekerjasama dengan mereka semuanya adalah kaum kriminal.

Pemecahan-pemecahan yang dianjurkan Cina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didukung oleh kekuatan-kekuatan militeris, kolonialis, dan imperialis serta kekuatan-kekuatan reaksioner yang telah melakukan agresi terhadap ketiga negara Indocina dimaksudkan untuk mengabdikan kepada kepentingan-kepentingan kekuatan-kekuatan reaksioner dan ekspansionis, militeris, kolonialis, imperialis yang menentang negara-negara Indocina dan berlawanan dengan kepentingan perdamaian di Asia Tenggara. Sebaliknya pemecahan yang diinginkan negara-negara Non-Blok mengabdikan kepada kepentingan perdamaian dan kemerdekaan di Asia Tenggara. Resolusi Non-Blok itu telah diterima oleh kedua kelompok negara di Asia Tenggara. Walaupun mereka semuanya memiliki aspirasi bersama untuk melindungi kestabilan dan perdamaian regional dan kemerdekaan mereka, mereka memiliki perbedaan-perbedaan yang berasal dari perbedaan penilaian situasi Asia Tenggara dan sebab-sebab masalah regional yang sebenarnya.

SEBAB-SEBAB DAN HAKIKAT MASALAH ASIA TENGGARA

Perbedaan yang paling besar dewasa ini di antara negara-negara Asia Tenggara, khususnya antara kedua kelompok negara ASEAN dan Indocina, adalah masalah Kampuchea dan bahaya yang mengancam Asia Tenggara. Jika kita ingin memahami sebab-sebab dan hakikat masalah Kampuchea yang sebenarnya, kita seharusnya tidak memisahkannya dari masalah-masalah Asia

Tenggara lainnya secara menyeluruh. Demikian juga jika kita ingin memahami hakikat masalah-masalah Asia Tenggara, kita sebaiknya tidak memisahkan Asia Tenggara dewasa ini dari dua ribu tahun sejarah, khususnya periode empat puluh tahun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan perkembangan lima tahun terakhir.

Ekspansionisme dan hegemonisme Cina di Asia Tenggara telah ada selama dua ribu tahun. Ini merupakan bentuk yang telah ada untuk jangka waktu terlama dan berlangsung secara terus-menerus dalam sejarah manusia. Cina menjadikan semua negara Asia Tenggara sebagai sasarannya dari abad pertama Sebelum Kristus dan sesudahnya dan sekarang masih menganggap kawasan ini berada dalam wilayah pengaruhnya. Ekspansionisme Cina ke Asia Tenggara terhenti hanya untuk sekitar seratus tahun dalam abad ke-19 ketika Cina sendiri menjadi semi jajahan kekuatan-kekuatan imperialis Barat. Selama abad itu kolonialis-kolonialis Amerika, Perancis, Inggris, Belanda, Spanyol dan Portugal menyerbu dan menguasai negara-negara Asia Tenggara. Mereka diganti Jepang selama Perang Dunia Kedua. Setelah kekalahan Jepang, kekuatan-kekuatan kolonialis Barat kembali dan melancarkan perang-perang agresi terhadap gerakan-gerakan pembebasan Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan kekalahan dan melemahnya kekuatan-kekuatan imperialis Barat, Amerika Serikat segera berusaha menggantikan mereka dan memulai perang agresi yang paling berdarah dalam sejarah. Kekuatan-kekuatan imperialis dan kolonialis Barat hanya menguasai Asia Tenggara untuk jangka waktu pendek, pendudukan selama tiga hingga empat ratus tahun yang dilakukan oleh Portugal, Spanyol, Inggris dan Belanda masing-masing atas Filipina, Timor Timur, Malaya dan Indonesia. Setelah dikalahkan, imperialis-imperialis ini didesak untuk menarik diri dari kawasan dan berusaha kembali dengan cara lain. Tidak seperti mereka, Cina dan Jepang berada di Asia di sebelah kawasan itu dan mereka, sekarang ataupun di masa mendatang, tidak menghentikan ambisi akan ekspansi dan hegemoni mereka di kawasan ini.

Dalam perjuangan ini, kekuatan-kekuatan ekspansionis, kolonialis dan imperialis selalu memusatkan serangan-serangan gencar mereka yang represif terhadap masyarakat tersebut yang memiliki sentimen nasional yang paling kuat untuk memudahkan penguasaan atas seluruh kawasan. Dalam dua ribu tahun terakhir, Cina telah memusatkan agresi dan intervensinya pada Vietnam, Birma dan Indonesia dan menganggap Vietnam sebagai sasaran utama untuk ditaklukkan. Cina menguasai Vietnam selama lebih dari seribu tahun dan menduduki Vietnam sepuluh kali selama beribu-ribu tahun sesudahnya. Seluruh dinasti yang berkuasa di Cina sejak Abad Pertama Sebelum Masehi telah melancarkan perang-perang agresi terhadap Vietnain dan ini terjadi tiga kali di bawah satu dinasti. Selama dua ribu tahun terakhir tidak ada negara

lain di Asia Tenggara yang telah menjadi sasaran pendudukan dan agresi Cina berulang kali seperti Vietnam. Setelah Perang Dunia Kedua, kekuatan-kekuatan kolonialis melancarkan agresi terhadap ketiga negara Indocina dan Indonesia yang merupakan pihak pertama di dunia yang memenangkan kembali kemerdekaan melalui revolusi. Untuk alasan yang sama Peking memusatkan usaha-usahanya menentang Indonesia dan ketiga negara Indocina dengan maksud untuk melanjutkan ekspansi dan hegemoninya di Asia Tenggara. Atas keberhasilan ketiga negara Indocina dan Indonesia, gerakan-gerakan pembebasan nasional di kawasan sungguh-sungguh berkembang dan mendesak kekuatan-kekuatan imperialis untuk memberi kemerdekaan kepada negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sejak 1950 hanya tinggal satu perang agresi yang dilancarkan oleh kolonialis-kolonialis Perancis terhadap Vietnam dan negara-negara lain di Indocina. Menyusul perang itu dan sejak permulaan 1960-an imperialis-imperialis Amerika Serikat melancarkan perang agresi yang paling berdarah dalam sejarah terhadap ketiga negara Indocina.

Kenyataan-kenyataan sejarah telah menunjukkan bahwa sekali Vietnam diduduki, Cina akan menguasai seluruh Semenanjung Indocina, dan oleh karenanya menghancurkan benteng penghalang gelombang ekspansionisnya yang melanda Asia Tenggara. Hanya dengan mengalahkan gerakan-gerakan kemerdekaan Vietnam dan negara-negara Indocina lainnya, kekuatan-kekuatan imperialis dan kolonialis Barat bisa memiliki harapan untuk menumpas gerakan-gerakan pembebasan nasional di kawasan. Oleh karena itu perjuangan kemerdekaan yang dilancarkan oleh Vietnam dan negara-negara Indocina yang lain lebih penting daripada batas-batas ketiga negara dan sangat mempengaruhi seluruh kawasan, jadi mengandung suatu peran internasional yang jelas. Kemenangan Dien Bien Phu, peringatan ke-30 yang kami rayakan tahun ini, memberi sumbangan bagi jatuhnya kolonialisme Perancis di seluruh dunia dan kemenangan Vietnam atas agresor-agresor Amerika Serikat membuka lembaran baru dalam hubungan internasional, masa pasca Vietnam. Untuk alasan inilah, ketiga negara Indocina sering menjadi korban utama kekuatan-kekuatan kolonialis, ekspansionis dan imperialis dari luar kawasan, dan perjuangan mereka bagi kemerdekaan menjadi sangat sukar dan berkepanjangan.

Menghadapi suatu gerakan pembebasan yang kuat dengan pengaruh yang tersebar luas, kekuatan-kekuatan imperialis, kolonialis, ekspansionis dan militaris akan menghadapi kesulitan besar jika mereka tidak dapat memanfaatkan beberapa negara di kawasan yang akan membantu mereka dalam perang agresi. Mereka khususnya memanfaatkan ambisi-ambisi ekspansionis Muangthai terhadap negara-negara tetangga, pertama-tama terhadap Laos dan Kampuchea, dan berusaha melibatkan Muangthai dalam politik agresi mereka, dengan memanfaatkan wilayah Muangthai untuk aksi-aksi menentang tetangga-tetangganya.

Muangthai telah menyerbu setiap negara bertetangga di daratan Asia Tenggara pada suatu waktu atau lainnya dalam sejarah, dari Vietnam hingga Birma, dan pernah menguasai Laos, Kampuchea dan Malaya. Pada saat yang sama ia telah sering bersekongkol dengan kekuatan-kekuatan luar untuk melanjutkan ekspansi dan hegemoninya terhadap tetangga-tetangganya. Feodalis-feodalis Cina berusaha bekerjasama dengan feodalis-feodalis Muangthai dalam penyerbuan mereka terhadap Birma dan Vietnam pada abad ke-18. Muangthai bersekongkol dengan mereka menyerbu Birma pada permulaan abad ke-19 dan dengan Perancis membagi Laos dan Kampuchea pada pertengahan abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Ia mengakui kekuasaan kolonialis Perancis atas Kampuchea, Laos dan Vietnam sebagai balasan atas pengakuan Perancis terhadap aneksasi Muangthai atas bagian dari wilayah Kampuchea dan Laos. Selama Perang Dunia Kedua, Muangthai adalah satu-satunya sekutu Jepang dalam perang melawan Amerika, Inggris dan Perancis di Pasifik dan dalam perang agresinya di Asia Tenggara. Jepang meghadiahkan Muangthai beberapa wilayah yang diambil dari Laos, Kampuchea, Malaysia dan Birma.

Pada tahun 1954, setelah kekalahan Perancis di Indocina, Muangthai dan Pilipina bersekongkol dengan Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Pakistan membentuk blok militer agresif SEATO menentang negara-negara Indocina; Markas Besar SEATO berkedudukan di Bangkok dan sekretaris jenderalanya adalah seorang Muangthai. Selama perang agresi melawan negara-negara Indocina, Amerika Serikat menggunakan pangkalan-pangkalan militer di daratan Muangthai, menempatkan pasukan-pasukan Muangthai di Laos dan Vietnam untuk memerangi rakyat negara-negara ini, dan memperoleh bantuan Muangthai untuk menentang netralitas Kampuchea.

Sejak 1979, Muangthai telah bersekongkol lagi dengan Cina dan reaksioner-reaksioner dari ketiga negara Indocina untuk menentang negara-negara ini. Sejarah tujuh abad berdirinya Muangthai adalah sejarah tujuh abad persekongkolan dengan kekuatan-kekuatan asing melawan semua tetangga-tetangganya di daratan Asia Tenggara, sejarah tujuh abad ekspansi dan hegemoni oleh Muangthai. Inilah satu-satunya negara Asia Tenggara yang memiliki paling banyak masalah sejarah dengan tetangga-tetangganya.

Kekuatan-kekuatan imperialis, kolonialis dan ekspansionis selalu menggunakan politik "membagi dan menguasai" (divide and rule policy) tradisional dalam agresi mereka terhadap negara-negara Asia Tenggara. Pada 1950-an, kolonialis Perancis berusaha memecah-belah negara-negara Indocina dengan menyebarkan kebencian-kebencian nasional, imperialis Amerika Serikat membentuk SEATO dan menarik banyak negara Asia Tenggara ke dalam orbit perangnya terhadap negara-negara Indocina, sehingga menciptakan

permusuhan di antara negara-negara Asia Tenggara; dan sekarang Peking sedang mengadu-domba negara-negara ASEAN menentang negara-negara Indocina.

Meninjau ke belakang, sejarah dua ribu tahun yang lalu Asia Tenggara merupakan sejarah perang-perang agresi, hegemonisme dan dominasi asing. Tetapi empat puluh tahun terakhir telah melihat suatu kecenderungan baru, yang paling mendalam dan radikal, yaitu kekuatan-kekuatan kemerdekaan dan perdamaian, yang telah memperoleh kemenangan-kemenangan selangkah demi selangkah dan telah bertumbuh secara mengagumkan, cukup kuat untuk mencegah kekuatan-kekuatan luar mengganggu kemerdekaan nasional mereka atau merusak perdamaian dan kestabilan di seluruh kawasan.

Pada 1945, Vietnam dan Indonesia memperoleh kembali kemerdekaan, yaitu mulai berakhirnya babak sejarah dua ribu tahun bangsa-bangsa Asia Tenggara yang menjadi sasaran dominasi dan penguasaan asing. Kemenangan ketiga negara Indocina terhadap agresor Amerika Serikat, imperialis yang paling kuat, merupakan petunjuk penting lainnya akan pertumbuhan kekuatan-kekuatan perdamaian dan kemerdekaan secara mengagumkan; dan menghasilkan suatu rangkaian peristiwa koeksistensi damai antara bangsa-bangsa Asia Tenggara. Kecenderungan ini diakui oleh de Gaulle pada permulaan 1966 ketika ia mengusulkan netralisasi Asia Tenggara. Dan juga atas dasar rangkaian peristiwa baru dalam perimbangan kekuatan di kawasan, negara-negara ASEAN mengusulkan pembentukan zona perdamaian, kemerdekaan dan netralitas di Asia Tenggara pada 1971. Sejak 1975, banyak negara ASEAN telah menjalin hubungan diplomatik dengan Laos dan Vietnam. Dengan memanfaatkan penarikan diri Amerika Serikat dari Vietnam dan Muangthai, Cina meningkatkan politik hegemonis dan ekspansionisnya di Asia Tenggara, dengan menggunakan Pol Pot sebagai alat utamanya untuk menentang ketiga negara Indocina dan mengadu-domba ASEAN untuk menentang mereka.

Kemenangan ketiga negara Indocina pada 1979 merupakan suatu kemunduran besar bagi ekspansionisme dan hegemonisme Cina di Indocina dan Asia Tenggara, sementara mengkonsolidasi kecenderungan tersebut ke arah perdamaian, kemerdekaan dan koeksistensi damai di kawasan.

Dengan melihat situasi Asia Tenggara dari perspektif sejarah dan menyeluruh, terdapat lima karakteristik yang menonjol:

1. Bahaya bagi kemerdekaan negara-negara Asia Tenggara dan bagi perdamaian dan kestabilan di kawasan berasal dari kekuatan-kekuatan kolonialis, imperialis, militaris dan hegemonis di luarnya. Masalah-masalah sejarah juga ada di antara negara-negara Asia Tenggara, misalnya antara

Muangthai dan negara-negara Indocina, Birma dan Malaysia; terdapat juga perselisihan-perselisihan antara negara-negara Asia Tenggara atas Laut Timur, dan perbedaan-perbedaan mengenai masalah Kampuchea dan Timor Timur. Namun perbedaan-perbedaan ini sangat kecil dibandingkan dengan pertentangan antara negara-negara Asia Tenggara dan kekuatan-kekuatan imperialis, kolonialis, militeris dan hegemonis dari luar.

2. Ketiga negara Indocina adalah korban-korban agresi, intervensi dan dominasi. Agresor-agresor dan intervensionis-intervensionis selalu secara licik menyalahkàn korban-korban mereka menjadi alat-alat ekspansionis komunis untuk menutup-nutupi agresi mereka sendiri. Tidak ada masyarakat lain di dunia yang telah menjadi sasaran penguasaan asing selama seribu tahun, perang-perang agresi yang berlarut-larut dan pemboman-pemboman yang begitu intensif selain masyarakat Vietnam, Laos dan Kampuchea.
3. Kekuatan-kekuatan kolonialis, imperialis, dan ekspansionis dari luar tidak bisa melancarkan agresi dan intervensi terhadap negara-negara Indocina dan merusak perdamaian dan kestabilan di kawasan ini kalau tidak mendapat dukungan beberapa negara dan menggunakan wilayahnya, seperti Muangthai.
4. Kekuatan-kekuatan imperialis dan ekspansionis selalu menggunakan politik "membagi dan menguasai" (*divide and rule policy*) untuk menciptakan pertentangan di antara negara-negara Asia Tenggara, khususnya antara negara-negara ASEAN dan Indocina.
5. Kekuatan-kekuatan kemerdekaan dan perdamaian di kawasan ini telah berkembang sejak Perang Dunia Kedua dan cukup kuat untuk mengalahkan perang-perang agresi yang paling panjang dan berdarah serta untuk menggagalkan segala kelicikan politik, ekonomi dan militer ketiga kekuatan imperialis yang paling kuat dan kekuatan yang paling reaksioner, yang semuanya menjadi anggota-anggota tetap dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Cina).

Jelas bahwa setelah beribu-ribu tahun bergantung pada dan berada di bawah kekuasaan kekuatan-kekuatan asing, sekarang di Asia Tenggara terdapat cukup kekuatan untuk melindungi perdamaian dan kemerdekaan terhadap setiap agresor. Jatuhnya pemerintahan Nguyen Van Thieu di Vietnam Selatan dan pemerintah klik Pol Pot di Kampuchea telah membuktikan bahwa tidak ada kekuatan besar di dunia yang dapat menyelamatkan pemerintah-pemerintah pengkhianat.

Lebih dari lima tahun terakhir masalah Kampuchea menempati berita-berita pokok. Pada mulanya banyak orang kebingungan, tetapi kenyataan

situasi selama tahun-tahun tersebut telah menghilangkan kesalahpengertian mengenai hakikat masalah.

Untuk menutup-nutupi maksud-maksud ekspansi dan hegemoni terhadap Asia Tenggara, penguasa-penguasa Peking telah menyalahkan Vietnam melakukan agresi terhadap Kampuchea, menjadi sebuah "hegemonis kecil" dan alat "hegemonis raksasa" -- Uni Soviet, melanjutkan ekspansionisme di kawasan dan mengancam keamanan negara-negara ASEAN. Mereka hanya mengulangi siasat-siasat yang dimainkan kaum imperialis sebelumnya. Ketika Perancis menduduki Vietnam ia mengatakan bahwa ia melakukannya untuk menghentikan agresi komunis di kawasan dan bahwa Vietnam adalah alat Uni Soviet dan Cina. Amerika Serikat mendalangi peristiwa Teluk Tonkin dan menyatakan bahwa ia mulai perang di Vietnam untuk mengurangi agresi komunis dan bahwa Vietnam adalah alat Uni Soviet dan Cina.

Kenyataannya setelah kekalahan Amerika pada 1975, Cina juga gagal untuk menaklukkan Vietnam dan Laos dan untuk memanfaatkan mereka sebagai alat bagi strateginya. Maka ia berusaha mempertahankan Kampuchea untuk memecah-belah ketiga negara Indocina, dan memanfaatkannya sebagai batu loncatan ekspansi Cina di Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan ambisi pribadi Pol Pot dan kliknya yang ingin menjadi pemimpin-pemimpin dari revolusi yang paling "radikal" dalam sejarah manusia dan untuk memulihkan wilayah kerajaan Angkor, penguasa-penguasa Peking mencekoki mereka dengan Maoisme dan membantu mereka untuk menerapkan model "revolusi kebudayaan" di Kampuchea. Mereka mendorong klik Pol Pot untuk mempraktekkan suatu pemerintahan yang kejam (*genocidal regime*) di negara tersebut, untuk membangkitkan konflik-konflik dengan negara-negara tetangga dan memutuskan hubungan dengan dunia luar. Dan dengan cara ini mereka mendesak Pol Pot untuk menggantungkan diri sepenuhnya pada dukungan dan bantuan Cina, untuk menjadi alat ekspansionisme dan hegemonisme Cina. Atas anjuran dan dorongan Cina, dari 1975 hingga 1978 klik Pol Pot berulang kali melancarkan provokasi dan pengacauan ke dalam wilayah Vietnam, membantai rakyat Vietnam, dan menolak semua usul Vietnam untuk perundingan damai. Akhir 1977 mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Vietnam, memusatkan 19 dari ke-23 divisinya dalam wilayah perbatasan Vietnam-Kampuchea dan melancarkan pertempuran di sepanjang perbatasan dalam bulan Desember 1978 dengan maksud untuk merampas sebagian besar wilayah, menciptakan ancaman langsung terhadap kota Ho Chi Minh sejalan dengan kerusuhan yang digerakkan di kota itu sendiri.

Sejalan dengan kegiatan-kegiatan klik Pol Pot melawan Vietnam, Cina dari permulaan mulai menciptakan apa yang disebutnya masalah "pengorbanan Cina perantauan" di Vietnam, menghentikan bantuan, menarik ahli-

ahli mereka dan memusatkan sejumlah besar pasukan di perbatasan Sino-Vietnam dan melanjutkan provokasi-provokasi bersenjata.

Pihak Vietnam terus mencari suatu pemecahan melalui perundingan-perundingan damai. Menyusuli serangkaian usul untuk perundingan-perundingan damai, pada 5 Pebruari 1978, Vietnam mengajukan sebuah usul 3 butir bagi penyelesaian damai konflik-konflik antara kedua negara; sementara ia mengusahakan peranan penengah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konperensi Menteri-menteri Luar Negeri Non-Blok yang diselenggarakan di Belgrade dalam bulan Juli 1978 bagi suatu perdamaian antara Vietnam dan Kampuchea.

Semua usaha damai oleh Vietnam tidak memperoleh hasil. Dalam bulan Nopember 1978, Pemerintah Amerika Serikat mempermasalahkan pemusatan pasukan di perbatasan Kampuchea di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi klik Pol Pot secara tegas menolak setiap pembicaraan masalah tersebut oleh Dewan Keamanan. Dalam pada itu kekuatan-kekuatan militer Pol Pot dan Cina membentuk dua sayap yang mengancam secara serius keamanan Vietnam.

Dengan menggunakan hak pertahanannya yang sah, seperti dilakukan Uni Soviet, Amerika Serikat dan Inggris terhadap fasis-fasis Jerman dalam Perang Dunia Kedua, sementara menanggapi Front Persatuan dan Pembebasan Nasional Kampuchea untuk menyelamatkan rakyat Kampuchea dari pembantaian, dalam bulan Januari 1979 Vietnam mengirim tenaga-tenaga sukarelawanannya untuk bergabung dengan rakyat Kampuchea dalam menghancurkan pemerintahan kejam, mengakhiri penguasaan Cina atas Kampuchea, menggagalkan rencana Cina untuk menyerang Vietnam dari kedua sisi dan menghapuskan suatu faktor yang mengganggu perdamaian dan kestabilan di kawasan ini.

Sementara memfitnah Vietnam sebagai melakukan agresi terhadap Kampuchea, Cina berharap bahwa Vietnam akan ditentang oleh rakyat Kampuchea dan akan dipojokkan dan dikalahkan sebagaimana Amerika di Vietnam. Kenyataan-kenyataan sangat berbeda. Rakyat Kampuchea menyambut baik pasukan-pasukan Vietnam yang telah menyelamatkan mereka dari pembantaian, dan menginginkan mereka agar tetap berada di Kampuchea untuk waktu yang diperlukan guna mencegah kembalinya klik Pol Pot.

Ini adalah ketiga kalinya Vietnam mengirim pasukannya ke Kampuchea untuk bertempur berdampingan dengan rakyat Kampuchea melawan musuh-musuh bersama, untuk memenangkan dan melindungi kemerdekaan bagi setiap negara. Kedua kali sebelumnya, Vietnam menarik semua tenaga sukarelanya setelah Perancis mengakhiri perang mereka dan Amerika mengakhiri agresi

mereka. Kali ini Vietnam akan juga menarik semua tenaga sukarelanya setelah Cina mengakhiri ancamannya, mengakhiri penggunaan wilayah Muangthai melawan ketiga negara Indocina dan mengakhiri penggunaan Pol Pot untuk menentang rakyat Kampuchea. Sambil menantikan penarikan penuh, Vietnam telah dua kali dalam dua tahun terakhir secara unilateral menarik sebagian kekuatannya dan berunding bersama Republik Rakyat Kampuchea akan mempertimbangkan penarikan sebagian setiap tahun. Penarikan sebagian ini berarti bahwa Vietnam tidak dapat dipaksa untuk menarik semua pasukannya sehingga Cina dapat mengembalikan Pol Pot ke Kampuchea, juga Vietnam tidak dapat dipojokkan sehingga tidak memungkinkan adanya penarikan pasukan. Mereka juga menjadi saksi lahirnya kembali kekuatan rakyat Kampuchea seperti jelas ditunjukkan pada peristiwa peringatan kelima pembebasan negara itu baru-baru ini. Kenyataan-kenyataan juga membuktikan bahwa kemerdekaan dan kedaulatan Kampuchea dihormati Vietnam.

Dengan menyatakan bahwa Vietnam telah melakukan agresi terhadap Kampuchea, Peking berharap bahwa pembentukan Pemerintah Koalisi Tiga Pihak yang dipimpin Sihanouk akan mengubah keadaan di Kampuchea. Tetapi klik samaran Pol Pot ini telah dibenci dan dilihat menjijikkan oleh rakyat Kampuchea. Dalam dua tahun berdirinya, Pemerintah Koalisi ini telah memperkuat ramalan Sihanouk bahwa aliansi dengan Pol Pot ini merupakan suatu politik bunuh diri. Terdiri dari seluruh politikus yang telah tersingkirkan oleh kehidupan nyata di Kampuchea lebih dari sepuluh tahun, bagaimana ia dapat bertahan? Pendukung-pendukungnya saling membunuh dan klik ini hanya muncul pada waktu pertemuan Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Peking dan sekelompok orang memperkirakan bahwa dengan peralatan dan bantuan Cina, dengan suatu tempat perlindungan di wilayah Muangthai, kekuatan-kekuatan Pol Pot akan bisa memenangkan perang gerilya, sebagaimana Vietnam memenangkan perang terhadap Amerika dengan mengandalkan basis-basis di sepanjang perbatasan Kampuchea. Bertentangan dengan apa yang disebut teori *Maoist*. Peking telah melupakan suatu hal yang mendasar bahwa suatu perang gerilya dapat dilancarkan hanya di kalangan rakyat dan dengan dukungan mereka. Dan perbedaan yang mendasar adalah bahwa Vietnam berjuang untuk rakyat, sedangkan klik Pol Pot membunuh rakyat Kampuchea dan menemui kebencian dan pertentangan dari mereka.

Dalam perhitungan Peking, Vietnam akan runtuh dalam dua atau tiga tahun karena ia telah dipojokkan di Kampuchea dan menghadapi perang sabotase dari berbagai penjuru oleh Cina terhadapnya dan negara-negara Indocina lainnya.

Lima tahun telah berlalu dan kenyataan telah menunjukkan bahwa Vietnam tidak dipojokkan dan tidak runtuh, tetapi ia telah bertumbuh semakin kuat kendatipun menghadapi berbagai kesulitan. Vietnam dan negara-negara Indocina yang lain telah berhasil melewati tahun-tahun yang paling sulit pada 1979-1980. Tahun 1982 dan 1983 menunjukkan suatu langkah maju dalam perekonomian Vietnam. Rakyat Vietnam lebih bersatu daripada sebelumnya, dan setiap serdadu Vietnam yang bertugas di Kampuchea dijiwai dengan suatu cita-cita dan memahami betul bahwa ia berjuang untuk kelangsungan hidup Kampuchea dan bangsanya. Dalam perjuangan rakyat Indocina yang adil, kekuatan bangsa Kampuchea untuk bangkit kembali jelas telah terbukti, karena telah menjadi solidaritas kuat ketiga negara Indocina yang bertekad untuk melindungi kemerdekaan dan kedaulatan mereka terhadap ekspansionisme dan hegemonisme Cina dalam persekongkolan dengan imperialisisme Amerika Serikat.

Rakyat Indocina menyadari sepenuhnya bahwa karena Cina memanfaatkan Pol Pot dan memecah-belah ketiga negara Indocina, rakyat Kampuchea telah menemui musibah terbesar dalam sejarah, pemunahan, dan ketiga negara Indocina telah berhasil melewati waktu-waktu yang paling sulit. Mereka juga memahami bahwa dengan berterima kasih kepada solidaritas Indocina, rakyat Kampuchea telah diselamatkan dari pemunahan dan ketiga rakyat Indocina telah mengatasi kesulitan-kesulitan terbesar. Itulah arti sejarah dari solidaritas ketiga negara Indocina dan Konferensi Tingkat Tinggi mereka. Cina memfitnah kami ketika ia mengatakan bahwa kami sedang membentuk suatu federasi Indocina, tetapi setiap orang mengetahui bahwa solidaritas di antara ketiga negara kami adalah kukuh, karena terletak atas dasar penghormatan bagi kemerdekaan setiap negara.

Peking dan sementara orang juga berpendapat bahwa pertentangan-pertentangan bisa timbul dalam hubungan antara Vietnam dan Uni Soviet karena pihak terakhir menghadapi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan Polandia dan Afghanistan, harus memberi bantuan kepada banyak negara dalam mempertahankan kemerdekaan mereka, dan sedang mengadakan perundingan-perundingan bagi pengembangan hubungan dengan Cina, makanya ia mungkin mengurangi bantuan bagi Vietnam. Untuk alasan ini dalam perundingannya Cina menuntut Uni Soviet menghentikan bantuan kepada Vietnam dan menekan Vietnam bagi suatu penarikan diri dari Kampuchea.

Ini semata-mata khayalan di pihak mereka. Uni Soviet telah mengungkapkan bahwa ia tidak menyetujui tuntutan Cina dan akan memberi bantuan selayaknya kepada Vietnam. Untuk menanggapi tuntutan Cina yang tidak masuk akal itu, Uni Soviet mengirim suatu Delegasi Tingkat Tinggi ke Vietnam pada peringatan kelima penandatanganan Perjanjian Persahabatan dan

Kerjasama antara Vietnam dan Uni Soviet dan pada peristiwa itu suatu program bagi kerjasama ekonomi jangka panjang ditandatangani.

Selama lima tahun terakhir Peking telah sering mengklaim bahwa masalah Kampuchea adalah masalah antara Vietnam dan ASEAN dan memanfaatkan masalah ini untuk mengadu-domba ASEAN dengan negara-negara Indocina.

Tetapi ia telah menentang setiap usaha perundingan antara ASEAN dan Indocina. Sementara itu, Cina telah berusaha berunding dengan Uni Soviet mengenai Kampuchea dan mempertimbangkan pemecahan atas Kampuchea untuk menjadi syarat utama di antara ketiga syarat pengembangan hubungan dengan Uni Soviet. Dalam usul lima butir yang diumumkan pada 1 Maret 1983, Cina juga mempertimbangkan Kampuchea sebagai masalah utama dalam meningkatkan hubungan dengan Vietnam tanpa suatu peranan yang diberikan kepada ASEAN.

Jadi dalam prakteknya Cina menganggap Kampuchea sebagai suatu masalah antara dirinya dan Uni Soviet dan juga antara dirinya dan negara-negara Indocina, tetapi ia tidak menyebutkan peranan ASEAN selama perundingan-perundingannya dengan Uni Soviet dan Vietnam mengenai Kampuchea. Umumnya diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir, Kampuchea dan Afghanistan telah menjadi dua titik utama persekongkolan antara Cina dan Amerika Serikat menentang Uni Soviet. Cina secara terang-terangan memanfaatkan masalah Kampuchea dalam hubungannya dengan Amerika Serikat dan dengan Uni Soviet. Ini adalah suatu taktik lama yang sering digunakan Cina. Ia mendesak lain-lainnya untuk bertarung sehingga ia dapat berunding, sebagaimana ia memanfaatkan perang anti-Perancis oleh rakyat Indocina bagi keuntungannya pada Konperensi Jenewa 1954 dan memanfaatkan perang anti-Amerika Serikat bagi keuntungannya pada peristiwa kunjungan Nixon ke Cina pada 1972.

Situasi yang sebenarnya dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan bahwa pada dasarnya masalah Kampuchea bukanlah suatu masalah keterlibatan agresi Vietnam, bukanlah masalah antara ASEAN dan negara-negara Indocina, bukanlah masalah yang telah menyebabkan terganggunya perdamaian dan kestabilan di Asia Tenggara. Hanya ada satu sebab masalah Kampuchea, pertentangan antara kedua kelompok negara Asia Tenggara, terganggunya perdamaian dan kestabilan di kawasan ini. Ini adalah karena pemimpin-pemimpin Peking ingin menimbulkan kekacauan di kawasan ini untuk melanjutkan kebijakan ekspansionis dan hegemonisnya di Indocina dan Asia Tenggara dan juga karena tujuan Cina untuk memanfaatkan krisis Asia Tenggara sebagai alat yang berguna bagi strategi persekongkolan 1978-1980-nya dengan Amerika Serikat menentang Uni Soviet untuk mengembangkan

program-program "empat modernisasi," dan bagi strateginya sekarang ini untuk memainkan kedua kartu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dimulai pada 1982.

Dalam tahun-tahun terakhir, berbagai penyelesaian keliru atas masalah Kampuchea telah diusulkan di negara-negara ASEAN, penyelesaian yang didasarkan atas pandangan-pandangan Cina, yang bisa membahayakan semua negara Asia Tenggara dan hanya menguntungkan Cina.

Kami telah dengan penuh perhatian mendengar dan dengan sungguh-sungguh mempelajari pemecahan ASEAN atas masalah Kampuchea. Kami telah mencatat bahwa ASEAN sering mengatakan bahwa Cina tidak diperbolehkan menguasai Kampuchea seperti sebelumnya dan klik Pol Pot tidak diperbolehkan kembali berkuasa, dan bahwa kepentingan keamanan Vietnam harus diperhitungkan. Tetapi pemecahan ASEAN tidak dapat diterima, karena menuntut Vietnam untuk menarik pasukan-pasukannya secara unilateral sedangkan Cina bebas mempertahankan ancamannya, wilayah Muangthai bebas digunakan menentang negara-negara Indocina, dan Pol Pot bebas melaksanakan kegiatan-kegiatan menentang rakyat Kampuchea. Khususnya, pemecahan ASEAN mengandung suatu bahaya besar dalam usul untuk memasukkan pasukan-pasukan dari enam negara ASEAN dan Vietnam ke dalam Kampuchea untuk menggantikan tenaga-tenaga sukarela Vietnam. Setiap orang tahu bahwa keenam negara ASEAN secara tegas mendukung Pol Pot dan apa yang disebut Pemerintah Koalisi yang sangat menentang Republik Rakyat Kampuchea. Ini bisa menimbulkan pertentangan sengit dari rakyat Kampuchea. Dalam situasi seperti ini, kita terbatas untuk mendukung Pemerintah Heng Samrin dan rakyat Kampuchea. Jadi pemecahan ini akan mengubah masalah Kampuchea, yang merupakan masalah antara Cina dan negara-negara Indocina, menjadi suatu konflik militer antara ASEAN dan negara-negara Indocina. Kedudukan kebanyakan negara ASEAN yang bermusuhan dengan ketiga negara Indocina selama empat puluh tahun membuat pemecahan ASEAN malahan lebih mencurigakan di mata kami.

Telah terdapat banyak pengalaman mengenai penempatan kekuatan militer internasional ke dalam suatu negara untuk memelihara perdamaian dan ketertiban. Pelajaran Libanon masih jelas di mata kami. Suatu negara kecil seperti Libanon, demi kemerdekaannya, harus berjuang menentang pasukan multinasional Amerika, Perancis, Itali dan Inggris, dan pasukan-pasukan Amerika terancam untuk dipojokkan di negara ini.

Pemecahan ASEAN ini menimbulkan masalah netralisasi Kampuchea. Kenyataan sejarah adalah bahwa di Asia Tenggara, Muangthai sering mengandalkan kekuatan-kekuatan luar untuk melakukan ekspansi dan merampas

daratan Kampuchea. Dengan segala kejujuran adalah perlu untuk menetralisasi Muangthai, dan bukan korbannya Kampuchea. Tetapi negara-negara Indocina tidak mengajukan tuntutan ini; mereka menentang tuntutan untuk menetralisasi Kampuchea tetapi mereka bersedia untuk membicarakan netralisasi di seluruh Asia Tenggara.

Jelas bahwa segala pemecahan masalah Kampuchea harus memperhitungkan sifat kawasan dan situasi sebenarnya dalam lima tahun terakhir. Pemecahan-pemecahan yang didasarkan atas pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan yang keliru akan mengarah pada jalan buntu.

MENGENAI PENYELESAIAN

Dengan memperhitungkan sifat dan situasi yang sebenarnya di Asia Tenggara, suatu penyelesaian masalah-masalah Asia Tenggara secara mendasar, menyeluruh dan berjangka panjang seharusnya memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

1. Berakhirnya agresi dan intervensi dari luar, penarikan semua pasukan asing dan pangkalan-pangkalan militer dari Asia Tenggara;
2. Penghormatan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan ketiga negara Indocina dan negara-negara Asia Tenggara lainnya;
3. Berakhirnya kenyataan bahwa beberapa negara di kawasan, khususnya Muangthai, membiarkan wilayah mereka digunakan oleh negara-negara asing menentang negara ketiga di Asia Tenggara;
4. Pertentangan negara-negara Asia Tenggara terhadap maksud-maksud memecah-belah dari luar, hidup-berdampingan dan penyelesaian damai akan perbedaan-perbedaan melalui perundingan-perundingan damai;
5. Penyelesaian masalah-masalah Asia Tenggara oleh negara-negara di kawasan untuk mengubah Asia Tenggara menjadi suatu zona perdamaian, kestabilan dan kerjasama.

Perkembangan empat puluh tahun terakhir di Asia Tenggara membuktikan bahwa kami sepenuhnya mampu berjuang untuk tujuan-tujuan mulia tersebut. Namun kami sangat realistis, dan kami pikir bahwa beberapa kemungkinan terbentang di mata kami dan kami memiliki banyak pilihan. *Pertama*, suatu penyelesaian menyeluruh atas semua masalah yang berkaitan dengan perdamaian, kestabilan di Asia Tenggara yang berdasarkan atas penarikan semua pasukan asing dari kawasan, dan berakhirnya intervensi dari luar dan Asia Tenggara menjadi zona perdamaian, persahabatan, dan kerjasama. Penyelesaian secara menyeluruh ini dapat mengarah pada suatu per-

damaian abadi dan stabil di kawasan. Isi penyelesaian ini dapat ditemukan dalam Resolusi Pertemuan Tingkat Tinggi Negara-negara Non-Blok Ketujuh mengenai Asia Tenggara (Maret 1983), yang sesuai dengan rumusan 1971 negara-negara ASEAN mengenai zona perdamaian, kemerdekaan dan netralitas dan usul tujuh butir ketiga negara Indocina yang diajukan atas nama mereka oleh Menteri Luar Negeri Republik Demokratis Rakyat Laos pada sidang ke-38 Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1981.

Mengenai bentuk perundingan, kedua belah pihak dapat membahas dan menyetujui pada suatu konperensi regional atau internasional. Ketiga negara Indocina tidak menerima Konperensi PBB mengenai Kampuchea (ICK) karena Pol Pot diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menerima ICK berarti menerima Pol Pot. Kedua belah pihak dapat menyetujui suatu konperensi internasional dengan peserta-peserta yang diterima oleh kedua belah pihak. Peserta-peserta dari kawasan bisa meliputi ketiga negara Indocina, keenam negara ASEAN dan Birma. Dari luar kawasan, kita bisa mengundang Uni Soviet, Cina, Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, yang telah ikut serta dalam konperensi-konperensi internasional mengenai Indocina selama beberapa dasawarsa terakhir. India sebaiknya juga diundang dalam konperensi ini. Ia merupakan suatu negara besar di Asia dan di dunia dan telah memberi sumbangan-sumbangan besar bagi maksud-maksud perdamaian dan kemerdekaan nasional di dunia dan di Asia Tenggara. Ia ikut serta dalam Komisi Penasihat dan Pengawasan Internasional mengenai Indocina di bawah Perjanjian Jenewa 1954 dan ikut serta dalam Konperensi 1961-1962 mengenai Laos, Konperensi 1973 mengenai Vietnam, dan sekarang adalah Ketua Gerakan Non-Blok, di mana kebanyakan negara kedua kelompok menjadi anggotanya.

Kedua, suatu penyelesaian sebagian mengenai ketiga negara Indocina dan Cina ditujukan pada penarikan pasukan Vietnam secara menyeluruh dari Kampuchea bersamaan dengan berakhirnya ancaman Cina, berakhirnya penggunaan wilayah Muangthai sebagai pangkalan-pangkalan menentang negara-negara Indocina, dan berakhirnya penggunaan sisa-sisa Pol Pot dan reaksioner-reaksioner Khmer Merah lainnya menentang rakyat Kampuchea.

Penyelesaian ini tidak disetujui dalam masa dekat ini karena Peking masih ingin mempertahankan ancamannya, mempertahankan keadaan pertentangan di Asia Tenggara, mempertahankan sisa-sisa Pol Pot di wilayah Muangthai menentang rakyat Kampuchea.

Ketiga, suatu penyelesaian sebagian mengenai ketiga negara Indocina dan Muangthai atas dasar jaminan keamanan bersama bagi kedua belah pihak dan penciptaan suatu zona yang aman di sepanjang kedua sisi perbatasan Kam-

puchea-Muangthai. Kedua belah pihak akan menyetujui suatu pengawasan internasional atas batas-batas yang disepakati.

Negara-negara ASEAN, khususnya Muangthai, menganggap bahwa kehadiran pasukan Vietnam di Kampuchea mengancam keamanan Muangthai. Walaupun ini jelas tidak benar, Vietnam, Laos dan Kampuchea telah mengusulkan agar ketiga negara Indocina dan Muangthai menandatangani suatu perjanjian non-agresi dan non-intervensi dan membentuk suatu zona demilitarisasi di sepanjang perbatasan Muangthai-Kampuchea, jadi memisahkan pasukan-pasukan kedua belah pihak dan menghindari bahaya perselisihan. Usul ini diajukan pada komunike Konperensi Menteri-menteri Luar Negeri dalam bulan Pebruari 1982 di Vientiane. Tetapi Muangthai telah menolaknya dengan alasan bahwa tidak ada bahaya agresi antara Muangthai dan Vietnam dan bahwa Muangthai bukanlah suatu pihak yang terlibat perang, makanya ia tidak dapat menghentikan hak kedaulatannya untuk menempatkan pasukan pada bagian wilayahnya. Setelah mempertimbangkan secara hati-hati pandangan Muangthai, ketiga negara Indocina mengusulkan pembentukan suatu zona keamanan di sepanjang perbatasan Muangthai-Kampuchea. Komunike Konperensi Menteri Luar Negeri Indocina dalam bulan Juli 1982 di kota Ho Chi Minh mengatakan secara jelas: "Dalam zona keamanan di pihak Kampuchea, hanya angkatan bersenjata Republik Rakyat Kampuchea akan hadir, dan dalam zona keamanan di pihak Muangthai, hanya angkatan bersenjata Muangthai akan hadir, sedangkan sisa-sisa Pol Pot dan kelompok-kelompok reaksioner Khmer lainnya akan dilucuti senjatanya dan diasingkan dalam kamp-kamp pengungsi di dalam Muangthai.

Menanggapi usul-usul yang beralasan dan bijaksana ini, pihak Muangthai mengusulkan pembentukan zona-zona keamanan di wilayah Kampuchea untuk mengembalikan sisa-sisa Pol Pot dan reaksioner-reaksioner Khmer lainnya dari Muangthai. Dalam bulan April 1983, Menteri Luar Negeri Muangthai Siddhi Savetsila mengusulkan agar Vietnam menarik pasukan-pasukannya secara unilateral 30 km dari perbatasan sebagai suatu syarat kunjungannya ke Vietnam. Tetapi usul pihak Muangthai ini tidak dapat diterima. Mereka ingin memperoleh dari meja perundingan apa yang mereka tidak peroleh di medan pertempuran selama beberapa tahun terakhir. Usul penarikan unilateral Vietnam seperti itu adalah sama dengan menuntut agar Vietnam menyerah. Kendatipun usul-usul negara-negara Indocina memperhatikan keamanan bersama kedua Muangthai dan Kampuchea, mereka ingin memaksakan suatu pemikiran yang akan menguntungkan hanya satu pihak. Ini membuktikan bahwa Muangthai hanya memiliki satu tujuan, yaitu memanfaatkan perundingan sebagai sarana untuk mengembalikan situasi sekarang ini di Kampuchea yang mereka tidak capai secara militer.

Keempat, sementara suatu penyelesaian menyeluruh atau suatu penyelesaian sebagian seperti dikemukakan di atas belum dapat dicapai, mungkin ada suatu persetujuan umum mengenai prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara negara-negara ASEAN dan Indocina dengan maksud untuk mencegah bahaya situasi sekarang ini meningkat menjadi suatu konflik besar dan meletakkan dasar bagi pemecahan secara bertahap dari perbedaan-perbedaan yang nyata dan laten antara kedua kelompok negara atau di kalangan semua negara di kawasan. Kedua belah pihak akan mempertimbangkan suatu bentuk pengawasan dan jaminan internasional atas batas-batas yang disepakati.

Prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara Vietnam dan ASEAN yang dinyatakan dalam komunike bersama antara Ketua Dewan Menteri-menteri Pham Van Dong dan pemimpin-pemimpin Muangthai, Malaysia, Pilipina, Indonesia dan Singapura selama kunjungan-kunjungan resminya ke negara-negara ini pada akhir 1978 bisa dipakai sebagai dasar perundingan. Persetujuan-persetujuan Konperensi Helsinki 1975 mengenai keamanan dan kerjasama antara negara-negara dengan sistem-sistem sosial yang berbeda di Eropa bisa membantu kami menemukan prinsip-prinsip untuk perlindungan keamanan dan kerjasama di antara negara-negara di Asia Tenggara.

Kelima, situasi dewasa ini bisa berkepanjangan tanpa penyelesaian menyeluruh atau sebagian, dan ini bisa memperburuk perbedaan-perbedaan antara kedua kelompok negara, memperdalam kebencian-kebencian antara negara-negara di kawasan, mencegah mereka dari pemusatan usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan sosial yang mendesak. Tidak seorang pun dapat meramalkan apakah krisis seperti ini dapat terjadi di setiap negara di Asia Tenggara. Pada saat yang bersamaan kita harus memperhitungkan kemungkinan perkembangan-perkembangan di dunia yang bisa mengarah pada perubahan-perubahan persekutuan antara negara-negara seperti itu, khususnya antara negara-negara besar, seperti telah terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Kita bisa memperkirakan bahwa dengan perkembangan-perkembangan demikian seperti telah terjadi dalam lima tahun terakhir, dalam beberapa tahun Vietnam akan bisa menarik sebagian besar pasukan-pasukannya, tetapi tidak semua, karena ancaman Cina akan masih ada di sana. Vietnam akan menarik sebagian besar pasukannya, apabila situasi Kampuchea akan stabil dan klik Pol Pot tidak akan bisa mengembalikan situasi itu.

Keenam, situasi ini akan semakin memburuk pada titik di mana suatu situasi eksplosif yang tak terkendali bisa terjadi dan Cina bisa memanfaatkannya untuk mengobarkan suatu perang besar-besaran di Asia Tenggara.

Vietnam dan negara-negara Indocina yang lain mendambakan perdamaian dan berketetapan untuk mempertahankannya, tetapi mereka selalu siap sedia menangani apa pun yang paling buruk, jika Cina, yang terus bersekongkol dengan Amerika Serikat, Jepang dan Muangthai, dan memperoleh dukungan negara-negara ASEAN lainnya, melancarkan suatu perang agresi kedua terhadap Vietnam.

Dalam perjuangan yang panjang untuk kemerdekaan dan kebebasan, tuntutan-tuntutan sah Vietnam ditentang oleh kekuatan-kekuatan imperialis dan kolonialis sementara mereka berusaha memaksakan keinginan mereka dalam bentuk perang-perang agresi.

Pada 1945 Vietnam menuntut kemerdekaan dalam Uni Perancis. Perancis secara tandas menolak tuntutan ini dan hanya akan memberi otonomi. Vietnam dipaksa untuk melancarkan suatu perang perlawanan sembilan tahun dan kemenangan Dien Bien Phu menyebabkan jatuhnya kolonialisme Perancis di seluruh dunia. Dalam perang anti-Amerika Serikat, kami mengajukan tuntutan agar Amerika Serikat menarik diri dari Vietnam dan suatu pemerintah tiga pihak dibentuk di Vietnam Selatan. Amerika dan pemerintah boneka Saigon tidak setuju, sehingga memaksa kami untuk berperang selama sembilan tahun dan kami membebaskan Vietnam Selatan sama sekali. Amerika harus sepenuhnya menarik diri dan pemerintah boneka runtuh. Jika Peking mengikuti kebiasaan pertempuran imperialis dan kolonialis yang telah dijatuhkan, mereka akan mengalami nasib kaum agresor seperti itu.

Dari keenam kemungkinan ini, kami menganggap bahwa negara-negara ASEAN dan Indocina akan mampu sepenuhnya, dalam kapasitas-kapasitas mereka sendiri, mewujudkan kemungkinan-kemungkinan ketiga dan keempat. Apabila ini berhasil, kondisi-kondisi akan diciptakan untuk perwujudan kemungkinan-kemungkinan pertama dan kedua sementara menghapuskan yang kelima dan keenam.

PENYELESAIAN MASALAH DAN PERSPEKTIF TAHUN 2000-AN

Jika kita harus mencari penyelesaian-penyelesaian yang tepat terhadap masalah-masalah dewasa ini di Asia Tenggara, kita sebaiknya menempatkan nya dalam perspektif tahun 2000-an dan sesudahnya.

Walaupun Amerika Serikat akan masih menaruh perhatian pada Asia Tenggara, sejarah empat puluh tahun telah menunjukkan bahwa kekuatannya akan semakin terbatas dan ia harus menangani bidang-bidang lain yang secara strategis lebih penting.

Kedua kekuatan yang mampu mengadakan ekspansi di kawasan ini adalah Cina dan Jepang yang merupakan bahaya-bahaya jangka panjang bagi Asia Tenggara.

Dalam dua puluh tahun mendatang, Cina bisa memenuhi sasaran-sasaran penyesuaian kembali program "empat modernisasi"-nya. Pada waktu itu ia akan meningkatkan empat kali seluruh nilai produksi industri dan pertaniannya. Makanya kami akan menghadapi empat Cina daripada yang sekarang. Mungkin Cina tidak akan memenuhi sasarnya secara 100%, tetapi hanya 50% atau 75%, maka kita masih akan menghadapi dua atau tiga Cina. Inilah artinya mengapa Cina ingin mendesak seluruh dunia, dan khususnya Asia Tenggara, menjadi kacau-balau sehingga Cina sendiri dapat menikmati ketertiban. Mungkin saja Cina akan menghadapi kegagalan dalam usaha modernisasinya. Dalam hal ini, untuk menciptakan pertentangan dalam negeri, ia bisa meneruskan suatu kebijakan avonturistik di dunia dan memanfaatkan kelompok-kelompok Maois untuk menciptakan kesulitan di Asia Tenggara.

Jepang sudah didorong Amerika Serikat dalam kecenderungan militernya agar bisa menanggung bersama tanggung jawab Amerika Serikat untuk menguasai Kawasan Asia Tenggara dan Asia-Pasifik, karena Amerika Serikat semakin memperhatikan kawasan-kawasan yang semakin penting secara strategis baginya. Menghadapi bahaya dua atau empat Cina, Jepang yakin untuk mengadakan remilitarisasi. Asia Tenggara akan menjadi suatu kawasan persengketaan seru antara Cina dan Jepang.

Beberapa negara ASEAN prihatin akan kehadiran Uni Soviet di kawasan ini. Dalam sejarahnya selama enam puluh tahun sejak negara Soviet terbentuk, Uni Soviet selalu menjadi sasaran pengepungan dan pengasingan berbagai aliansi kekuatan-kekuatan imperialis. Uni Soviet tidak melakukan agresi terhadap negara lain, tetapi telah dua kali kami dirusakkan oleh perang-perang agresif. Ia membutuhkan perdamaian untuk membangun negaranya dan kemerdekaan negara-negara lain menguntungkan dirinya.

Uni Soviet merupakan satu-satunya negara di antara kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang tidak terlibat dalam agresi di Asia Tenggara. Ia tidak sekali pun menggunakan suaranya menentang perjuangan kemerdekaan negara-negara Asia Tenggara. Tanpa Uni Soviet, Vietnam dan negara-negara Indocina lainnya tidak akan mampu mengalahkan Amerika Serikat dan Cina dan ia dapat bertindak sebagai suatu kekuatan pengimbang terhadap kekuatan-kekuatan imperialis dan ekspansionis di kawasan ini.

Dalam dua puluh tahun kita menyaksikan perubahan-perubahan aliansi antara negara-negara, khususnya antara negara-negara besar, yang akan memiliki dampak yang penting bagi Asia Tenggara. Kita telah melihat bahwa

Cina sering mengubah aliansinya, mengubah sahabat-sahabatnya menjadi musuh dan sebaliknya, untuk mendukung suatu tujuan yang tidak berubah, yakni untuk melanjutkan ekspansionisme dan hegemonisme Cina.

Dalam empat puluh tahun terakhir, negara-negara ini yang kebijakannya tidak mendasar terutama atas kekuatan-kekuatan mereka sendiri tetapi semata-mata pada kekuatan-kekuatan asing atau mengambil keuntungan dari pertentangan-pertentangan antara negara-negara besar semuanya telah menemui kegagalan atau sedang menghadapi kesulitan-kesulitan besar.

Tidak adanya perdamaian dan kestabilan merupakan bahaya paling besar bagi Asia Tenggara. Vietnam dan negara-negara Indocina lainnya masih miskin; mereka membutuhkan perdamaian untuk membangun negaranya menuju kemakmuran. Negara-negara ASEAN, termasuk beberapa negara kaya, juga membutuhkan perdamaian dan kestabilan. Walaupun miskin, ketiga negara Indocina telah terbukti kukuh dalam menghadapi usaha-usaha yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Mereka miskin tetapi stabil karena kemiskinan ini ditanggung bersama, tidak seperti beberapa negara ASEAN yang kaya, tetapi kelimpahan ini tidak dibagi secara adil, sehingga masih banyak masalah sosial dan ketidakstabilan. Khususnya Muangthai menghadapi banyak masalah sosial, sedangkan ia juga memiliki paling banyak masalah sejarah dengan tetangga-tetangganya dan memiliki perbatasan-perbatasan yang hangat dengan semua tetangganya di daratan Asia Tenggara.

Menghadapi kemungkinan bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh Cina dan Jepang pada tahun 2000-an, negara-negara Asia Tenggara perlu mencapai perdamaian dan kerjasama sedini mungkin untuk membangun negara mereka dan mulai sekarang membentuk suatu zona keamanan dengan maksud untuk menghapuskan agresi dan intervensi dari luar.

Secara strategis masalah-masalah penting akan menjadi ujian bagi negara-negara Asia Tenggara kita, dan di masa mendatang kita harus mencapai suatu penyelesaian yang dini, dengan suatu rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masalah-masalah sekarang di Asia Tenggara.

Indonesia memiliki suatu peranan yang besar di Asia Tenggara dan di arena dunia. Kedua negara kami telah menjadi korban imperialisme dan ekspansionisme Peking, dan kami telah memberi banyak sumbangan berharga bagi gerakan pembebasan nasional di kawasan ini bagi solidaritas di kalangan negara-negara Afro-Asia, dan dalam Gerakan Non-Blok.

Kedua negara kami yang bertindak dalam solidaritas akan menjadi faktor penentu dalam perjuangan kemerdekaan dan kemakmuran masing-masing, dan bagi perdamaian, kestabilan dan kemakmuran di seluruh kawasan.

Masalah Kampuchea: Retrospek dan Prospek*

Adam MALIK

Sebelum saya mengutarakan gagasan-gagasan saya mengenai masalah Kampuchea yang kompleks dan delikat itu, mungkin ada baiknya kalau kita mengenang secara singkat rangkaian kejadian yang mengakibatkan situasi konflik yang tak stabil di Kampuchea sekarang ini.

Sesudah akhir Perang Pasifik menjadi jelas bahwa perkembangan di Semenanjung Indocina selaras dengan pola umum kejadian-kejadian yang menandai percaturan politik dan militer negara-negara besar dalam usaha mencari akomodasi mengenai berbagai kawasan krisis di dunia. Hasil Konperensi Jenewa tahun 1954 bisa diduga memuaskan negara-negara besar itu dalam usaha mereka mencari akomodasi dan penyesuaian prioritas-prioritas politik dan militer mereka masing-masing, tetapi di lain pihak situasi akibatnya merampas hak bangsa-bangsa Semenanjung Indocina atas kedaulatan politik dan pembangunan ekonomi kembali.

Selama dasawarsa 1950-an, Kamboja - nama negeri ini waktu itu - berusaha mempertahankan kebebasan dan kemerdekaannya dengan memelihara suatu hubungan berimbang dengan negara-negara tetangga dekatnya, khususnya Muangthai di satu pihak dan Vietnam Utara serta Vietnam Selatan di lain pihak. Nasionalisme Kamboja diungkapkan melalui partisipasinya dalam Konperensi Afro-Asia di Bandung, bulan April 1955. Delegasi Kamboja dipimpin oleh Pangeran Ncrodom Sihanouk yang mu'tabar yang belum lama ini mengadakan kunjungan sentimental ke tempat Konperensi Asia-Afrika di Bandung itu.

*Diambil dari Keynote Address yang disampaikan Adam MALIK, bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, pada Pertemuan Umum Tahunan Press Foundation of Asia, mengenai Masalah Kampuchea: Retrospek dan Prospek, di Hong Kong pada tanggal 28 Februari 1984. Diambil oleh Kirdi DIPOYUDO.

Akan tetapi perjuangan Kamboja untuk kebebasan dan kemerdekaan di-hambat selama dasawarsa 1960-an oleh apa yang bisa disebut perang Indocina ketiga, periode yang banyak dicaci yang menyaksikan meningkatnya konflik negara besar yang antara lain diproyeksikan ke kawasan Indocina. Dalam arsip Press Foundation of Asia - saya yakin - juga terdapat banyak laporan mengenai periode khusus konflik Amerika-Cina di kawasan itu. Mungkin tampak aneh bagi kita yang meninjau kejadian-kejadian periode itu dari perspektif tahun 1984 bahwa konflik Indocina itu sebagian besar adalah bumerang akibat percaturan kekuatan Amerika-Cina untuk mendapatkan pengaruh di zona dan kawasan ini. Cukup ironis bahwa kejadian-kejadian di Kampuchea dewasa ini terutama adalah suatu ungkapan konvergensi politik Amerika-Cina melawan persepsi bahaya Soviet dan persaingan Cina-Soviet.

Kejadian-kejadian pada tahun 1965-1975 membawa Kamboja ke pusaran konflik regional, sebagai suatu faktor yang jelas dalam percaturan kekuatan internasional. Pada tahun 1970, Pangeran Norodom Sihanouk disingkirkan dari kekuasaan lewat suatu kudeta hanya beberapa minggu setelah ia dituduh oleh sesama warga bangsa Khmer bahwa ia terlalu lembut bagi Pasukan Vietcong yang beroperasi dalam wilayah Kamboja. Kira-kira 10 tahun kemudian, situasi di Kampuchea -- namanya sekarang -- mengalami suatu metamorfosis atau perubahan yang sama sekali berlainan ketika ia diserbu dan kemudian diduduki oleh pasukan Vietnam. Dengan sedih hati kita hanya dapat menyimpulkan bahwa tiada pemerintah di Phnom Penh, bahkan rezim Heng Samrin sekarang ini dengan dukungan penuh pasukan pendudukan Vietnam pun tidak, yang mampu mengklaim suatu tingkat kekuasaan politik maupun teritorial yang cukup atas negeri itu untuk memungkinkan rakyat Kampuchea melancarkan pembangunan ekonomi kembali yang sangat diperlukan oleh negeri yang banyak mengalami kerusakan itu.

Setelah meninjau kembali kejadian-kejadian di Semenanjung Indocina itu secara singkat, tidaklah sulit menyimpulkan bahwa perkembangan di Kampuchea adalah akibat konflik kepentingan dan pengaruh antara RRC dan Vietnam sebagai perluasan persaingan Cina-Soviet. Ini jelas bukan konflik antara negara-negara ASEAN dan Vietnam. Akan tetapi, membiarkan masalah Kampuchea itu berlarut-larut juga tidak menguntungkan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Sebaliknya, situasi semacam itu bisa menjadi suatu ancaman terhadap keamanan dan stabilitas Asia Tenggara dan menghambat implementasi gagasan ZOPFAN - Zona Damai, Bebas dan Netral - seperti digariskan dalam Deklarasi ASEAN yang dikeluarkan di Kuala Lumpur tahun 1971.

Kita mengetahui usaha-usaha ASEAN mencari suatu penyelesaian politik masalah Kampuchea yang menyeluruh lewat PBB dan kemudian lewat

Konferensi Internasional mengenai Kampuchea (KIK) bulan Juli 1981. Saya tidak perlu membicarakan kata-kata diplomasi usaha-usaha ini secara panjang lebar. Kata-kata itu cukup jelas dan cukup koheren: penarikan semua pasukan asing dari Kampuchea; hak penentuan-diri bangsa Kampuchea tanpa campur tangan asing; dan pemilihan umum yang bebas di bawah pengawasan PBB.

Program itu untuk negara-negara anggota ASEAN merupakan landasan yang paling praktis yang memungkinkan negara-negara Kawasan Asia Tenggara hidup bersama secara damai dan membina hubungan yang saling menguntungkan. Oleh sebab itu sangat disayangkan bahwa usaha-usaha yang jujur itu sejauh ini tidak mendapat tanggapan positif dari Vietnam. Sebaliknya, bersama Laos dan rezim Heng Samrin di Kampuchea, ia menandatangani bahwa situasi di Kampuchea itu tidak bisa dibalik, dan di bawah kedok membuktikan apa yang disebut maksud-maksud damainya bahkan mengajukan usul-usul tandingan seperti: mengadakan Konferensi Internasional mengenai Asia Tenggara untuk membicarakan masalah-masalah keamanan Asia Tenggara, termasuk pangkalan-pangkalan asing dan soal Timor Timur; membentuk "zona-zona pengaman" sepanjang perbatasan Muangthai-Kampuchea; dan menarik apa yang dinamakan pasukan-pasukan reaksioner Pol Pot yang didukung Muangthai di selatan dan pasukan-pasukan Cina di utara. Menurut ketiga negara Indocina, ini merupakan syarat-syarat yang relevan untuk memelihara *status quo* di Kampuchea. Usul-usul ini bukan saja mempersoalkan kejujuran mereka tetapi juga tidaklah sulit melihat mengapa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat menerimanya.

Untuk menghadapi sikap keras kepala Vietnam ini, suatu kelompok perlawanan dibentuk antara FUNCIPPEC di bawah Pangeran Norodom Sihanouk, KPNLF di bawah Son Sann dan Khmer Merah di bawah Khieu Samphan sebagai Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratis. Pembentukan pemerintah ini tidaklah mudah, tetapi melewati suatu periode "off-and-on" yang lama dan sering menimbulkan frustrasi. Akan tetapi akhirnya, dengan dukungan penuh negara-negara anggota ASEAN, Deklarasi Pembentukan Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratis ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1982 dan kemudian diumumkan pembentukan pemerintah ini dengan Pangeran Norodom Sihanouk sebagai Presiden, Khieu Samphan sebagai Wakil Presiden dan Son Sann sebagai Perdana Menteri di suatu tempat di Kampuchea pada bulan Juli 1982.

Dengan pembentukan Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratis ini dapat dikatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN mencapai suatu kemenangan politik dalam usaha mereka yang tak mengenal lelah untuk mencari suatu penyelesaian bagi masalah Kampuchea. Sebaliknya, perkembangan baru ini merupakan suatu pukulan bagi kebijakan Vietnam. Vietnam dan

beberapa negara lain bisa mengatakan bahwa Pemerintah Koalisi itu tidak akan tahan lama tetapi fakta-fakta membuktikan lawannya. Pembentukan pemerintah ini membangkitkan kepercayaan dunia internasional, yang mula-mula menunjukkan tanda-tanda luntur, akan pemerintah itu seperti terbukti dari pernyataan-pernyataan mendukung surat-surat kepercayaan Kampuchea Demokratis dan resolusi mengenai Kampuchea sejak sidang Majelis Umum PBB tahun 1979. Dukungan untuk Kampuchea Demokratis jelas meningkat.

Dalam keadaan sekarang ini Vietnam rupanya tidak senang dengan persetujuan kompromi mana pun yang bisa memenuhi tuntutan minimal mencegah pembentukan suatu pemerintah yang bermusuhan di Phnom Penh. Menurut dugaan, orang-orang Vietnam tidak pernah memikirkan gagasan koalisi itu sebagai suatu penyelesaian untuk konflik politik itu, tetapi sebagai salah satu tahap ke arah penyelesaian final di mana sasaran akhirnya jelaslah penguasaan Vietnam atas kendali kekuasaan di Phnom Penh. Selain itu, segala penyelesaian politik di Kampuchea berdasarkan persetujuan kompromi mana pun yang menuntut penarikan Vietnam tidak dapat dibangun atas kepercayaan semata-mata. Ia akan memerlukan suatu sistem jaminan yang terperinci yang sudah barang tentu lebih mudah dirumuskan daripada dilaksanakan. Lagipula, kendati prospek menghadapi ketetapan Cina yang hebat, Pemerintah Hanoi rupanya bertekad untuk menjalankan kekuasaannya di Phnom Penh atas dasar kekuatan militer, selama Uni Soviet bersedia dan mampu menopang ekonomi Vietnam.

Dalam kunjungannya ke negara-negara anggota ASEAN bulan Juli 1982, Menteri Luar Negeri Vietnam Nguyen Co Thach mengutarakan sasaran-sasaran Vietnam di Kampuchea dan dengan kedok menunjukkan "itikad baik" Vietnam terhadap dunia internasional mengajukan lima kemungkinan perkembangan politik di Asia Tenggara: (1) Cina akan berkomplot dengan Amerika Serikat dan ASEAN untuk menentang negara-negara Indocina, sedangkan ASEAN akan terus menganut kebijaksanaan konfrontasinya sekarang ini terhadap negara-negara Indocina; (2) negara-negara Indocina, ASEAN dan Cina akan memperbaiki hubungan mereka masing-masing; (3) dalam komplotan dengan Amerika Serikat dan ASEAN, Cina akan melancarkan perang total melawan ketiga negara Indocina; (4) ASEAN dan negara-negara Indocina akan menjalin hubungan yang lebih erat, sedangkan Cina di lain pihak akan terus menentang negara-negara Indocina; dan (5) Cina akan memperbaiki hubungan dengan negara-negara Indocina, sedangkan negara-negara ASEAN akan meneruskan kebijaksanaan bermusuhan dengan negara-negara yang terakhir itu.

Usaha-usaha Uni Soviet dan Cina untuk saling menjajaki baru-baru ini ternyata mempengaruhi sikap Vietnam. Kalau tanda-tanda mengisyaratkan kebi-

jaksanaan yang lebih lunak, hal ini adalah akibat kemungkinan penyelesaian masalah Kampuchea yang dipaksakan di masa mendatang melalui kombinasi penengahan Cina-Soviet? Sebagai jawaban atas pertanyaan ini, izinkan saya menunjuk pada usaha-usaha Vietnam untuk mendekati dan memulai suatu dialog dengan ASEAN atau pada kenyataan bahwa Vietnam telah melakukan usaha-usaha diskrit untuk mengadakan kontak dengan Sihanouk melalui apa yang dinamakan "prakarsa Belgium." Jalan lain ialah apa yang disebut Konsep Rumania yang sangat mirip dengan Konsep Perancis yang mengusulkan suatu dialog langsung antara Sihanouk dan Vietnam bersama Heng Samrin. Ini adalah usul-usul di luar kerangka KIK.

Akan tetapi sudah harus sangat jelas bahwa usaha-usaha terpuji para perantara, pelancar, penengah dan apapun namanya, untuk mengatur suatu dialog antara Sihanouk dan Vietnam tidak boleh menimbulkan gesekan di antara anggota Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratis, yang menikmati dukungan penuh negara-negara anggota ASEAN. ASEAN tidak dapat menerima usul mana pun yang, sebagai akibat kemungkinan dialog Sihanouk-Vietnam, bisa merenggangkan hubungan antara para anggota Pemerintah Koalisi.

Kita ingat bahwa pergantian pemerintah di Australia juga mengakibatkan suatu perubahan dalam pendekatan Australia terhadap Vietnam dalam arti bahwa Pemerintah Australia sekarang ini bermaksud memulihkan program bantuannya untuk Vietnam, seperti diberitahukan Menteri Luar Negeri Bill Hayden kepada rekan-rekan ASEAN-nya. Sikap Australia itu memancing keberatan ASEAN yang menganggap waktu maksud Australia itu kurang tepat. Lagipula, ASEAN merasa bahwa bantuan semacam itu bisa dimanfaatkan Vietnam untuk tujuan-tujuan militer. Yang lebih mencemaskan ialah bahwa hal itu menimbulkan kesan seolah-olah Australia tidak mendukung usaha-usaha ASEAN mencari suatu penyelesaian untuk masalah Kampuchea. Sejauh ini Australia belum meneruskan program bantuannya untuk Vietnam. Diduga bahwa ia memberitahukan kepada ASEAN akan berkonsultasi dengan ASEAN sebelum melaksanakan program bantuannya untuk Vietnam. Indonesia memandang maksud Australia untuk membantu itu sebagai politik yang tidak praktis. Akan tetapi pada prinsipnya Indonesia tidak akan berkeberatan kalau bantuan itu diberikan dengan pertimbangan kemanusiaan dalam kerangka PBB.

Saya menyebutkan sasaran Australia ini karena ia juga berkaitan dengan pernyataan keinginan Australia untuk bertindak sebagai "pelancar" (facilitator) dalam usaha mencari suatu penyelesaian masalah Kampuchea. Di atas saya menekankan bahwa ASEAN tidak dapat menerima bahwa kemungkinan dialog Sihanouk-Vietnam menimbulkan gesekan dalam

Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratis. Demikian pun kita harus waspada di ASEAN terhadap tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan perselisihan dalam ASEAN.

Usaha-usaha diplomasi ASEAN selama empat tahun terakhir berhasil mencegah Vietnam mewujudkan ambisi-ambisi politiknya di Kampuchea secara penuh. Tetapi usaha diplomasi saja tidak mampu membalik kebijaksanaan Vietnam seperti terlihat dalam boikotnya terhadap Konferensi Internasional mengenai Kampuchea bulan Juli 1981.

Di lain pihak, kita akan merugikan usaha ASEAN dengan mengira bahwa bentrokan-bentrokan perbatasan Cina-Vietnam akan memperlemah penguasaan militer Vietnam atas Kampuchea atau bahwa keprihatinan dan prioritas-prioritas Cina sehubungan dengan persepsinya mengenai kehadiran Soviet di Vietnam akan mengurangi bantuan militer, ekonomi dan politik Soviet untuk Vietnam. Sejauh pengetahuan saya, tidak ada negara ASEAN, apalagi Indonesia, yang ingin melihat dominasi Vietnam di Kampuchea dan Laos digantikan dominasi Cina, dan ini juga bukan soal memilih hal buruk yang lebih kecil.

Saya berani meramalkan bahwa soal paling sulit yang akan muncul di gelanggang internasional ialah bagaimana menghadapi isu kemungkinan Khmer Merah berkuasa lagi, kendati kehadiran pasukan Vietnam di Kampuchea. Selama tiga tahun terakhir ini kita menyaksikan perspektif-perspektif strategis yang berlainan di antara negara-negara anggota ASEAN mengenai isu itu. Walaupun ASEAN mengambil posisi diplomasi bersama, kadang-kadang terlihat adanya perbedaan-perbedaan dalam soal-soal yang berkaitan dengan taktik, khususnya sehubungan dengan pasukan Khmer Merah, ini jelas.

Masalahnya menjadi lebih sulit akibat apa yang bisa kita namakan negasi dosa-dosa. Dalam pandangan negara-negara ASEAN khususnya dan masyarakat internasional umumnya, Vietnam melanggar suatu asas pokok hukum internasional dan dalil-dalil Non-Blok dengan menyerbu Kampuchea bulan Desember 1978. Cukup ironis, bahwa intervensi Vietnam yang mengakibatkan tersingkirnya rezim Pol Pot mula-mula - dan saya ingin menekankan mula-mula - mempunyai daya pengumpul (leverage) moral dan diplomatik yang besar. Sudah barang tentu cukup mudah memikirkan dalam suatu kerangka internasional pedoman-pedoman teoretis yang diproyeksikan untuk suatu formula menyeluruh menuju penyelesaian-penyelesaian yang mungkin bisa diterima bahkan oleh Cina, Uni Soviet dan ASEAN. Tetapi apakah formula semacam itu bisa dilaksanakan dalam praktek? Terlepas dari segala retorika, adakah orang yang ingin menempatkan taruhan atas atau

meramalkan arah yang kiranya akan ditempuh oleh kejadian-kejadian di Kampuchea itu sendiri?

Saya misalnya sama sekali tidak yakin bahwa setelah pernyataan bebas dilangsungkan di bawah pengawasan PBB atau bentuk-bentuk lain observasi atau pengawasan internasional yang disetujui, suatu Pemerintah Koalisi yang mencakup semua fraksi Khmer bisa tahan lama. Kita ingat bahwa Pangeran Sihanouk itu sendiri berulang kali menyatakan bahwa Khmer Merah akan menyingkirkannya sekali mereka mengetahui bahwa manfaat diplomatik dan legalnya telah melayani maksud mereka.

Lalu apakah prospek-prospek untuk suatu penyelesaian? Kalau saya diizinkan menyampaikan pandangan saya, bersama unsur-unsur yang menyertainya, masalah Kampuchea berkisar pada faktor-faktor berikut. Di tingkat makro-strategi terakhir, faktor geo-strategis masalah Kampuchea yang paling menonjol ialah permusuhan antara Cina dan Vietnam, yang merupakan ungkapan antagonisme tradisional dan historis yang menjadi lebih sengit dan tajam akibat sifat hubungan Cina-Soviet sekarang ini. Dengan demikian, dalam hal ini, suatu ulangan seruan agar dicapai sepakat kata antara Cina, Vietnam dan Uni Soviet rupanya merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Mengenai isyu itu ada isyarat-isyarat berlanjut (dan kadang-kadang bertentangan) antara Beijing dan Moskwa. Tetapi saya merasa bahwa ASEAN mungkin harus mengarahkan seruan kolektifnya lebih langsung kepada ketiga negara komunis itu. Suatu pertemuan segi tiga antara Cina, Vietnam dan Uni Soviet dengan fokus Indocina akan merupakan suatu awal yang menggembirakan. Hasil pertemuan serupa itu kemudian bisa dibandingkan dengan posisi ASEAN yang dibatasi di atas.

Kedua, akses ke sumber-sumber kekuatan tandingan, termasuk kekuatan diplomatik di PBB dan lain-lain forum internasional, harus dipertahankan, tetapi *tidak* dengan maksud untuk memojokkan Vietnam mengenai Kampuchea.

Negara-negara ASEAN secara konsisten berusaha meyakinkan Pemerintah Cina, bahwa penyelesaian politik menyeluruh yang diinginkan harus memperhatikan kepentingan *semua* pihak yang bersangkutan. Akan tetapi kalau Pemerintah Cina tidak bersedia menerima pemindahan pemerintah di Phnom Penh dan berkeras menginginkan peranan Khmer Merah sebagai kekuatan dominan dalam suatu koalisi rujuk nasional, maka prospek penyelesaian akan tetap suram.

Mengenai pelaksanaan transisi damai ke suatu pemerintah rujuk nasional, paling tidak asas-asas umum berikut harus disetujui. *Pertama*,

penarikan pasukan Vietnam seperti diserukan oleh masyarakat internasional selama empat tahun terakhir. Kalau Vietnam merasa bahwa penarikan semacam itu harus diimbangi konsesi ASEAN, Himbauan Bersama ASEAN 6 September 1983 memberikan suatu jalan yang baru, walaupun modes, yaitu penarikan bertahap dari perbatasan Muangthai-Kampuchea.

Kedua, penarikan pasukan Vietnam harus diawasi oleh satuan-satuan semua pihak yang bersangkutan. Jumlah pihak yang bersangkutan itu bisa disetujui sebelumnya, sambil memperhatikan keprihatinan Vietnam dan rezim Heng Samrin mengenai kedaulatan. Ini akan berarti kehadiran sementara pasukan multinasional seluruhnya atau sebagian di bawah pengawasan PBB. Kasus pihak-pihak jauh tetapi berkepentingan seperti Australia dan Perancis bisa dipertimbangkan kalau kehadiran pasukan ASEAN oleh Vietnam dan rezim Heng Samrin dianggap terlalu memihak.

Ketiga, semua fraksi Khmer, termasuk rezim Heng Samrin harus menyetujui diadakannya pernyataan bebas oleh rakyat Khmer. Mula-mula pernyataan itu bisa dilakukan berdasarkan suatu referendum, yang akan disusul pemilihan umum mengenai pembentukan suatu pemerintah rujuk nasional Khmer yang lengkap. Referendum dan pemilihan itu bisa diadakan di bawah pengawasan badan atau kelompok negara yang mengawasi penarikan pasukan Vietnam.

Keempat, untuk menghindari pertumpahan darah akibat permusuhan dan dendam yang lampau, harus ada suatu program rekonstruksi dan pembangunan nasional yang baru, yang berdasarkan rekonsiliasi, kedaulatan, non-campur tangan dan sikap non-blok. Program rekonstruksi dan pembangunan nasional itu haruslah suatu model usaha nasional yang akan membuktikan bahwa kendati penderitaannya yang hebat dan pahit di masa lampau, bangsa Khmer bisa lahir kembali melalui persatuan nasional berdasarkan kebebasan, pemerintah demokratis dan persamaan kesempatan serta keadilan untuk semua. Negara-negara Non-Blok hendaknya juga menghimbau masyarakat internasional agar memberikan bantuan cuma-cuma kepada pemerintah baru itu untuk rekonstruksi nasional, sehingga bangsa Kampuchea bisa meneruskan pembangunan internnya tanpa tekanan-tekanan dan campur tangan politik dan militer asing yang tidak pada tempatnya.

Sudah barang tentu program rekonstruksi dan pembangunan nasional ini harus memperhatikan seluruh pimpinan fraksi dalam masyarakat Khmer yang lebih besar. Namun saya penuh harapan, bahwa kalau persetujuan-persetujuan dan prosedur-prosedur bisa diadakan dari tingkat paling bawah sampai eselon-eselon tertinggi birokrasi yang disusun kembali, perbedaan-perbedaan itu bisa diminimalkan dan akhirnya disingkirkan.

Saya menyadari, bahwa sisa-sisa masalah mengenai ideologi dan manuver politik akan tetap di dalam dan di luar pemerintah nasional. Ini tidak dapat dihindari, mengingat sifat dan tahan lamanya kepahitan yang kita saksikan selama 15 tahun terakhir ini di negeri itu.

Sudah barang tentu saya menyadari, bahwa argumen-argumen yang saya ajukan ini tak lain ialah goresan-goresan tentatif (coba-coba), gagasan-gagasan pendahuluan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka yang memikirkan prospek jangka pendek maupun jangka panjang Kampuchea dan sebenarnya juga seluruh Asia Tenggara.

Pada analisa terakhir, alternatifnya terlalu menakutkan untuk dipikirkan. Kalau fraksi-fraksi dan unsur-unsur pimpinan kelompok-kelompok Khmer bertekad bahwa tujuan mereka masing-masing adalah penghancuran semua kekuatan tandingan lainnya, maka kita akan menyaksikan meningkatnya kasus-kasus kekejaman, kematian dan berlanjutnya penderitaan bangsa Kampuchea.

Mungkin satu-satunya cara untuk membujuk teman-teman Khmer saya ialah menceriterakan kembali pengalaman-pengalaman Indonesia yang lampau dengan pemberontakan, gerakan-gerakan separatis dan fanatisme keagamaan maupun ideologis. Semuanya itu mendatangkan penderitaan bagi bangsa Indonesia, tetapi untungnya tidak satu pun berhasil merebut kekuasaan.

Bangsa Kampuchea telah menderita cukup lama akibat tekanan-tekanan internasional dan regional. Jelas mereka tidak dapat menderita putaran kekejaman dan kebencian yang lain lagi yang diakibatkan atau dilakukan oleh sesama warga bangsa mereka atau suatu permainan kekuatan-kekuatan asing yang tidak bisa dibenarkan.

Akhirnya, Indonesia bersama rekan-rekan ASEAN lainnya akan terus mencari suatu penyelesaian politik untuk masalah Kampuchea atas dasar resolusi-resolusi PBB dan dalam kerangka Deklarasi KIK.

Dalam usahanya mencari suatu penyelesaian masalah Kampuchea itu, ASEAN sepakat untuk menerima segala usul dari sumber mana pun asal usul itu berada dalam kerangka KIK. Negara-negara anggota ASEAN selanjutnya sepakat untuk memelihara kontak-kontak dengan Vietnam sambil tetap berpegangan pada asas-asas yang ditetapkan dalam resolusi-resolusi PBB mengenai Kampuchea

Indonesia membatasi bantuannya untuk perjuangan yang dipimpin oleh Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratis di bawah Pangeran Norodom

Sihanouk pada dukungan politik dan bantuan kemanusiaan, seperti pakaian dan bantuan medis. Indonesia tidak memberikan senjata.

Dalam hubungan bilateral, Indonesia akan terus mengusahakan *đàn* memelihara hubungan bersahabat dengan Vietnam, kendati adanya perbedaan pandangan mengenai masalah Kampuchea, dengan maksud untuk mencegah Vietnam merasa terpencil. Indonesia tidak beranggapan bahwa kebijaksanaan ASEAN mengenai masalah Kampuchea merupakan suatu kendala atas hubungan bilateral antara Vietnam dan Indonesia.

Itulah beberapa gagasan mengenai masalah Kampuchea: Retrospek dan Prospek.

Kerjasama Ekonomi di antara Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara*

Hadi SOESASTRO

PENDAHULUAN

Bila digabungkan, jumlah penduduk dari 10 negara di Asia Tenggara pada tahun 1981 mencapai 363 juta.¹ Ditinjau dari jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara terbesar (41% dari jumlah keseluruhan) dan Brunei Darussalam yang baru saja merdeka merupakan negara yang terkecil (kurang dari 0,1%). Tetapi Brunei merupakan negara terkaya di kawasan ini dengan GNP per kapita lebih dari US\$ 20.000, suatu jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat di negara-negara lainnya di kawasan ini, yaitu antara kurang dari US\$ 100 dan US\$ 6.000 (Singapura) pada tahun 1981.

Perbedaan-perbedaan di antara kesepuluh negara itu dapat ditemui dalam banyak hal, tetapi kesamaan-kesamaan juga ada di antara beberapa dari mereka. Perbedaan-perbedaan dalam struktur ekonomi -- dan karenanya, komplementaritas antara ekonomi-ekonomi -- tampaknya terlalu ditonjolkan sebagai persyaratan bagi kerjasama ekonomi. Hal ini mungkin merupakan faktor yang penting jika sasaran utamanya adalah peningkatan perdagangan intra-regional. Di lain pihak, juga dapat dijumpai bahwa persamaan-persamaan di antara negara-negara dapat menjadi pendorong bagi penggabungan kekuatan (*pooling of resources*) secara terorganisasi untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang tertentu. Faktor-faktor ekonomi apa yang penting untuk mendorong kerjasama ekonomi tidak dapat dinyatakan secara *a priori*. Memang, kerjasama ekonomi dapat mengambil banyak bentuk.

*Terjemahan makalah "Economic Cooperation among Countries in Southeast Asia," yang disampaikan pada Seminar Indonesia-Vietnam di Hanoi, 25-26 Pebruari 1984. Diterjemahkan oleh Endi RUKMO.

¹Sepuluh negara itu adalah Brunei, Birma, Indonesia, Kampuchea, Laos, Malaysia, Pilipina, Singapura, Muangthai dan Vietnam.

Sejak tahun 1967, lima negara Asia Tenggara bersatu dalam suatu kelompok kerjasama ekonomi yang sekarang telah begitu terkenal dengan sebutan ASEAN. Anggota keenam, Brunei, baru saja bergabung dengan organisasi itu. Apa pun yang menjadi alasan terbentuknya ASEAN, ada kemauan politik dari negara-negara itu dan komitmen untuk itu semakin diperkuat karena ASEAN lambat-laun telah menjadi suatu kenyataan hidup dan alam pikiran di setiap negara anggotanya.

Dari berbagai program kerjasama ekonomi yang telah diperkenalkan ASEAN selama ini beberapa telah menunjukkan hasil yang mengagumkan, tetapi lainnya hanya tinggal di atas kertas belaka. Sementara menyadari akan adanya beberapa kesulitan yang biasanya dihadapi di dalam suatu kerjasama ekonomi regional, khususnya di antara negara-negara sedang berkembang -- seperti ditunjukkan oleh kegagalan kerjasama di antara negara-negara Amerika Latin -- negara-negara ASEAN tetap yakin akan keuntungan yang dapat diperoleh dari organisasi itu di masa yang akan datang.

Tulisan ini mencoba untuk menyoroti beberapa isu umum mengenai kerjasama ekonomi regional di Kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan di antara negara-negara sedang berkembang pada umumnya.

MENGENAI KERJASAMA EKONOMI

Ada banyak alasan mengapa beberapa negara ingin bergabung dalam suatu bentuk kerjasama ekonomi. Pendorong untuk kerjasama itu mungkin saja bersifat ekonomi semata-mata, tetapi dapat pula didasarkan pada motivasi-motivasi politik. Sering orang melontarkan pertanyaan seperti berikut ini: "Dapatkah kerjasama ekonomi meningkatkan solidaritas politik?" Suatu pertanyaan yang ada kaitannya dengan pertanyaan ini juga telah diajukan: "Apakah kerjasama ekonomi dapat dilangsungkan tanpa adanya solidaritas politik?"

Kedua pertanyaan di atas tampaknya terlalu bersifat akademis. Oleh karenanya, marilah kita sebentar melihat pengalaman-pengalaman ASEAN. Sejak semula ASEAN telah menghindari membuat suatu "cetak-biru" yang ambisius. Sebagai gantinya, kelima negara anggota ASEAN sepakat untuk merencanakan sasaran-sasaran yang sederhana, didefinisikan dalam bentuk yang sangat umum, sehingga tidak membuat kaku organisasi itu. Keluwesan merupakan sifat organisasi yang dijunjung tinggi. Sifat lainnya adalah pragmatisme. Para pemimpin ASEAN pada tahun 1967 sadar sepenuhnya akan batas-batas dari kerjasama itu. Integrasi ekonomi tidak pernah menjadi sasaran. Mereka juga tidak pernah mempertimbangkan beraneka cara atau tahapan kerjasama seperti yang dianjurkan oleh buku teks ekonomi.

Apa yang telah ditetapkan oleh para pemimpin ASEAN terbukti merupakan jalan yang paling realistis. Mereka telah menekankan perlunya keluwesan organisasi dan pendekatan yang pragmatis dalam menangani kerjasama ekonomi, karena mereka percaya -- seperti terbukti kebenarannya -- bahwa hanya bila diatur dengan cara seperti itu kerjasama ekonomi di antara kelima negara ASEAN dapat bermanfaat. Keyakinan ini ternyata tidak tergoyahkan oleh berbagai kritik baik dari dalam maupun dari luar ASEAN yang tidak sabar melihat kemajuan perkembangan ASEAN.

Karena sifatnya yang pragmatis, pendekatan-pendekatan ASEAN dalam kerjasama ekonomi pada umumnya tidak ideologis. Penggabungan kekuatan, seperti yang dimanifestasikan dalam hubungan dengan pihak-pihak "ketiga" -- yaitu dengan partner dagang utama ASEAN seperti Jepang, Amerika Serikat, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan negara-negara lainnya -- didasarkan pada kebutuhan. Dialog-dialog ASEAN, yang dianggap sebagai kegiatan ASEAN yang paling berhasil, telah membawa hasil yang menguntungkan ASEAN. Meskipun dialog-dialog ini mengandung sifat Utara-Selatan yang diakui oleh kedua belah pihak, namun ASEAN tetap mempertahankan sikapnya yang pragmatis.

Dialog Utara-Selatan seperti yang dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN dalam kerangka regional telah membawa lebih banyak hasil yang konkrit dibandingkan dengan dalam perundingan-perundingan tingkat global yang mengalami jalan buntu. Meskipun demikian, ASEAN tetap mempertahankan peranan aktifnya di banyak forum global guna ikut memecahkan masalah-masalah pembangunan dunia, khususnya Dunia Ketiga. Di dalam dialog Utara-Selatan, ASEAN mengambil posisi moderat, dan secara aktif mendukung ide kerjasama Selatan-Selatan yang bermula dari Gerakan Non-Blok. Sehubungan dengan kerjasama Selatan-Selatan itu, ASEAN mengambil sikap yang tegas: berdasarkan pengalamannya di dalam meningkatkan kerjasama di antara negara-negara tetangga yang sedang berkembang, ASEAN melihat pentingnya memperkuat ASEAN terlebih dahulu untuk bisa secara serius meningkatkan kerjasama di antara negara-negara sedang berkembang (Economic Cooperation among Developing Countries - ECDC) dan kerjasama teknik di antara negara-negara sedang berkembang (Technical Cooperation among Developing Countries - TCDC), seperti yang digariskan oleh "Arusha Programme for Collective Self-Reliance and Framework for Negotiations."

Seperti yang telah dianjurkan, "realisme menuntut bahwa kerjasama (Selatan-Selatan) pada tahap pertama, dilaksanakan antara sejumlah kecil negara untuk mencapai sasaran yang disepakati bersama, dan jelas tidak secara global."¹ Secara individu, setiap negara ASEAN telah meningkatkan

¹Lihat, Mahbub Ul-Haq, "Beyond the Slogan of South-South Cooperation," dalam *World Development*, Vol. 8, No. 10 (Oktober 1980), hal. 751.

usaha-usaha untuk berpartisipasi dalam beberapa program ECDC dan TCDC. Sebagai contoh, Indonesia telah meningkatkan bantuan tekniknya di bawah TCDC sejak tahun 1981 kepada sejumlah negara seperti Bangladesh, Papua Nugini, dan Tanzania, mencakup berbagai bidang, termasuk proyek-proyek perumahan rakyat, pembangunan pertanian, pembangunan telekomunikasi, dan keluarga berencana. Tetapi kiranya pada waktunya dapat diharapkan bahwa negara-negara ASEAN sebagai suatu kelompok akan bekerjasama meningkatkan ECDC dan TCDC.

Setiap usaha kerjasama tersebut kiranya akan memberikan prioritas pada kerjasama dengan negara-negara tetangga ASEAN sendiri. Ini dapat saja ditujukan ke negara-negara di Kawasan Asia Selatan atau negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan, tetapi bisa juga difokuskan di Kawasan Asia Tenggara sendiri. Beberapa langkah telah diambil untuk meningkatkan kerjasama antar-regional, seperti antara Sekretariat ASEAN dan Dewan Ekonomi Pasifik Selatan (South Pacific Economic Council - SPEC). Kerjasama antara ASEAN dan Kawasan Asia Selatan akan tergantung pada kemajuan ketujuh negara Asia Selatan dalam memperkuat SARF (South Asia Regional Forum), yang didirikan pada tahun 1981. Kecenderungan di banyak wilayah di dunia sekarang ini memang ke arah regionalisme, dan ECDC dan TCDC mendukung perkembangan ini.

Karena ASEAN hanya terdiri dari 6 negara dari 10 negara di Asia Tenggara, masalah yang muncul adalah mengenai kerangka kerjasama melalui mana kerjasama ekonomi antara ke-10 negara itu dapat ditingkatkan. Dua kemungkinan telah diusulkan dari waktu ke waktu. *Pertama*, adalah kemungkinan untuk memperluas keanggotaan ASEAN yang pada akhirnya mencakup ke-10 negara di Asia Tenggara itu. Masuknya Brunei baru-baru ini ke dalam ASEAN dapat dilihat sebagai akibat yang wajar dan logis dari kemerdekaannya. Tetapi sistem manajemen ekonomi yang dipraktekkan oleh negara itu telah mempermudah negara itu bergabung dengan ASEAN. Di sini terletak perbedaan dengan ke-4 negara lainnya di Asia Tenggara. Birma, meskipun setahap demi setahap membuka sistem ekonominya dari isolasi yang telah berlangsung sekitar satu dasawarsa, pada dasarnya tetap melanjutkan kebijaksanaan ekonomi tertutup di mana alokasi sumber-sumber dalam negeri tetap tidak terpengaruh oleh perdagangan internasional. Vietnam dan Laos telah memilih sistem ekonomi yang berbeda yang dalam banyak hal membutuhkan jawaban-jawaban yang berbeda dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang juga berbeda dari apa yang dihadapi di negara-negara ASEAN. Walaupun demikian, di waktu yang lalu ASEAN pernah mengambil inisiatif untuk mengundang negara-negara Indocina dan Birma untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ASEAN sebagai peninjau.

Kemungkinan kedua ditujukan kepada suatu hubungan kerjasama antara ASEAN dan suatu asosiasi ekonomi sub-regional yang mungkin muncul di antara negara-negara Indocina pada waktu-waktu mendatang. Birma dapat memilih untuk bergabung dalam salah satu dari asosiasi-asosiasi itu (atau keduanya). Pandangan ini mendasarkan pada proposisi bahwa suatu kerjasama ekonomi regional dapat berjalan hanya di antara negara-negara yang menganut sistem ekonomi yang sama, tetapi pada waktu yang sama membuka kemungkinan bagi peningkatan hubungan kerjasama di antara asosiasi-asosiasi yang berbeda itu.

Kemungkinan mana pun yang dipilih, tidak sedikit orang mempersoalkan masalah hubungan antara kerjasama ekonomi dan solidaritas politik. Sejumlah orang bahkan melihat ruang lingkup yang sangat terbatas di Asia Tenggara untuk mengembangkan salah satu dari kemungkinan-kemungkinan di atas. ASEAN di pihaknya berkepentingan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan memperkuat solidaritas politik di antara anggota-anggotanya maupun di antara semua negara di Kawasan Asia Tenggara. Tetapi pendekatan-pendekatannya yang pragmatis mengamanatkan bahwa prioritas diberikan kepada apa-apa yang sudah ada secara pasti. ASEAN tidak mempromosikan atau mengusahakan persetujuan-persetujuan untuk perluasan organisasi tersebut demi perluasan itu sendiri. Permintaan Srilangka merupakan suatu kasus yang bisa dijadikan contoh.

Walaupun tidak terdapat suatu pola kerjasama ekonomi regional, tidak dapat disangkal, bahwa hubungan ekonomi bilateral antara negara-negara Asia Tenggara bukan tidak berarti. Masih terbuka untuk spekulasi apakah hubungan semacam itu mungkin dapat berkecambah ke arah pola kerjasama yang lebih terstruktur di masa yang akan datang. Marilah kita menilai hubungan perdagangan di antara ke-10 negara Asia Tenggara.

HUBUNGAN EKONOMI DI ANTARA NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA

Perdagangan merupakan manifestasi yang paling menyolok dari hubungan ekonomi antar negara. Meskipun perdagangan *per se* seharusnya tidak dilihat sebagai sasaran akhir dari hubungan ekonomi, hubungan perdagangan banyak mengungkapkan tentang struktur ekonomi-ekonomi yang bersangkutan. Struktur-struktur ekonomi -- perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antara negara satu dan lainnya -- itulah yang mempengaruhi tingkat dan pola maupun prospek perdagangan antara negara-negara.

Tulisan ini tidak akan menganalisa akibat-akibat perubahan struktur ekonomi di negara-negara Asia Tenggara terhadap struktur perdagangan mereka. Tetapi tulisan ini akan dibatasi pada beberapa hal yang menarik mengenai pola perdagangan negara-negara itu agar dapat diketahui bidang-bidang mana yang perlu diteliti lebih jauh guna peningkatan kerjasama.

Tabel-tabel 1 dan 2 menunjukkan matriks perdagangan ekspor dan impor antar negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, yang langsung menunjukkan dominasi perdagangan ekspor dan impor dari keenam negara ASEAN. Dari total ekspor di antara ke-10 negara yang berjumlah sekitar US\$ 13,26 milyar pada tahun 1980, sekitar 96,5% merupakan ekspor antar negara-negara ASEAN. Di sektor impor, perdagangan antar negara-negara ASEAN mencapai 96%.

Pada tahun 1980, ekspor dari ASEAN (6) ke ke-4 negara non-ASEAN berjumlah hanya US\$ 284 juta, atau 2,2% dari seluruh ekspor antar negara ASEAN. Demikian juga, impor ASEAN dari ke-4 negara non-ASEAN hanya berjumlah sekitar US\$ 190 juta, atau 1,6% dari total impor antar negara ASEAN. Seperti yang dapat diduga sebelumnya, Singapura memainkan peranan dominan dalam perdagangan antar negara-negara ASEAN (6) dan ke-4 negara non-ASEAN itu. Pada tahun 1980, ekspornya mencapai 57% dari ekspor ASEAN ke negara-negara di kawasan ini, dan 48% dari impor ASEAN dari ke-4 negara non-ASEAN tersebut.

Perlu dicatat bahwa perdagangan antar negara-negara ASEAN saat ini hanya mencapai sekitar 16% dari seluruh perdagangan ASEAN, suatu jumlah yang tidak jauh berbeda dengan tingkatan pada tahun 1974, yaitu 13%. Peningkatan yang lambat dalam perdagangan antar negara-negara ASEAN ini mengundang suatu evaluasi kritis dalam ASEAN sendiri mengenai manfaat dari *Preferential Trading Arrangements* (PTA) yang diperkenalkan tahun 1977. Pada gilirannya hal ini telah membawa suatu konsensus baru di dalam ASEAN, yaitu bahwa perdagangan jangan dijadikan pusat perhatian, tetapi kerjasama hendaknya difokuskan pada bidang-bidang yang dapat meningkatkan pembangunan industri dan pengembangan sumber-sumber alam bersama, yang pada akhirnya akan direfleksikan dalam struktur perdagangan ASEAN. Usaha-usaha dalam bidang-bidang ini menghendaki adanya perubahan-perubahan struktural dan penyesuaian-penyesuaian di setiap negara ASEAN. Tugas-tugas ini tampaknya menjadi fokus program ASEAN sekarang ini.

Perdagangan Vietnam dengan negara-negara ASEAN meliputi sekitar 10% dari total perdagangan, dan pada dasarnya pola perdagangan Vietnam tidak jauh berbeda dengan pola perdagangan negara-negara ASEAN dalam arti bahwa perdagangan dengan negara-negara maju lebih dominan daripada

Tabel 1

Matriks Ekspor Intra-Regional Tahun 1980 (dalam jutaan US\$)

Ekspor ke dari	Brunei	Indonesia	Malaysia	Pilipina	Singapura	Thailand	ASEAN (6)	Birma	Kampuchea	Laos	Vietnam	Asia Tenggara (10)
Brunei	—	—	1	54	180	197	432	—	—	—	—	432
Indonesia	—	—	60	181	2.484	35	2.760	1	—	—	—	2.761
Malaysia	23	34	—	198	2.480	188	2.924	20	—	—	—	2.944
Pilipina	3	107	94	—	113	63	380	—	3	•	6	389
Singapura	277	(936)	2.908	273	—	844	5.238	67	27	19	49	5.400
Thailand	9	237	292	24	503	—	1.065	3	32	45	12	1.157
ASEAN (6)	312	1.314	3.355	730	5.760	1.327	12.799	91	62	64	67	13.083
Birma	•	46	30	—	63	10	149	—	—	—	—	149
Kampuchea	—	—	—	—	(2)	—	2	—	—	—	—	2
Laos	—	•	1	—	2	2	5	—	—	—	—	5
Vietnam	—	•	•	—	16	1	17	—	—	—	—	18
Asia Tenggara (10)	312	1.360	3.386	730	5.843	1.340	12.972	91	63	64	67	13.257

Catatan: Angka dalam kurung merupakan data yang dilaporkan oleh partner dagangnya.

Sumber: IMF, *Direction of Trade Statistics*, 1982 Yearbook.

Tabel 2

Matriks Impor Intra-Regional Tahun 1980 (dalam jutaan US\$)

Impor dari ke	Brunei	Indonesia	Malaysia	Filipina	Singapura	Thailand	ASEAN (6)	Birma	Kampuchea	Laos	Vietnam	Asia Tenggara (10)
Brunei	—	•	26	4	305	10	345	—	—	—	—	345
Indonesia	—	—	36	90	936	288	1.350	50	—	—	—	1.400
Malaysia	1	81	—	107	1.265	320	1.774	32	—	1	—	1.807
Filipina	60	194	162	—	133	22	571	—	—	—	—	571
Singapura	199	(2.484)	3.323	75	—	475	6.556	70	2	2	18	6.648
Thailand	217	45	166	78	599	—	1.105	11	—	2	1	1.119
ASEAN (6)	477	2.804	3.713	354	3.238	1.115	11.701	164	2	5	19	11.890
Birma	—	1	22	•	74	3	100	—	—	—	—	100
Kampuchea	—	—	—	(3)	(27)	(32)	62	—	—	—	—	62
Laos	—	•	—	•	20	49	69	—	—	—	1	70
Vietnam	—	—	•	7	54	14	75	—	—	7	—	82
Asia Tenggara (10)	477	2.805	3.735	364	3.413	1.215	12.007	164	2	12	20	12.204

Catatan: Angka dalam kurung merupakan data yang dilaporkan oleh partner dagangnya.

Sumber: IMF, *Direction of Trade Statistics*, 1982 Yearbook.

perdagangan dengan negara-negara yang sedang berkembang. Demikian pula, perdagangan Vietnam dengan negara-negara Pasifik Barat -- dengan negara-negara sedang berkembang dan negara-negara maju -- berjumlah lebih dari separuh dari total perdagangannya, suatu hal yang juga ditunjukkan oleh negara-negara ASEAN lain. Persamaan ini juga dapat dilihat pada Birma dan Laos. Namun pada tahun 1981 impor Laos dari negara-negara ASEAN mencapai jumlah 51% dari seluruh impornya, dan lebih dari sepertiga ekspor Birma ditujukan ke negara-negara ASEAN. Tidak ada data lengkap mengenai perdagangan Kampuchea. Pada tahun 1981 tampaknya sekitar 96% dari impornya berasal dari Uni Soviet, tetapi hanya 7% dari eksportnya ditujukan ke Uni Soviet. Adalah mungkin bahwa sebagian ekspor Kampuchea ditujukan ke negara-negara Pasifik Barat.¹

Pola khusus dari arah perdagangan (*trade direction*) seperti yang ditunjukkan oleh negara-negara Asia Tenggara untuk sebagian besar berhubungan dengan jenis barang yang diperdagangkan. Impor barang-barang industri mendominasi impor negara-negara Asia Tenggara, suatu gambaran yang demikian umum di antara kebanyakan negara sedang berkembang. Karena banyak dari perdagangan itu adalah dalam barang-barang industri, khususnya barang-barang modal, negara-negara sedang berkembang harus bersaing dengan impor dari negara-negara maju.

Jumlah impor barang-barang industri di negara-negara Asia Tenggara relatif tinggi. Tahun 1979 jumlah itu mencapai lebih dari 70% dari total impor Brunei dan Birma, antara 50% dan 60% dari seluruh impor Singapura, Laos, Kampuchea, Indonesia dan Malaysia, dan antara 45-50% dari seluruh impor Filipina dan Muangthai. Impor bahan bakar mineral menduduki tempat kedua terbesar dari impor Muangthai, Singapura dan Filipina, sedangkan untuk Laos dan Kampuchea tempat kedua diduduki oleh impor bahan makanan.

Di bidang ekspor, tampak gambaran yang lebih beraneka-ragam. Ekspor makanan mendominasi perdagangan Muangthai dan Birma. Bahan bakar mineral mendominasi ekspor Brunei dan Indonesia. Saham bahan-bahan mentah (tidak termasuk bahan bakar) merupakan yang tertinggi dari ekspor Malaysia, Filipina, Kampuchea (1972) dan Laos (1974). Singapura merupakan satu-satunya negara di kawasan ini dengan saham ekspor barang-barang industri yang terbesar. Hal ini kiranya menerangkan mengapa Singapura memainkan peranan penting dalam perdagangan baik antar negara-negara ASEAN maupun antara ASEAN dan keempat negara non-ASEAN. Perdagangan Muangthai dengan kedua tetangga dekatnya, yaitu Laos dan Kampuchea, juga cukup penting.²

¹Penjelasan ini berasal dari IMF, *Direction of Trade Statistics*, 1982 Yearbook.

²Informasi yang paling baru mengenai struktur-struktur perdagangan dapat diperoleh di ESCAP, *Statistical Yearbook for Asia and the Pacific* 1981.

Tinjauan mengenai hubungan perdagangan di atas dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi dari setiap negara-negara Asia Tenggara, dan dapat pula menunjukkan bidang-bidang mana yang cukup potensial untuk peningkatan kerjasama ekonomi. Peningkatan dalam perdagangan dapat dicapai melalui pengenalan yang lebih baik dari pasar-pasar dan dengan membentuk suatu mekanisme perdagangannya, tetapi pada umumnya usaha ini mungkin hanya mengakibatkan peralihan perdagangan (*trade diversion*) dan bukan penciptaan perdagangan (*trade creation*) yang seharusnya menjadi sasaran. Penciptaan perdagangan dapat dicapai melalui kerjasama dalam pengembangan pertanian, sumber-sumber alam, dan khususnya sektor industri. Telah dibuktikan bahwa negara-negara yang berhasil meningkatkan pembangunan, khususnya di sektor industri, akan memperoleh kesempatan-kesempatan yang lebih besar untuk melakukan perdagangan internasional dan dengan demikian akan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui efisiensi yang lebih besar dalam produksi dan konsumsi, suatu dalil yang dipegang teguh oleh para teoretisi dalam bidang perdagangan internasional.

Kemungkinan Kerjasama Ekonomi antara Vietnam dan Negara-negara di Asia Tenggara*

DOAN TRONG TRUYEN

Dalam kaitannya dengan tujuan penting dan kemungkinan-kemungkinan kerjasama ekonomi antara Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, pertama-tama kami akan memulainya sebagai berikut:

Pertama, dalam kondisi dunia sekarang ini perdamaian dan stabilitas merupakan persyaratan mutlak bagi pembangunan semua negara dan bangsa dan kerjasama ekonomi antar bangsa atas dasar persamaan, penghormatan kemerdekaan nasional, kedaulatan, integritas wilayah dan saling menguntungkan adalah faktor hakiki bagi perdamaian dan stabilitas.

Kedua, dalam era sekarang, suatu bangsa yang mengisolasi dirinya dari dunia luar tidak dapat berkembang secara normal, dan kerjasama ekonomi antar bangsa yang berbeda sistem telah merupakan praktek yang berlaku umum dalam hubungan ekonomi internasional. Hal ini semakin penting bagi negara tetangga yang menghadapi kondisi yang sama dalam sejarah masa lalu, dan yang telah memiliki hubungan tradisional dan sekarang mengecap kondisi yang lebih baik dalam perhubungan dan komunikasi dengan menekan ongkos angkut yang rendah karena mereka terletak dalam wilayah geografi yang sama.

Ketiga, masalah kerjasama ekonomi antara negara-negara yang sedang berkembang memikul suatu dimensi strategis khusus untuk mendirikan suatu Tata Ekonomi Internasional Baru yang ditandai oleh keadilan dan persamaan. Hal ini merupakan sesuatu yang mendesak saat ini karena akibat berat dari

*Terjemahan makalah yang disampaikan pada Seminar Indonesia-Vietnam di Hanoi, 25-26 Februari 1984. DOAN TRONG TRUYEN adalah seorang ahli ekonomi. Diterjemahkan oleh redaksi *Analisa*.

resesi yang berkepanjangan, krisis inflasi dalam ekonomi dunia yang telah memukul berat negara-negara berkembang pada umumnya dan negara-negara Asia Tenggara pada khususnya, melalui perdagangan, keuangan dan saluran kredit.

Berangkat dari hal yang disebut di atas, kami akan mengomentari dua masalah: *satu*, dasar-dasar umum bagi kerjasama ekonomi antara Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya; *kedua*, arah dan kemungkinan suatu kerjasama yang realistis dalam konteks ekonomi di wilayah ini dewasa ini.

Seperti kita ketahui, Asia Tenggara memiliki potensi yang berlimpah yang dapat menjadikannya suatu wilayah yang serba makmur atas dasar penggalian yang efisien dan sangat rasional serta memanfaatkan sumber alam dan tenaga kerja yang melimpah. Di lain pihak, sudah sejak lama, Asia Tenggara menjadi pusat konflik di antara imperialis, ekspansionis dan kekuatan hegemonis yang ingin menguasai sumber-sumber seluruh negara di wilayah ini. Konsekuensi ekonomi dan sosial dari dominasi ekonomi oleh kolonial lama dan baru telah tertanam di wilayah secara dalam dan pengaruhnya tidak dapat dikatakan sama sekali telah dihancurkan. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, telah terjadi perubahan di antara negara imperialis yang melakukan kebijaksanaan ekspansionis dan hegemonis di kawasan dan seterusnya mereka telah melakukan penyesuaian dalam hubungannya dengan negara-negara Asia Tenggara. Tetapi ambisi baru kekuatan imperialis, ekspansionis dan hegemonis atas sumber-sumber di kawasan masih tetap merupakan ancaman bagi semua bangsa. Baik jangka pendek maupun jangka panjang kami beranggapan bahwa suatu negara besar dengan kebijaksanaan hegemonis dan ekspansionis yang dijalankan oleh pimpinan-pimpinannya sekarang, dengan penduduk satu milyar orang dan dengan dasar yang telah dibangun sejak dahulu dalam politik, ekonomi dan kehidupan sosial di wilayah ini, adalah negara yang tidak akan dengan mudah meninggalkan tradisi mimpi-mimpi ekspansionisnya. Ancaman ini bukan hanya ada di bidang politik dan militer, tetapi juga dalam bidang ekonomi, seperti ditunjukkan dalam kebijaksanaan ekonomi ekspansionis khusus, dalam taktik seperti *dumping*, monopoli, sabotase, yang bergandengan dengan usaha menguasai sumber alam di daratan utama dan perairan strategis dari Asia Tenggara. Kami tidak beranggapan bahwa ada kekuatan di Asia lainnya yang memiliki suatu kemampuan besar untuk ekspansi ekonomi dan sekarang menunjukkan arah yang berbahaya dari militerisasi dan persenjataan kembali dengan bantuan kekuatan imperialis nomor satu di dunia, dapat berhasil dalam kebijaksanaan ekspansionisnya dengan jalan agresi senjata. Tetapi ancaman besar bagi negara-negara Asia Tenggara adalah pertentangan dan kompromi di antara ketiga kekuatan besar dalam ambisi mereka terhadap wilayah.

Dalam melihat situasi ini, kami berpandangan bahwa kerjasama jangka pendek dan panjang antara negara-negara Asia Tenggara memainkan peranan yang sangat penting dan strategis dalam menciptakan faktor-faktor yang kuat dan stabil serta kondisi bagi proses pembangunan dari setiap bangsa.

Kedua, kami ingin mengemukakan bahwa walaupun berbeda dalam sistem sosial, semua negara di wilayah ini mulai dari keterbelakangan ekonomi dan oleh karenanya menghadapi kesulitan yang setiap negara tanpa membedakan rezim sosial harus memecahkannya dalam proses pembangunan. Kerjasama antar negara berdasarkan pertukaran pengalaman, berhasil atau tidak berhasil dengan tujuan memecahkan kesulitan yang sama, besar sumbangannya bagi penciptaan dasar-dasar yang positif dan kreatif dalam proses setiap negara berkembang ke arah suatu produksi agro-industri yang modern.

Ketiga, kami ingin menekankan bahwa melihat perbedaan-perbedaan dalam tingkat pembangunan/perkembangan, atau sesedikitnya dalam potensi-potensi, dengan kekuatan dan kelemahan yang berbeda, kedekatan geografis ekonomi ini dapat secara efisien menjadi saling melengkapi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi nasional dan pemecahan masalah sosial dan ekonomi utama dari setiap negara.

Masalah keempat, berkaitan dengan perdagangan internasional. Karena kesamaan kondisi alam, negara-negara di wilayah ini mengeksport produk pertanian dan mineral yang sama. Seperti diketahui, sampai sekarang, ekspor komoditi tersebut mengalami kerugian besar karena memburuknya dasar pertukaran dan ketidakstabilan harga dalam pasar dunia, dalam ukuran yang tidak kecil dan oleh karena itu memperkuat dampak negatif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Kami pikir bahwa kerjasama dan koordinasi tindakan dalam bidang pengolahan dan pemrosesan serta perdagangan dari komoditi-komoditi ini dengan tujuan mengurangi kerugian, meningkatkan nilai dari komoditi dan pendapatan ekspor adalah merupakan faktor penting bagi proses pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di wilayah ini.

Hal-hal yang disebut di atas terdiri dari dasar yang umum dan fundamental dalam mendirikan kerjasama jangka pendek dan jangka panjang di antara negara-negara di Asia Tenggara. Dengan kerangka seperti ini kami akan mengemukakan beberapa tujuan atau kemungkinan-kemungkinan kerjasama yang realistis antara Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam situasi ekonomi sekarang.

Vietnam yang berpenduduk 57 juta, sekarang ini berada dalam tahap awal industrialisasi. Usaha industrialisasi pertama dimulai begitu perang perlawanan

melawan kolonialisme Perancis berakhir. Tetapi proses ini tidak dapat dilakukan dalam jalan yang normal karena perang perlawanan yang kedua. Baru sejak tahun 1975 seluruh segi industrialisasi dilakukan dalam suasana yang sama sekali berlainan. Dalam tahap industrialisasi dewasa ini, kami harus memulai dengan pengembangan pertanian secara penuh, dan *pertama*, semua hasil pertanian, dalam usaha menciptakan dasar domestik yang kukuh bagi pengembangan industri.

Sehubungan dengan ini, kami merencanakan pertama, pengembangan industri-industri yang secara efisien dapat melayani produk-produk pertanian, mengkoordinasikan pertanian dengan industri dalam suatu struktur yang terintegrasi. Sejalan dengan pengembangan sumber-sumber daya energi, bahan-bahan baku dan fasilitas pengangkutan yang penting, kami harus mengembangkan wilayah-wilayah khusus untuk produk pertanian, produksi makanan yang dihubungkan dengan pabrik pengolahan. Dalam bidang pertanian, kami telah mengubah struktur produksi, melakukan revolusi hijau bersamaan dengan revolusi sosial, melakukan diversifikasi tanaman hasil pertanian dan binatang atas dasar penerapan ilmu pengetahuan baru dan penemuan teknologi dalam usaha memecahkan masalah pangan, bahan baku pertanian untuk industri pengolahan dan untuk ekspor.

Ini merupakan tugas yang berat. Masalahnya adalah bagaimana mendorong kekuatan-kekuatan produktif dalam bidang pertanian yang secara tradisional terbelakang dan diabaikan selama berabad-abad oleh pemerintah kolonial, dan sebagai akibatnya sekarang membutuhkan investasi modal yang besar, waktu, dan peralatan-peralatan yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanah serta kebiasaan bercocok tanam di wilayah tropis. Masalahnya adalah bagaimana mencapai swasembada dengan peningkatan penduduk yang masih tinggi, memperluas pasar domestik, menciptakan pekerjaan, mempengaruhi pembagian tenaga kerja sosial di dalam sektor pertanian, antara pertanian, kehutanan dan industri dalam suatu skala nasional dan dalam setiap wilayah, untuk mencapai pertumbuhan yang berimbang dari berbagai macam zone ekonomi sesuai dengan rencana umum dan mengalokasi kembali produksi agar secara cepat dapat menggali dan memanfaatkan secara efisien sumber-sumber nasional. Apakah kesulitan-kesulitan ini sampai tingkat tertentu sama dengan kesulitan yang ditemukan oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya?

Kami didorong oleh kenyataan bahwa sesudah usaha besar yang terus-menerus, sekarang Vietnam seperti beberapa negara di kawasan ini -- telah semakin mendekati tujuan yang memecahkan masalah pangan secara mendasar. Walaupun menghadapi kesulitan yang besar, dalam tahun 1983 produksi pangan hampir mencapai 17 juta ton dengan hasil rata-rata di beberapa daerah berkisar dari 5.800-6.000 kilogram per hektar (dalam kasus khusus dan

tidak termasuk tanaman percobaan, hasil tertinggi 15.000-20.000 kilogram per hektar yang dicapai dalam daerah yang luasnya beratus-ratus hektar). Kami memiliki jaringan irigasi yang secara relatif maju terdiri dari proyek dengan skala besar, menengah dan kecil, dan jaringan pembibitan dan percobaan pembibitan dan stasiun percobaan binatang-binatang, kehutanan dan perikanan yang tersebar sampai tingkat kampung yang secara relatif besar dan tenaga ahli ilmiah dan teknik yang bermacam-ragam.

Kami juga telah mendapatkan beberapa sukses permulaan dalam penerapan metodologi biologi terhadap kondisi tropis. Walaupun mengalami kekurangan-seriusan dalam pupuk kimia dan peralatan teknik, kami telah mencapai beberapa hasil yang menggiurkan dalam bidang hasil pertanian, dalam kualitas perkebunan, khususnya dalam bidang produksi pangan berkat penerapan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, berkombinasi dengan pengalaman yang baik dan tradisi-tradisi.

Kami telah berhasil dalam percobaan beberapa kali, yang sekarang dalam proses penerapan dalam pembangunan suatu model untuk membangun struktur *agro-forestry*, khususnya di daerah pedalaman. Tujuannya adalah untuk memperluas areal penanaman, untuk memenuhi kebutuhan makanan dan industri hasil pertanian dan dalam waktu yang bersamaan menghijaukan bukit yang gundul untuk mengembangkan kehutanan dan memperbaiki hutan yang rusak oleh perang kimia oleh Amerika Serikat yang telah meninggalkan banyak bahaya dan akibat jangka panjang.

Hasil-hasil permulaan yang membuka prospek baru ini masih jauh dari memadai bagi pemenuhan kebutuhan yang besar dan beraneka-ragam dalam usaha industrialisasi. Swasembada pangan masih berada pada tingkat yang rendah, yaitu rata-rata 300 kilogram per kapita, dan jumlah ini tidak memadai bagi pengembangan peternakan untuk melanjutkan ekspansi industri hasil pertanian dalam skala besar, meningkatkan tingkat nutrisi dan mengubah komposisi makanan dari masyarakat di seluruh negeri dan kebutuhan mendesak akan ekspor. Negara-negara Asia Tenggara lainnya mempunyai potensi besar dan hasil yang berarti dalam bidang ini, sehingga terdapat kemungkinan besar untuk menjalin hubungan ekonomi dalam bidang ini.

Terdapat kemungkinan besar untuk kerjasama dalam bidang tukar-menukar pengalaman dan informasi ilmiah yang menyangkut data meteorologi, benih dan tanaman, serta berbagai macam kegiatan dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan. Dalam bentuk kerjasama seperti yang dimaksudkan di atas selanjutnya dapat diteruskan kepada bidang produksi, pengolahan dan perdagangan alat-alat pertanian, pupuk dan mesin yang cocok bagi pertanian tropis. Langkah pertama adalah ke arah produksi yang

berskala besar, dan alat-alat serta mesin untuk mengolah bahan baku, dan produk pertanian, kehutanan dan perikanan yang oleh satu negara tidak dapat diproduksi sendiri. Kami pikir kepentingan strategis dari kerjasama dalam bidang ini tidak terletak hanya dalam penciptaan faktor fundamental bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dari setiap negara. Yang lebih penting adalah kesadaran pendirian oleh setiap negara atas dasar kemampuan kreatif menerapkan ilmu dan teknologi terhadap tanah tropis, iklim dan lingkungan secara tepat. Teknologi maju dari negara industri maju tidak merupakan substitusi untuk hal ini. Seperti dibuktikan oleh fakta di beberapa negara, hal ini juga merupakan faktor yang sangat penting untuk mengurangi kerusakan akibat bencana alam, polusi lingkungan dan kerusakan sistem ekologi dan pengaruh dari luar, sehingga kita dapat maju ke arah pertanian yang modern yang tidak ketinggalan dari negara lain di dunia.

Bidang lain yang berhubungan erat dengan pertanian adalah transformasi daerah terbelakang di pedesaan dan pembangunan sesuatu yang baru, dalam kehidupan di daerah pedesaan, baik secara material maupun spiritual, dan bersamaan dengannya melakukan proteksi dan perbaikan terhadap sistem ekologi dan produksi. Pencapaian sasaran ini akan memperbesar dampak positif bagi seluruh wilayah. Seperti diketahui, daerah pedesaan adalah merupakan daerah yang paling terbelakang dan paling miskin di negara-negara berkembang, dan baik dalam kolonialisme lama maupun baru, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan telah diperlebar. Sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan suatu struktur *industrio-agricultural*, kami memberi tekanan yang penting bagi keterkaitan pembangunan sosio-ekonomi di dua wilayah yaitu daerah perkotaan dan pedesaan, dan mengambil distrik sebagai titik fokus bagi konstruksi suatu struktur agro-industrial dan pengembangan sosial-kultural di daerah pedesaan. Dalam hubungan ini, kami telah membangun jaringan pengobatan, fasilitas pengobatan, kesehatan dan pendidikan di seluruh pedesaan, sehingga membantu perubahan tertentu dalam wajah pedesaan dan mengurangi kesenjangan yang tidak dapat ditolerir dari peninggalan sejarah.

Kami juga mempunyai pengalaman yang berhasil membawa ilmu pengetahuan dan teknik ke pedesaan, dan dalam mendidik petani-petani baik kooperatif maupun individual, dengan teknik penanaman dan pengembangbiakan seperti perbaikan tanah, penggaraman dan kontrol *acidity*, pengairan modern, penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik, pemilihan dan penggunaan bibit baru dan pengembangbiakan binatang atas dasar yang luas. Usaha-usaha ini membawa hasil permulaan yang menggairahkan; mengubah wajah daerah pedesaan yang secara tradisional ditandai dengan kemiskinan dan keterbelakangan secara kultural, meningkatkan pendapatan dan standar hidup sam-

pai tingkat tertentu dari para petani. Di wilayah yang tinggi dan pegunungan yang kebanyakan terdiri dari etnik minoritas dan kondisi yang sangat sulit, kami telah berhasil menghindari kerusakan hutan -- yang sangat berbahaya bagi hutan tropis Asia Tenggara. Beberapa negara di wilayah ini memiliki juga pengalaman banyak dalam bidang ini, sehingga apakah dapat dinyatakan kerjasama dalam bidang ini juga sangat penting dan menguntungkan?

Kerjasama dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dilanjutkan kepada bentuk kerjasama dalam bidang industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan. Dalam hubungan ini, kapasitas kerjasama antara Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya tidak kurang banyaknya. Sesudah penyatuan kembali, kami telah memulai mempelajari laut dan landas kontinen serta mengembangkan perikanan. Penemuan pendahuluan menunjukkan prospek yang baik. Dalam beberapa tahun ini, kami telah membangun fasilitas produksi dan yang penting untuk karet, kopi, teh, tembakau, biji minyak dan sebagainya serta beberapa kompleks agro-industrial yang langkah demi langkah menjurus ke arah produksi-produksi pertanian yang besar dan modern.

Sebagai satu hasil dari usaha di bidang penelitian, eksplorasi dan ekstraksi sumber-sumber alam, hasil pendahuluan menunjukkan bahwa kami memiliki persediaan bauksit, batu bara, minyak dan bijih besi lainnya. Untuk memanfaatkan dan menggunakan sumber-sumber ini secara efisien kami harus memiliki industri berat. Dengan bantuan Rusia, negara sosialis Eropa dan beberapa negara lainnya, kami telah membangun beberapa unit industri berat dan membuat persiapan bagi proyek energi yang besar, *non-ferrous and ferrous metalurgy*, dan *heavy mechanical engineering* dan sebagainya, dan ini akan memperbesar dampak positif jangka panjang atas ekonomi nasional. Tetapi karena keterbatasan modal, kami hanya dapat memilih ukuran optimum dengan mengkombinasikan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dengan membangun beberapa proyek yang mempunyai arti jangka panjang dan beberapa untuk memenuhi kebutuhan yang segera. Kami harus melaksanakan pembangunan industri berat secara rasional dengan tetap menganggap penting industri ringan dan industri pengolahan, industri lokal kecil dan menengah termasuk industri kerajinan tangan tradisional. Seperti di negara-negara berkembang lainnya, industri pengolahan membutuhkan masukan teknologi, mesin, bahan baku dan energi yang meningkat. Kami pikir bahwa Vietnam adalah suatu pasar untuk komoditi-komoditi yang disebutkan bagi beberapa negara di Asia Tenggara. Kami juga berpikir kemungkinan kerjasama patungan secara bilateral dan multilateral dalam bidang manufaktur dan pengolahan yang modern dengan teknologi padat modal dapat dipergunakan bagi keuntungan bersama negara-negara yang terlibat.

Erat kaitannya dengan bidang industri adalah kerjasama dalam bidang energi. Ini merupakan bidang yang krusial dalam hubungannya dengan masalah perdamaian, stabilitas dan pembangunan seluruh wilayah dalam menghadapi ambisi ekspansionis dan hegemonis kekuatan besar di Laut Timur. Bahaya ini menuntut negara-negara Asia Tenggara mengambil tindakan yang sesuai atas dasar usaha bersama dan kerjasama menghindari negara luar menangkap ikan di wilayah perairan yang masih dipermasalahkan. Kami mengetahui bahwa turunnya harga minyak baru-baru ini telah berakibat yang tidak kecil terhadap penerimaan ekspor dan pembangunan ekonomi Indonesia. Sebaliknya impor minyak dalam beberapa tahun ini telah menelan bagian penting dari penerimaan ekspor Muangthai dan Pilipina. Sampai saat ini, hampir seluruh negara di wilayah ini mendapatkan ladang minyak yang penting, khususnya di landas kontinen di mana kondisi ekstraksi agak serupa. Dalam hubungan ini Indonesia adalah yang terkemuka dengan banyak pengalaman yang harus dipelajari Vietnam. Atas dasar semangat seperti dikehendaki sebelumnya, kami pikir kerjasama akan membuka perspektif baik, dari pertukaran pengalaman dan latihan tenaga-tenaga khusus sampai bentuk eksplorasi yang sesuai dan koordinasi tindakan dalam bidang pengangkutan, asuransi dan pemasaran dan sebagainya, dan ini merupakan persyaratan-persyaratan esensial yang dibutuhkan Vietnam dalam waktu dekat.

Dalam bidang energi, satu faktor yang tidak kurang pentingnya bagi kami dan juga bagi beberapa negara lainnya di wilayah adalah penyediaan minyak dan penggunaan bentuk energi lokal baru, yang sesuai dan tidak mahal seperti pabrik *hydroelectric* kecil, tenaga angin, biogas, dan tenaga matahari dan sebagainya, dalam industri lokal, pertanian, kehutanan dan perikanan. Sementara terus melakukan pencarian dan pengolahan minyak dan pembangunan beberapa stasiun *hydroelectric* dan *thermoelectric*, kami telah mengarahkan para ilmuwan dan teknisi ke arah penelitian dan pemanfaatan bentuk-bentuk energi yang disebutkan di atas. Penelitian dalam bidang ini sampai saat ini telah memberi hasil yang berarti. Kami pikir bahwa kerjasama, pertukaran pengalaman dan penelitian ilmiah antara Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara sangat memberi harapan.

Akhirnya, kami pikir bahwa kerjasama dalam bidang obat-obatan, kesehatan dan penelitian ilmiah dan teknologi pada umumnya adalah sangat penting bagi pembangunan kita. Karena kita tinggal dalam kondisi iklim tropis dan lingkungan yang sama, masyarakat kita tidak dapat menghindari jenis penyakit yang sama, oleh karenanya mereka membutuhkan pengobatan dan pencegahan yang paling efisien. Di lain pihak, penerapan kemajuan ilmu pengetahuan akan membawa efisiensi sosial-ekonomi yang realistis, bila kita menciptakan dasar-dasar suatu sistem penelitian ilmiah dan teknologi nasional sesuai kondisi kehidupan dan lingkungan di wilayah ini. Dari sudut pan-

dangan ini, Vietnam telah melakukan usaha besar dan memperoleh hasil yang dapat diandalkan dalam bidang penelitian sains dan teknologi. Kami percaya bahwa Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya mungkin mencapai hasil yang perlu kami pelajari. Merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan bagi masyarakat di wilayah ini apabila kita dapat mengembangkan pertukaran pengalaman dan informasi, dan kerjasama antar bangsa dalam bidang penelitian dan penerapan sains dan teknologi.

Seperti diketahui Vietnam telah melalui proses sejarah perjuangan kemerdekaan dan sekarang telah merupakan suatu negara yang bersatu kembali dengan potensi besar bagi pembangunan ekonomi dan penyempurnaan kehidupan kultural dan material. Sesudah mencapai kemenangan dalam perjuangan melawan invasi luar negeri dan menyatukan kembali negerinya, masyarakat kami berusaha keras mengatasi akibat perang yang berat dan bencana alam dalam rangka merehabilitasi dan mengembangkan ekonomi nasional. Kekuatan imperialis, ekspansionis dan hegemonis menginginkan dan dalam praktek telah melakukan tindakan penghancuran dengan berbagai bentuk, termasuk blokade dan embargo, untuk memperlemah ekonomi Vietnam. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa rencana ini tidak memberi hasil yang diinginkan oleh mereka. Kami telah mengatasi kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan besar seperti kami memenangkan perjuangan kemerdekaan, dengan pengorbanan-pengorbanan dan demi kemakmuran buruh dari negara kesatuan, dengan bantuan besar dari kerjasama yang efisien dengan sahabat dari seluruh lima benua dan negara-negara yang mendambakan perdamaian, stabilitas, kemakmuran, keadilan dan martabat manusia?

Kami menyadari penuh kesulitan kami, termasuk kelemahan yang harus kami atasi. Bagi kami, masalah strategis yang penting adalah bagaimana mempergunakan secara efektif 23 juta tenaga dewasa dan puluhan juta hektar tanah pertanian dan kehutanan, potensi hutan yang besar, laut, mineral dan kapasitas produktif yang tersedia, mengembangkan secara intensif dan ekstensif kerjasama dan integrasi ekonomi dengan negara-negara sahabat atas dasar persamaan dan saling menguntungkan.

Kesulitan yang kami hadapi sekarang adalah suatu pemekaran tubuh, kontradiksi yang sekarang kami pecahkan adalah pemekaran ekonomi, yang sangat berbeda dari suatu ekonomi yang menurun yang dalam dirinya membawa penyakit. Dalam proses pembangunan dari suatu ekonomi yang tertahan lama oleh feodalisme, kolonialisme baru dan lama, yang dihancurkan oleh perang dan sekarang masih menghadapi beberapa bentuk sabotase perang, yang dilakukan oleh musuh dari luar, di satu pihak kami menghadapi kesulitan-kesulitan yang sama seperti yang dialami oleh negara-negara sahabat di wilayah ini, dan di lain pihak beberapa masalah spesifik kami. Tetapi ada masalah

yang sama dan fundamental yaitu, kebutuhan akan perdamaian dan stabilitas untuk pembangunan ekonomi, kebutuhan kerjasama dengan negara-negara maju dan negara-negara di kawasan ini, koordinasi tindakan melawan usaha manuver dari kekuatan besar yang mempergunakan kekuatan ekonomi dan politiknya untuk menguasai sumber-sumber alam, memeras tenaga buruh murah dan mendominasi sistem ekonomi dan keuangan internal dari negara-negara berkembang. Dengan sifat ekonomi negara-negara Asia Tenggara, kami tidak pernah dan tidak akan pernah mempunyai ambisi melakukan invasi dan dominasi ekonomi negara mana pun. Kami hanya menginginkan perdamaian, stabilitas dan kerjasama di wilayah ini. Ini merupakan keinginan dari setiap negara seperti semua negara Asia Tenggara.

Kerjasama negara-negara Asia Tenggara, di mana di dalamnya adalah Vietnam dan negara Indocina lainnya, adalah salah satu kondisi keberadaan kita dan pembangunan. Tetapi dapat disayangkan sampai sejauh ini kerjasama seperti ini belum diterima bersama kepentingannya dan belum memenuhi persyaratan obyektif pembangunan dari bangsa-bangsa di wilayah kita. Hambatan terbesar bagi kerjasama itu adalah pertentangan kekuatan imperialis dan ekspansionis yang mengembangkan ambisi hantu dan diarahkan ke negara-negara Asia Tenggara. Tetapi penyebab yang paling menentukan menurut kami, adalah peri laku subyektif, yaitu bahwa kita tidak memiliki kesempatan bertemu dan mengerti satu sama lain secara lebih baik. Oleh karena itu, kami pikir jalan terbaik untuk mengembangkan kerjasama antara Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya dengan maksud mewujudkan kemungkinan yang disebut di atas adalah meneruskan dan memperluas bentuk pertukaran informasi dan penelitian ilmiah, suatu contoh daripadanya adalah penyelenggaraan seminar.